

**LAPORAN AKHIR TAHUN**  
**PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI**  
**(PBK)**

kkB  
kk-2  
LP.37/19  
Was  
a



**ANALISIS PERFORMA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA**  
**Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun**

**TIM PENGUSUL**

Dr. Wasiaturrahma, SE.,M.Si [NIDN: 0019046802] Ketua Pengusul

Dr. Raditya Sukmana, SE.,MA [NIDN: 0013047605] Anggota Pengusul 1

Shochrul Rohmatul Ajija, SE.,M.Ec [NIDN: 0025058603] Anggota Pengusul 2

**DIBIYAI OLEH:**  
**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**November 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Analisis Performa Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia  
**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr WASIATURRAHMA, S.E., M.Si  
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga  
NIDN : 0019046802  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Nomor HP : 081330622333  
Alamat surel (e-mail) : rahma@feb.unair.ac.id  
**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : Dr RADITYA SUKMANA S.E., M.A  
NIDN : 0013047605  
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga  
**Anggota (2)**  
Nama Lengkap : SHOCHRUL ROHMATUL AJIJA S.E., M.Ec  
NIDN : 0025058603  
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga  
**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 105,000,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 643,290,000

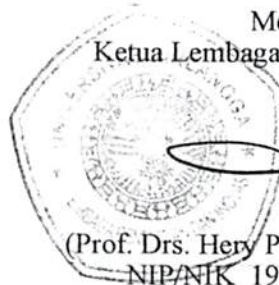


Mengetahui,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak)  
NIP/NIK 196108201989022001

Kota Surabaya, 13 - 11 - 2018  
Ketua,

(Dr WASIATURRAHMA, S.E., M.Si)  
NIP/NIK 196804191999032001



Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi

(Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D)  
NIP/NIK 196705071991021001



**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Konsep Keuangan Mikro .....	11
2.2. Evolusi Keuangan Mikro .....	12
2.3. Teori Siklus Hidup Keuangan Mikro.....	13
2.4. Kerangka Sistem dan Model Keuangan Mikro.....	13
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
3.1. Tujuan Penelitian .....	15
3.2. Manfaat Penelitian .....	15
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	16
4.1. Data.....	16
4.2. Metode Penelitian .....	18
4.2.1. Pengukuran Efisiensi .....	18
4.2.2. Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi .....	21
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....	23
5.1. Hasil .....	23
5.1.1. Pendekatan Intermediasi.....	23
5.1.2. Pendekatan Produksi.....	48
5.2. Luaran yang Dicapai .....	79
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	80
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
7.1. Kesimpulan .....	81
7.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	vi
Lampiran 1 .....	ix
Lampiran 2.....	xxvi
Lampiran 3.....	xxvii



**DAFTAR TABEL**

Tabel 5.1. BPRS Efisien Selama Lima Tahun.....	25
Tabel 5.2. Sampel Atas BPRS Tahun 2013-2017.....	28
Tabel 5.3. Jumlah BPRS Sampel Bawah dengan Nilai Efisiensi di Bawah Rata-Rata.....	30
Tabel 5.4. Sampel Atas BPRS Tahun 2013-2017.....	30
Tabel 5.5. Perbandingan Jumlah BPRS Efisien Sampel Atas dan Sampel Bawah.....	34
Tabel 5.5. Jumlah BPR yang Efisien .....	34
Tabel 5.6. Nilai Rata-Rata Efisiensi BPR dan Jumlah BPR di Bawah Nilai Rata-Rata.....	36
Tabel 5.7. Skor Efisiensi BPR Sampel Atas 2013-2017.....	39
Tabel 5.8. Rata-Rata TE Intermediasi BPR Sampel Bawah.....	47
Tabel 5.9. BPR Sampel Bawah Efisien Selama Lima Tahun.....	48
Tabel 5.10. BPRS Kontinyu Efisien Selama Lima Tahun.....	50
Tabel 5.11. Sampel Atas BPRS Pendekatan Produksi .....	53
Tabel 5.12. Sampel Bawah BPRS Pendekatan Produksi.....	55
Tabel 5.13. Perbandingan Rata-Rata Efisiensi BPR Intermediasi dengan Produksi.....	59
Tabel 5.14. Skor Efisiensi BPR pada Sampel Atas .....	63
Tabel 5.15. Daftar BPR yang Efisien Secara Kontinyu Dalam Lima Tahun .....	73
Tabel 5.16. Target Luaran Penelitian .....	79
Tabel 6.1. Rencana Tahapan Berikutnya.....	80

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 5.1.	Jumlah BPRS yang Efisien.....	23
Gambar 5.2.	Jumlah BPRS dengan <i>Technical Efficiency</i> Kurang dari 0,5 .....	26
Gambar 5.3.	Jumlah BPRS dengan Skor Efisiensi di Bawah Efisiensi Rata-Rata.....	27
Gambar 5.4.	Jumlah BPRS yang Efisien di Sampel Bawah.....	33
Gambar 5.5.	Jumlah BPR dengan Skor Efisiensi Kurang dari 0,5 .....	35
Gambar 5.6.	Jumlah BPR dengan Skor Efisiensi di Bawah Nilai Rata-Rata.....	36
Gambar 5.7.	Jumlah BPR yang Efisien di Sampel Atas.....	37
Gambar 5.8.	Skor Efisiensi BPR yang Efisien di Sampel Bawah.....	47
Gambar 5.9.	Jumlah BPRS yang Efisien dengan Pendekatan Produksi.....	50
Gambar 5.10.	Jumlah BPRS yang Efisien di Sampel Atas .....	51
Gambar 5.11.	Jumlah BPR yang Efisien Dengan Pendekatan Produksi.....	59
Gambar 5.12.	Jumlah BPR yang Efisien Kurang dari Rata-Rata.....	61
Gambar 5.14.	Jumlah BPR yang Efisien pada Sampel Atas .....	62



## BAB 1. PENDAHULUAN

Indonesia masih memiliki banyak permasalahan yang harus dituntaskan, salah satunya adalah masalah kemiskinan dan kesejahteraan. Banyak masyarakat yang terus mempertanyakan kapan dapat keluar dari kondisi tersebut (Lonborg & Rasmusse, 2014). Secara empirik banyak penelitian yang membuktikan bahwa keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mampu menjawab kedua permasalahan tersebut. UMKM telah terbukti menjadi kelompok usaha yang mampu bertahan dari krisis ekonomi dan moneter (Hafsah, 2004). Jumlah UMKM dan LKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2013 ada sebanyak 57.895.721 dan hingga tahun 2015 sebanyak 59.262.772 UMKM tersebar di Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2014 *potential demand* dari lembaga keuangan mikro di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, hampir mencapai dua juta orang yang mana merupakan wiraswasta dan wiraswasta dengan pegawai yang tidak dibayar (Nashihina, 2014). Interaksi antara pengaruh dari bank komersial dan pengurangan kemiskinan membentuk evolusi LKM modern (Dacin, Tina, & Derin, 2013).

**Tabel 1.1. Jumlah UMKM di Indonesia 2013 – 2015**

	2013	2014	2015
UMKM	57.895.721	57.895.721	59.262.772

Sumber. Kementerian Koperasi dan UKM. Diolah

Meningkatnya jumlah UMKM berpengaruh pada posisi kredit yang disalurkan ke UMKM. Lembaga keuangan yang dinilai tepat dapat memberikan pembiayaan untuk sektor UMKM adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang melayani pengusaha-pengusaha mikro yang tidak memiliki akses keuangan di lembaga keuangan perbankan (Ajija, dkk., 2018:1). Jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu bank dan non-bank. Bentuk dari LKM bank adalah BPR dan BPR Syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hingga 2017 terdapat sebanyak 167 BPR Syariah dan 1.619 BPR di seluruh Indonesia.

Keberadaan lembaga keuangan mikro memberikan pengaruh dengan memberdayakan peminjam wanita (Weber & Ahmad, 2014). Dibandingkan dengan peminjam perempuan, peminjam laki-laki cenderung terliti hutang. Begitu juga para peminjam dengan hasil investasi

yang rendah dan penggunaan pinjaman non-produktif (Schicks, 2014). Peminjam perempuan dapat meningkatkan kinerja LKM melalui pembayaran hutang yang terus ditingkatkan (Cruz & Boehe, 2013; Szafarz & Agier, 2013). Namun, hal terjadi sebaliknya jika peminjam diberikan pelatihan. Bagi peminjam laki-laki dan wanita yang diberikan pelatihan, efek besar didapatkan oleh peminjam laki-laki dibandingkan peminjam perempuan (Fiala, 2018). Selain perbedaan perilaku peminjam dari sisi jenis kelamin, perilaku peminjam perorangan dan kelompok pun berbeda. LKM lebih memilih memberikan pinjaman perorangan meskipun dengan tingkat gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman kelompok (Kendi & Kodongo, 2013).

Kondisi LKM di Indonesia selama lima tahun terakhir terus turut serta mengembangkan UMKM dengan cara memberikan kredit khusus sektor UMKM. Total dana yang disalurkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebanyak 639.471,5 miliar rupiah dan meningkat hingga di 2017 sebanyak 990.377,6 miliar rupiah. Proporsi pemberian kredit paling banyak diberikan oleh Bank Persero dan Bank Swasta Nasional Devisa, seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Bank Antara Daerah, Bank Artha Graha Internasional, dan lain-lain. Kredit UMKM yang disalurkan Bank Persero terus meningkat dari 48% di 2013 menjadi 78% di 2017. Sementara pada bank swasta nasional devisa pada tahun 2013 memberikan kredit sebanyak 34% dan di tahun 2017 mencapai angka 51%. Jenis bank lainnya, seperti bank swasta non devisa, BPD, bank campuran, bank asing, dan BPR-BPRS masih di bawah angka 15%.

**Tabel 1.2. Perkembangan BAKI Debet Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank 2013 – 2017 (Miliar Rp)**

<b>BAKI DEBET</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bank Persero	304.750,6	344.936,7	386.717,2	450.416,6	499.073,9
Bank Swasta Nasional Devisa	217.529,4	269.955,2	285.787,9	276.579,7	322.935,1
Bank Swasta Nasional Non Devisa	27.571,6	45.853,7	48.206,0	51.043,5	38.198,3
BPD	46.895,9	53.377,4	54.540,0	64.453,6	74.972,3
Bank Campuran	11.378,7	13.467,1	13.532,2	12.183,9	6.445,0
Bank Asing	679,1	4.246,6	1.683,0	2.320,2	763,0
BPR-BPRS	30.648,1	35.741,0	40.189,1	43.392,3	47.990,0
<b>Total</b>	<b>639.471,5</b>	<b>767.577,6</b>	<b>830.656,2</b>	<b>900.389,8</b>	<b>990.377,6</b>

Sumber. Perkembangan BAKI Debet Kredit UMKM Perbankan, Bank Indonesia

Besarnya peran LKM terhadap UMKM maka perlu diciptakannya strategi untuk mempertahankannya. Bercermin dari cara Timur Tengah, strategi yang harus dilakukan untuk industri lembaga keuangan mikro adalah optimalisasi teknologi untuk mencapai dua tujuan utama yaitu menjangkau banyak orang miskin dan stabilitas keuangan (Bassem, 2014). Hal ini karena pada masalah pertumbuhan ekonomi yang pesat, jika masih menggunakan cara tradisional maka LKM akan terus tumbuh secara tidak efisien atau inefisiensi (Yimng, 2014). Kebijakan LKM untuk memaksimalkan keuntungan bisa saja menjadi suatu tindakan yang tidak mengarah pada pengentasan kemiskinan (Salim, 2013). Salah satu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan orientasi keuntungan oleh sebuah LKM adalah dengan meningkatkan bunga, namun hal tersebut justru tidak berkontribusi terhadap profitabilitas dan berkelanjutan karena akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi (Roberts, 2013).

UMKM dan PDB memiliki hubungan saling mempengaruhi. Keberadaan UMKM memberikan kontribusinya dengan melalui pajak yang disetorkan melalui pajak (Herman, Hidayah, & Raharja, 2013) dan mampu mengurangi pengangguran serta menciptakan lapangan pekerjaan (Sofyan, 2017). Sedangkan PDB beserta dengan kredit modal kerja dan angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap jumlah UMKM baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Pramana & Hakim, 2013).

Kontribusi UMKM terhadap PDB selama periode 2006 hingga 2012 terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2012 kontribusi UMKM pada PDB sebesar 55,42%. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2016 kontribusi sektor UMKM mencapai 60%. Meningkatnya kontribusi UMKM ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM. Tenaga kerja juga banyak terserap di UMKM. Oleh sebab itu, sektor UMKM perlu terus didukung dan dikembangkan.

**Tabel 1.3. Sumbangan UMKM pada PDB Berdasarkan Harga Konstan (Miliar Rupiah)**

Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	1.032.573,9	1.099.301,1	1.165.753,2	1.212.599,3	1.282.571,8	1.369.326,0	1.451.460,2
PDB (Harga konstan)	1.847.126,7	1.964.327,3	2.082.456,1	2.178.850,4	2.314.458,8	2.464.566,1	2.618.932,0
Persentase UMKM ke PDB	55,90%	55,96%	55,98%	55,65%	55,42%	55,56%	55,42%

Sumber: BPS (2017)



Selain memberikan kontribusi pada PDB, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan. Selama periode 2010 hingga 2015, tenaga kerja yang diserap melalui UMKM mencapai angka 96,7% dan diproyeksikan terus meningkat. Persentase tertinggi ada di tahun 2013 di mana menyentuh angka 98,46%. Meskipun dilihat dari persentasenya mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya, namun angka tenaga kerja terus meningkat.

**Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Kerja Sektor UMKM di Indonesia**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tenaga Kerja UMKM	99.401.775	101.722.458	107.657.509	114.144.082	114.979.334	116.858.876
Tenaga Kerja 15 Tahun Keatas	107.405.572	112.045.879	114.061.982	115.929.612	118.169.922	120.846.821
Persentase	92,55%	90,79%	94,39%	98,46%	97,30%	96,70%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, Diolah

Pentingnya keberadaan UMKM bagi ekonomi Indonesia perlu dukungan dari banyak pihak. Dalam berbisnis hal yang paling dibutuhkan salah satunya adalah modal atau kemudahan akses keuangan (Fauzi, Suharjo, & Syamsun, 2016). Ukuran usaha juga menentukan ukuran lembaga keuangan yang dapat diakses. Pada usaha mikro dan kecil maka lembaga keuangan yang paling mungkin untuk mendapatkan akses keuangan adalah pada BPR atau BPRS. Sedangkan untuk usaha menengah dan besar menggunakan bank-bank umum yang mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar.

Sekitar 60-90% pekerja di wilayah perkotaan di negara-negara berkembang memiliki peran yang signifikan dalam setiap strategi dan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Nguimkeu, 2014) dan di Indonesia sejauh ini sudah banyak upaya yang dilakukan, salah satunya adalah mengembangkan sektor UMKM. Baik pemerintah dan swasta bersinergi untuk mengembangkan UMKM. Salah satunya adalah dengan melakukan optimalisasi peran lembaga keuangan baik bank maupun non-bank hingga lembaga keuangan mikro (LKM).

**Tabel 1.5. Jumlah BPR-BPRS di Indonesia**

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BPR Syariah	158	160	163	163	166	167
BPR	1.653	1.635	1.643	1.637	1.633	1.619

Sumber: Statistika Perbankan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. 2017

Sebaran BPR maupun BPR Syariah di Indonesia masih di dominasi di Indonesia bagian barat. Sepuluh provinsi dengan jumlah BPR terbanyak berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Barat, Banten, Sumatera Utara, D.I Yogyakarta, Kep. Riau, dan Riau. Sementara untuk sepuluh provinsi dengan jumlah BPR terendah ada di Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Nangroe Aceh Darussalam, Papua Barat, Gorontalo, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Barat.

**Tabel 1.6. Jumlah BPR Terbanyak di Indonesia**

No.	Jumlah BPR di Sepuluh Provinsi			
	Terbanyak		Terendah	
1	Provinsi Jawa Timur	304	Provinsi Sulawesi Tengah	8
2	Provinsi Jawa Barat	283	Provinsi Bengkulu	5
3	Provinsi Jawa Tengah	252	Provinsi Kalimantan Tengah	5
4	Provinsi Bali	135	Provinsi NAD	5
5	Provinsi Sumatera Barat	89	Provinsi Papua Barat	5
6	Provinsi Banten	59	Provinsi Gorontalo	4
7	Provinsi Sumatera Utara	54	Provinsi Kep. Bangka Belitung	4
8	Provinsi D.I Yogyakarta	53	Provinsi Maluku Utara	3
9	Provinsi Kep. Riau	43	Provinsi Maluku	2
10	Provinsi Riau	30	Provinsi Sulawesi Barat	1

Sumber: Statistika Perbankan Syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. 2017

Melihat jumlah BPR di Indonesia yang ribuan dibandingkan dengan BPR Syariah yang masih ratusan maka sebenarnya kedua Lembaga keuangan tersebut masih terlalu dini untuk dibandingkan. Namun demikian, jika dilihat dari sebaran jumlah lembaga, BPR dan BPRS memiliki kesamaan. Pola yang terbentuk adalah BPR dan BPR Syariah tersebut mayoritas berada di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat, sedangkan di bagian Indonesia tengah dan Indonesia timur sangat sedikit.

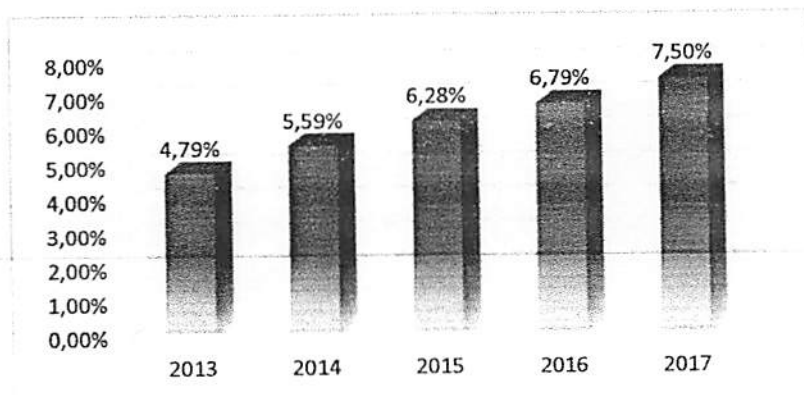
**Tabel 1.7. Jumlah BPRS di Indonesia dari Tertinggi ke Terendah**

Jumlah BPR Syariah di Indonesia								
No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah
1	Provinsi Jawa Timur	29	11	Provinsi Bengkulu	3	21	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1
2	Provinsi Jawa Barat	28	12	Provinsi Maluku Utara	3	22	Provinsi Papua	1
3	Provinsi Jawa Tengah	26	13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3	23	Provinsi Sulawesi Barat	1

Jumlah BPR Syariah di Indonesia								
No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah
4	Provinsi D.I Yogyakarta	12	14	Provinsi Kep. Riau	2	24	Provinsi Sumatera Selatan	1
5	Provinsi Lampung	11	15	Provinsi Riau	2			
6	Provinsi NAD	10	16	Provinsi Bali	1			
7	Provinsi Banten	8	17	Provinsi DKI Jaya	1			
8	Provinsi Sumatera Utara	8	18	Provinsi Kalimantan Selatan	1			
9	Provinsi Sulawesi Selatan	7	19	Provinsi Kalimantan Tengah	1			
10	Provinsi Sumatera Barat	7	20	Provinsi Kalimantan Timur	1			

Keberadaan BPR maupun BPR Syariah bagi UMKM dinilai sangat penting. Hal ini dikarenakan sasaran BPR adalah melayani kebutuhan kredit petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, pegawai, pensiunan, dan lapisan masyarakat lainnya yang belum terjangkau oleh bank umum agar tidak terjebak oleh rentenir (Iswandari & Anan, 2015). BPR memiliki aktivitas bisnis yang spesifik yakni melayani UMKM dan bertujuan untuk turut membangun ekonomi lokal (Wahyuni, Sukarsa, & Yuliarimi, 2014).

BPR-BPRS selama lima tahun terakhir, menyalurkan 5 – 8% kredit ke UMKM. Posisi paling rendah ada di tahun 2013 yang sebesar 5%, masih lebih rendah dari BPD. Posisi paling tinggi ada di tahun 2017 yang sebesar 8%. Tahun 2014 dan 2015 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hanya sebanyak 6% kredit UMKM melalui BPR-BPRS.



Sumber. Perkembangan BAKI Debet Kredit UMKM Perbankan, Bank Indonesia

**Gambar 1.1. Persentase Kredit UMKM Oleh BPR-BPRS**

Dengan demikian, eksistensi BPR juga perlu dipertahankan. Selain karena mampu menolong UMKM, BPR juga mampu bertahan ketika krisis ekonomi terjadi. Saat krisis ekonomi terjadi, BPR justru mampu meningkatkan kreditnya dan menghimpun simpanan (Lestari, 2014). Dibandingkan dengan bank umum, BPR lebih tahan krisis. Ada hubungan antara krisis ekonomi terhadap kondisi bank. Dampak struktur kepemilikan pada aktivitas pinjaman bank di negara-negara di Eropa tengah dan timur tergantung pada jenis krisis, yaitu apakah krisis dalam negeri, krisis global, atau simultan, sedangkan pertumbuhan deposito dan rasio profitabilitas merupakan faktor penentu pertumbuhan kredit terlepas dari pengaruh krisis di negara tempat bank tersebut berada (Allen, Jackowicz, Kowalewski, & Kozlowski, 2017).

Banyaknya lembaga keuangan mikro yang tersebar di Indonesia ternyata masih belum memberikan sinyal positif. Hal ini karena banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri tidak diimbangi dengan *supply* Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi sehingga tidak jarang pendirian lembaga keuangan syariah mengalami kehancuran karena kurang profesional dalam pengalaman dan keterampilan mengenai manajemen pengelolaan termasuk sistem organisasi, pelayanan, maupun SDM. Adanya faktor kompetisi dengan perbankan konvensional yang dapat menjadikan terjadinya perlambatan pertumbuhan pada perbankan syariah, sebagai penanggulangan dalam kompetisi ini adalah efisiensi. Ketidakefisienan akan dapat menjadi penghalang dalam kompetisi yang *head to head* antara perbankan syariah dengan konvensional (Ascarya,dkk, 2009). Belajar dari bank-bank di Eropa, kebanyakan dari bank-bank tersebut memiliki keuntungan yang rendah akibat biaya yang tinggi, tingkat pengembalian dari aset pendapatan yang rendah, dan tingkat efisiensi yang rendah (Feng & Wang, 2018).

Sebagai lembaga intermediasi, BPR-BPRS harus memiliki performa yang bagus terutama dari sisi keuangannya. Hal ini lebih disebabkan oleh jika performa keuangan baik maka akan memberikan harga yang lebih baik kepada nasabah, khususnya UMKM. Salah satu ukuran performa LKM adalah tingkat efisiensi. Telah banyak dilakukan penelitian terkait dengan efisiensi lembaga keuangan di negara-negara lain. Nurbojak dan Kořak (2017) membandingkan efisiensi biaya pada bank di sepuluh negara di Eropa Tenggara dan menemukan bahwa tingkat efisiensi bank dipengaruhi oleh keanggotaan dari negara di Uni Eropa. Rata-rata bank di negara yang merupakan bagian dari Uni Eropa lebih efisien dibandingkan bukan anggota Uni Eropa. Sementara Moradi-Motlagh dan Babacan (2015) mengukur efisiensi dari bank-bank besar di Australia dan beberapa daerah sebelum, sedang,

dan setelah krisis keuangan global. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa krisis ekonomi global berdampak pada tingkat efisiensi bank meskipun tidak terjadi di semua bank. Selain Moradi-Motlagh dan Babacan, Diallo juga melakukan hal yang sama di Amerika dan menghasilkan hasil yang sama.

Penelitian sebelumnya juga kebanyakan mengukur efisiensi dengan tidak memperhitungkan kekuatan pasar lokal, jika hal tersebut diabaikan maka dihitung sebagai efisiensi biaya tambahan yang mengarah kepada over-prediksi (Kumar, 2013). Hubungan antara efisiensi bank dengan ketergantungan finansial adalah positif dan tidak signifikan pada negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan negara-negara berkembang (Diallo, 2018). Pada kasus di Cina, pemerintah dan regulator harus meningkatkan modal yang dimiliki oleh bank-bank komersial, dan menambah suntikan dana akan sangat efektif dalam mengurangi risiko modal serta meningkatkan efisiensi. Contoh lain di Afrika, pemberi kredit secara konsisten menurunkan harga pinjaman, sedangkan biro kredit swasta memiliki efek yang sebaliknya, mampu meningkatkan jumlah pinjaman (Doan, Lin, & Doong, 2017; Asongu, 2017).

Adanya peningkatan persaingan pasar secara signifikan mampu meningkatkan stabilitas bank, mengurangi kemungkinan kegagalan bank, pembagian kredit bermasalah, dan meningkatkan profitabilitas (Goetz, 2017). Sebagai salah satu upaya dalam sebuah perusahaan keuangan untuk terus meningkatkan stabilitas bankadala dengan memiliki tim manajemen atau yang disebut dengan *Top Managemen Team* (TMT) yang memiliki efek yang berbeda tergantung pada jenis inovasi yang diciptakan (Shuying, Whuijuan, & Bobo, 2017). Jika lembaga keuangan tersebut tidak berhasil membuat inovasi produk dengan menggunakan informasi yang didapatkan maka lembaga keuangan tersebut akan berisiko tinggi untuk membayar bunga yang tinggi dan menerima lebih sedikit deposito (Garcia, 2017). Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan kompetisi antar bank dalam mengurangi kredit macet (Tan dan Floros, 2018). Hal lain yang dapat dilakukan oleh regulator Indonesia adalah melindungi pasar domestik hingga bank dapat berkompetisi secara domestik serta dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur (Shaban & James, 2017).

Tingkat efisiensi memang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh banker, pembuat kebijakan, manajer, dan pemerintah (Mensi, Hamdi, & Shahzad, 2018). Tingkat efisiensi membengaruhi kinerja keuangan (Baensens, Seret, & Lois, 2013). Efisiensi pada industri perbankan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu mikro dan makro (Eko, 2011). Pertama, sudut pandang mikro, perbankan harus efisien dalam kegiatan operasionalnya. Kedua, sudut

pandang makro, perbankan yang efisien harus dapat mempengaruhi biaya intermediasi dan stabilitas sistem keuangan. Kegiatan operasional dari sudut pandang mikro dalam perbankan meliputi penghimpunan dan penyaluran dana atau fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi yang baik dapat dicapai oleh perbankan khususnya BPR Syariah sebagai objek penelitian adalah dengan terus meningkatkan kinerja internal dan mempertimbangkan faktor efisiensi.

Kurnia (2004) menyatakan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana yang ekspansif tanpa mempertimbangkan faktor efisiensi akan berpengaruh pada profitabilitas. Adanya efisiensi akan membantu BPR atau BPR Syariah meningkatkan keuntungannya. Sementara dampak inefisiensi pada bank dapat membuat performa bank tersebut melemah (Chen, Matousek, & Wanke, 2018). Selain faktor efisiensi, penggunaan *Net Stable Funding Ration* (NSFR) pada bank mampu mengurangi kegagalan dan meningkatkan laba bank (Wei, Gong, & Wu, 2017).

Marjin bank dipengaruhi oleh persaingan dan diversifikasi. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di pasar yang kurang kompetitif mampu menetapkan marjin yang lebih tinggi karena tidak mendiversifitkasi pendapatan mereka, mengacu pada strategi subsidi silang. Dampak dari persaingan dan diversifikasi pada marjin bank terlihat di bank-bank dengan diversifikasi kontrak pinjaman yang lebih rendah dan pada bank yang memiliki proporsi pinjaman bagi hasil dan bagi hasil (*profit loss sharing*)(Trinugroho, Risfandy, & Ariefianto, 2018).

Tingkat efisiensi dipengaruhi oleh banyak hal. Diantaranya adalah kondisi geografi dan manajerial bank yang dikendalikan oleh manajer dan karyawan (Quaranta, Raffoni, & Visani, 2018), periode sampel (Diallo, 2018), tingkat risiko likuiditas dan risiko modal (Tan & Floros, 2018), risiko operasi, tekanan persaingan pasar, dan kebijakan manajemen perusahaan yang tidak memberikan dampak yang liner pada efisiensi operasi bank (Wu, Liu, & Zhai, 2018), struktur kepemilikan dan pendapatan yang tidak stabil, status kepemilikan bank (Doan, Lin, & Doong, 2017), dan ukuran lembaga keuangan (Biswas, Gómez, & Zhai, 2017). Status kepemilikan bank, seperti bank milik pemerintah akan lebih memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan kecil hingga besar melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank pemerintah (Srinivasan & Thampy, 2017). Selain status kepemilikan lembaga keuangan, ukuran lembaga keuangan dan nilai perusahaan juga mempengaruhi efisiensi. Sebuah perusahaan yang meminjam uang dari bank besar akan berinvestasi lebih banyak, tumbuh lebih cepat, dan memiliki risiko yang lebih tinggi. Di Afrika, bentuk terbaik LKM antara LKM dengan saham yang dimiliki publik dengan LKM berbentuk LSM, yakni berbentuk LSM (Barry & Ruth, 2014).

Sejauh ini penelitian yang dilakukan terkait efisiensi BPR dan BPR Syariah masih seputar mengukur tingkat efisiensi dan menggunakan di wilayah tertentu, bukan menggunakan data seluruh provinsi di Indonesia yang ada serta tidak meneliti determinan-determinannya. Beberapa penelitian tersebut seperti mengukur kinerja BPR dan BPR Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Iswandari & Anan, 2015), di Sumatera Barat (Hamidi, 2017), dan di Kota Semarang (Hendi & Widiyah, 2010).

Terdapat perbedaan tingkat efisiensi sebelum dan sesudah krisis. Bank-bank kembali tumbuh setelah terjadinya krisis pada tahun 2008. Bank-bank melakukan diversifikasi aliran pendapatan mereka dibandingkan sebelum terjadinya krisis. Dari sisi efisiensi, rasio pendapatan setelah krisis lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Oleh sebab itu, pihak regulator perlu mempertimbangkan ekspansi bank dan meningkatkan modal (Oino, 2017). Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator adalah ikut turun tangan dalam menentukan kompensasi SEO bank sebagai upaya untuk mengurangi risiko bank (Yang, 2017).

Pembelian aset milik bank oleh bank sentral dapat mengurangi ketergantungan neraca keuangan lembaga keuangan dalam memperpanjang pembiayaan. Penerapan kebijakan moneter yang tidak konvensional mampu mendorong pertumbuhan kredit pada sub-periode pasca krisis (Slaachas, Laopodis, & Kouretas, 2017). Keberadaan bank asing menurunkan ketergantungan pada bank lokal dan mengubah perilaku investasi perusahaan (Thoa & Uyen, 2017). Perlunya negara mengadopsi modal basel untuk mempertahankan kekhasan ekonomi, mekanisme pengaturan pendukung, dan kapasitas cadangan komparatif (Tahir, Adegbite, & Guney, 2017).



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsep Keuangan Mikro

Sebenarnya tidak ada definisi tunggal keuangan mikro (European Banking Federation, 2010). Ini sesuai dengan tipikal heterogen dan memiliki tujuan berbeda yang berbeda sesuai dengan konteks divergen di mana ia telah diterapkan. Federasi Perbankan Eropa menyatakan bahwa 'keuangan mikro dalam industri perbankan Eropa mengacu pada pinjaman kecil (kredit mikro atau pinjaman mikro) dan untuk pelanggan komersial kecil (entitas mikro)'. Ledgerwood (1999) menjelaskan secara singkat bahwa keuangan mikro mengacu pada 'penyediaan layanan keuangan untuk klien berpenghasilan rendah, termasuk wiraswasta, pengusaha berpenghasilan rendah di daerah perkotaan dan pedesaan'.

Sementara itu, Karlan dan Nathanael Goldberg (2007) membedakan istilah keuangan mikro dengan kredit mikro sementara orang biasanya mengklaim persamaan di antara keduanya. Keuangan mikro dengan namanya jelas lebih dari sekedar kredit, jika tidak harus disebut sebagai kredit mikro. Keuangan mikro sebenarnya harus memiliki setidaknya sembilan fitur tradisional: 1) transaksi kecil dan saldo minimum (apakah pinjaman, tabungan atau asuransi); 2) pinjaman untuk kegiatan kewirausahaan; 3) pinjaman tanpa agunan; 4) pinjaman kelompok; 5) menargetkan klien miskin; 6) target klien perempuan; 7) proses aplikasi sederhana; 8) penyediaan layanan di komunitas yang kurang terlayani; dan 9) suku bunga tingkat pasar.

Sejalan dengan Karlan dan Nathanael Goldberg (2007), Ledgerwood (1999) telah menekankan bahwa keuangan mikro tidak hanya perbankan juga tetapi alat pengembangan. Akibatnya, sebagian besar kegiatan keuangan mikro mencakup beberapa karakteristik tertentu: 1) pinjaman kecil yang biasanya untuk modal kerja; 2) penilaian informal terhadap peminjam dan investasi; 3) pengganti agunan, seperti jaminan kelompok atau simpanan wajib; 4) akses untuk mengulang dan pinjaman yang lebih besar berdasarkan kinerja pembayaran kembali; 5) penyaluran pinjaman dan pemantauan yang ramping; dan 6) produk tabungan aman.

Lebih lanjut, Ledgerwood (1999) juga menjelaskan bahwa tujuan LKM sebagai organisasi pembangunan adalah 'untuk melayani kebutuhan keuangan pasar yang tidak terlayani atau kurang terlayani sebagai sarana untuk memenuhi tujuan pembangunan'. Tujuan pembangunan biasanya menggabungkan dengan satu atau lebih dari yang berikut: 1) untuk mengurangi kemiskinan; 2) untuk memberdayakan perempuan atau kelompok populasi yang kurang beruntung lainnya; 3) untuk menciptakan lapangan kerja; 4) untuk membantu bisnis



yang ada tumbuh atau melakukan diversifikasi kegiatan mereka; dan 5) untuk mendorong pengembangan bisnis baru.

Ledgerwood (1999) serta Cull et al., (2007) menyatakan bahwa keuangan mikro memiliki dua tujuan jangka panjang, yaitu jangkauan dan keberlanjutan. Outreach berarti melayani mereka yang secara konsisten tidak terlayani oleh lembaga keuangan seperti perempuan, masyarakat miskin, dan penduduk asli dan pedesaan, sedangkan keberlanjutan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya penyediaan layanan keuangan. Bergantung pada target pasar mana yang dipilih, ada posisi keuangan LKM berikutnya, karena biaya akan dibuat. LKM akibatnya menghadapi trade-off yang terlibat dalam keputusan tentang mencapai tujuan tersebut secara bersamaan.

## 2.2. Evolusi Keuangan Mikro

Ledgerwood (1999: 2-3) telah menyuarakan bahwa keuangan mikro telah terungkap pada tahun 1980-an sebagai reaksi terhadap skeptisisme dan vonis penelitian tentang distribusi negara dari kredit bersubsidi kepada petani miskin. Untuk menyediakan kredit pertanian bersubsidi, maka pemerintah dan donor internasional membentuk serikat kredit yang didorong oleh model Raiffeisen berkembang di Jerman pada tahun 1864 yang sebagian besar difokuskan pada mobilisasi tabungan di daerah pedesaan dalam upaya untuk “mengajarkan petani miskin cara menabung”.

Pada awal pertengahan 1980-an, bagaimanapun, model kredit bersubsidi yang didukung oleh banyak donor mendapat banyak kecaman karena sebagian besar program mengakumulasi gagal bayar pinjaman besar dan mensyaratkan rekapitalisasi reguler untuk tetap beroperasi. Pada saat yang sama, oleh karena itu, organisasi non-pemerintah lokal (LSM) dan bank berinisiatif untuk mencari metode jangka panjang daripada pendekatan penghasil pendapatan yang tidak berkelanjutan untuk pembangunan masyarakat seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa di Indonesia; jalan dengan skema pinjaman kelompok percontohan untuk orang-orang tanpa lahan di Asia yang dipelopori oleh Dr. Mohammed Yunus dan dihasilkan menjadi Garmen Bank hari ini; pengembangan pinjaman kelompok solidaritas untuk vendor perkotaan di Amerika Latin didukung oleh ACCION International; dan sistem kredit dan pelatihan yang makmur untuk pengusaha mikro perorangan yang dikembangkan oleh Fundacion Carvajal.

Bidang keuangan mikro telah meluas sejak 1980-an. Ini karena para donor tanpa lelah mendukung dan memperkuat kegiatan keuangan mikro yang berkonsentrasi pada LKM yang bersemangat untuk memperoleh jangkauan substansial dan kesinambungan keuangan.

Konsekuensinya, LKM saat ini terfokus pada penyediaan layanan keuangan saja sedangkan tahun 1970-an dan banyak tahun 1980-an dibedakan oleh paket kredit dan pelatihan terpadu. Saat ini, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) (1999) serta Cokro dan Abdul Ghafar (2006) juga menegaskan bahwa LSM-LSM keuangan mikro termasuk *Fundacion para la Promocion y Desarrollo de la Microempresa (PRODEM)* di *Banco Solidario (BancoSol)* Bolivia, Kenya Program Kewirausahaan Pedesaan (K-Rep) di Kenya; dan ADEMI / *BancoADEMI* di Republik Dominika telah diubah menjadi lembaga keuangan formal yang mengeluarkan layanan tabungan kepada klien mereka dan untuk mengakses sumber pendanaan pasar daripada mempercayai dana donor.

### 2.3. Teori Siklus Hidup Keuangan Mikro

Bogan (2009) mengacu pada de Sousa-Shields (2004) yang mengklaim bahwa dengan berfokus pada sumber pendanaan, teori siklus hidup dapat muncul untuk menganalisis perkembangan LKM. Hal ini karena menurut kerangka ini, sebagian besar LKM memulai sebagai LSM dengan visi sosial, pendanaan operasi dengan hibah dan pinjaman lunak dari donor dan lembaga keuangan internasional yang secara efektif berfungsi sebagai sumber utama modal risiko untuk sektor keuangan mikro. Oleh karena itu, sebagian besar literatur tentang keuangan mikro cenderung mencurahkan proses "transformasi LSM" sebagai model siklus hidup yang menguraikan evolusi LKM. Dalam tahap pembentukan LKM, hibah donor dan "pinjaman lunak" mengambil sebagian besar pendanaan. Ketika LKM matang, modal utang swasta menjadi tersedia tetapi struktur utang memiliki perjanjian dan / atau jaminan yang mengikat. Pada tahap terakhir evolusi LKM, pembiayaan ekuitas tradisional menjadi tersedia.

### 2.4. Kerangka Sistem dan Model Keuangan Mikro

Karena keuangan mikro memerlukan campuran "bisnis" dan "pembangunan", Ledgerwood (1999) telah mengkategorikan kerangka kerja sistem keuangan mikro menjadi empat klasifikasi layanan yang luas. Mereka adalah intermediasi keuangan (menyediakan produk dan jasa keuangan), intermediasi sosial (membangun modal manusia dan sosial yang terlibat dengan intermediasi keuangan yang berkelanjutan untuk orang miskin), layanan pengembangan usaha (mempercepat wirausahawan mikro melalui layanan non finansial), dan layanan sosial (meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui layanan non finansial).

Intensitas di mana LKM menyediakan masing-masing layanan tersebut bergantung pada apakah ia memperoleh pendekatan "minimalis" atau "terintegrasi". LKM akan minimalis ketika mengedepankan dalam intermediasi keuangan soliter atau terintegrasi saat menawarkan

intermediasi keuangan dan layanan lainnya. LKM yang memilih proposisi minimalis namun kadang-kadang mengusulkan layanan intermediasi sosial yang terbatas. Di sisi lain, LKM yang memilih pendekatan terintegrasi menanggapi pandangan klien yang lebih holistik. Akibatnya, LKM yang mengambil metode terintegrasi harus memperhatikan masalah-masalah khusus tersebut. Pertama, menyediakan layanan keuangan dan nonfinansial adalah dua tindakan kontras yang biasanya mendorong lembaga untuk terlibat dalam tujuan yang saling bertentangan. Kedua, klien biasanya bingung karena mereka tidak dapat membedakan "layanan sosial" yang biasanya gratis dan "layanan keuangan" yang harus dibayar terutama ketika mereka menerima kedua layanan dari organisasi yang sama. Ketiga, LKM umumnya menawarkan banyak layanan yang menciptakan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan biaya per layanan; dan keempat, layanan non finansial biasanya tidak berkelanjutan secara finansial.

### BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat efisiensi kinerja LKM di Indonesia; dan
2. Mengestimasi dampak perubahan faktor internal dan eksternal terhadap skor efisiensi LKM di Indonesia.

#### 3.2. Manfaat Penelitian

Setelah ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini diselesaikan, maka hasil penelitian akan disampaikan dalam forum paparan hasil yang melibatkan pengambil kebijakan (OJK serta Dinas Koperasi dan UMKM) dan perwakilan LKM (BPR, BPRS, dan Koperasi). Dengan adanya paparan hasil diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti terhadap pihak-pihak terkait guna peningkatan performa (efisiensi dan efektifitas) LKM dalam mendorong UMKM di Indonesia. Bagi LKM, hasil skor efisiensi dapat digunakan untuk evaluasi strategi pengelolaan keuangan. Sedangkan bagi pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai *policy based research* terutama untuk meningkatkan performa LKM yang masih belum efisien dan meningkatkan peran LKM dalam mencapai peran utamanya yaitu meningkatkan UMKM sebagai mitra utama.





## BAB 4. METODE PENELITIAN

### 4.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan masing-masing BPR dan BPRS di seluruh Indonesia selama lima tahun terakhir di mulai dari tahun 2013 hingga 2017 yang telah tersedia di laman Otoritas Jasa Keuangan. BPR dan BPRS yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap lima tahun terakhir tidak dipergunakan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan data yang dihimpun oleh OJK, hingga 2017 ada sebanyak 167 BPRS dan 1.619 BPR yang tersebar di Indonesia. Setelah dikategorikan sesuai dengan ketentuan sampel maka diperoleh 1.308 BPR dan 114 BPRS untuk dijadikan sampel penelitian.

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan jumlah sampel BPR terbanyak. Banyaknya BPR di Kabupaten Sidoarjo keseluruhan adalah 55 unit, namun yang memiliki laporan keuangan lengkap sejak tahun 2013 hingga 2017 hanya 50 unit. Pada Kabupaten Badung, Bali jumlah BPR keseluruhan sebanyak 51 unit namun hanya 49 yang memenuhi kriteria sampel. Jika di kabupaten dan kota di Pulau Jawa memiliki banyak BPR yang memenuhi kriteria sampel, hal ini berbanding terbalik dengan BPR di luar Pulau Jawa terutama di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Indonesia bagian tengah dan timur lainnya. Banyak yang hanya memiliki satu hingga dua BPR saja yang telah berdiri lebih dari lima tahun.

**Tabel 4.1. Jumlah Sampel BPR dari Masing-masing Kabupaten/ Kota**

Kab./ Kota	Jumlah Sampel
Kab Sidoarjo	50
Kab Badung	49
Kota Bekasi	36
Kab Malang	28
Kab Gianyar, Kab Depok	26
Kota Bandung	25
Kab Cirebon , Kab Tengerang	24
Kab Semarang , Kab Jember	23
Kab Bandung,, Kota Semarang , Kab Bekasi	22
Kab Bogor	21
Kab Sleman	20
Kab Tabanan	19
Kota Denpasar , Kab Kediri , Kota Tangerang, Kab Pasuruan	18
Kab Sukoharjo	16
Kab Klaten, Kab Deli	15
Kab Karanganyar, Kab Karawang, Kab Pekan Baru	14
Kota Bandar Lampung	13
Kab Gresik , Kota Solo, Kab Banyuwangi, Kab Magelang	12
Kab Kendal, Kota Palembang, Kota Jambi, Kab Mojokerto, Kab Jombang, Kab Tegal	11
Kab Lombok Barat, Kab Pati	10

Kab./ Kota	Jumlah Sampel
Kab Tulungagung , Kab Indramayu, Kota Surabaya , Kab Bantul, Kota Jakarta Pusat	9
Kab Lamongan Subang , Kab Agam , Kab Banyumas , Kota Malang , Kota Tangerang Selatan , Kab Demak , Kota Batu	8
Kab Temanggung , Kab Madiun , Kab Cilacap , Kab Kudus , Kab Boyolali , Kab Buleleng Tasikmalaya , Kota Bogor	7
Kab Sragen , Kab Blitar Cianjur , Kab Ponorogo , Kota Kupang Bandung Barat	6
Kota Cirebon , Kab Brebes , Kota Makasar , Kab Banjar , Kota Tasikmalaya Ciamis , Kota Magelang , Kab Kebumen , Kota Manado , Kab Wonosobo , Kab Lumajang , Kab Klungkung , Kab Bondowoso , Kab Blora	5
Kab Karangasem , Kota Jayapura , Kab Bojonegoro , Kab Pasaman , Kota Madiun , Kab Grobogan , Kab Mataram , Kab Pemalang , Kota Cimahi , Kab Simalungun , Kota Kediri , Kab Situbondo , Kab Su, Kabumi , Kota Pekalongan	4
Kab Nganjuk Garut , Kab Tapin , Kab Toba , Kab Bima , Kab Lampung Timur , Kab Lampung Tengah , Kota Salatiga , Kab Kuningan , Kab Lombok Timur , Kab Sumbawa , Kab Wonogiri , Kab Probolinggo , Kab Bangli , Kab Magetan , Kab Jepara , Kab Gorontalo , Kab Gunung Kidul , Kab Kulon Progo , Kab Trenggalek Sumedang , Kab Tuban , Kota Tegal , Kab Kendari , Kota Aceh Besar	3
Kab Palu , Kota Probolinggo , Kab Belu , Kab Minahasa , Kota Su, Kabumi , Kab Kolaka Purwakarta , Kota Bau-Bau , Kota Pangkal Pinang , Kab Konawe , Kab Limapuluh , Kota Blitar , Kab Pandeglang Jakarta Selatan , Kota Ternate , Kab Purbalingga , Kab Serdang Bedagai , Kab Muaro Jambi , Kab Parigi Moutog , Kab Purworejo , Kab Batang , Kab Tabalong , Kab Kampar , Kab Rembang , Kab Bengkulu , Kab Pelawan , Kab Lombok Tengah , Kab Tapanuli Selatan , Kab Pacitan , Kab Lampung Selatan , Kota Banda Aceh , Kab Serang Majalengka Jakarta Barat , Kab Asahan , Kab Bangkalan , Kab Ogan Komering Ulu Timur , Kab Ogan Ilir	2
Kab Rokan Hulu , Kab Mandailing Natal , Kota Mojokerto , Kab Tapanuli Utara , Kab Bengkulu Utara , Kab Hulu Sungai Selatan , Kab Sarolangun , Kab Kuantan Singingi , Kota Pasuruan , Kab Hulu Sungai Utara , Kab Kepahlang , Kab Humbang Hasannudin , Kab Tanah Laut , Kab Indragiri , Kota Lubukinggau , Kab Pamekasan , Kab Luwu Utara , Kab Tulang Bawang , Kota Palopo , Kab Labuhan Batu , Kota Prabumulih , Kab Wakatobi , Kab Manokwari , Kab Pangkajene Kepulauan , Kab Kerinci , Kab Jayapura , Kab Takalar , Kab Paringin , Kab Tanjung Jabung Timur , Kota Ambon , Kota Lhokseumawe , Kab Binjai , Kab Samosir , Kab Jembrana , Kab Selayar Jakarta Timur , Kab Flores Timur , Kab Pekalongan , Kab Boloan , Kab Lampung Utara , Kab Bombana , Kab Langkat , Kab Gowa , Kab Lebak , Kab Maluku Tenggara , Kab Pematang Siantar , Kab Manggarai , Kab Polewali Mandar , Kota Sorong , Kab Cilegon , Kab Sumba Timur , Kab Dairi , Kab Sumbawa Barat , Kab Banyuasin , Kab Biak Numfor , Kota Gorontalo , Kab Tana Toraja Jakarta Utara , Kab Bangka , Kab Rejang Lebong , Kab Ngawi , Kab Dompu , Kab Ogan Komering Ulu	1

Sampel BPR paling banyak berasal dari Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang mayoritas berada di Pulau Jawa dan perekonomian berkembang pesat. Kondisi jumlah sampel BPRS berbeda dengan BPR. Jumlah paling besar setiap kabupaten atau kotanya maksimal 5 yang memenuhi kriteria sampel. Namun demikian, jumlah sampel terbanyak masih ada di sekitar Pulau Jawa. Pada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sleman hingga 2017 ada 5 (lima) BPRS yang ternyata semuanya sudah berusia minimal lima tahun dan laporan keuangannya lengkap sehingga semuanya dinyatakan layak untuk dijadikan sampel penelitian.

Dari 167 BPRS yang dijadikan sampel penelitian, mayoritas berasal dari kabupaten atau kota yang memiliki masing-masing satu BPRS yang sesuai. Hanya beberapa kabupaten dan kota yang memiliki BPRS yang sesuai di atas dua. Besarnya wilayah tidak mempengaruhi

jumlah BPRS sampel. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kota Surabaya hanya memiliki satu BPRS yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian.

**Tabel 4.2. Jumlah Sampel BPRS dari Masing-masing Kabupaten/ Kota**

Kab./Kota	Jumlah Sampel
Kab Bandung , Kab Sleman	5
Kab Serang	4
Kota Semarang , Kota Pasuruan , Kota Bekasi , Kab Bantul , Kab Kampar , Kab Banyumas , Kota Solo , Kab Bekasi , Kota Depok , Kab Bogor , Kab Cilacap , Kota Sidoarjo	3
Kota Mataram , Kab Gresik , Kota Bandung , Kota Bandar Lampung , Kota Makassar , Kab Kediri , Kota Tangerang , Kota Yogyakarta , Kab Agam	2
Kota Mojokerto , Kota Cilegon , Kab Kudus , Kab Lampung Utara , Kota Lamongan , Kab Lombok Timur , Kota Ponorogo , Kab Magetan , Kab Lampung Tengah , Kab Malang , Kab Jombang , Kab Pasaman Barat , Kota Malang , Kab Pati , Kab Bengkulu , Kab Penajam Paser Utara , Kab Klaten , Kab Purbalingga , Kota Sumenep , Kab Semarang , Kab Lampung Timur Jakarta Selatan , Kota Cimahi , Kab Gowa , Kota Kediri , Kab Bangka , Kab Cianjur , Kab Sukoharjo , Kab Kebumen , Kab Sumedang , Kota Pamekasan , Kab Takalar , Kota Pekanbaru , Kab Tanah Datar , Kab Kendal , Kab Tanggamus , Kota Situbondo , Kab Way Kanan , Kota Solok , Kab Banyuasin , Kota Surabaya , Kab Grobogan , Kota Tasikmalaya , Kota Batu , Kab Jember , Kab Sragen	1

## 4.2. Metode Penelitian

### 4.2.1. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi LKM yang diwakili oleh BPR, BPRS, maupun KSP/USP Konvensional dan Syariah dilakukan dengan pendekatan non parametrik *Data Envelopment Analysis (DEA)* dan *Malmquist Index*. Fokus pengukuran efisiensi pada penelitian ini adalah pada kontribusi *technical change*, *efficiency change*, *pure changes* dan *changes in the scale of Total Factor Productivity (TFP)*. Output oriented digunakan karena kondisi analisis bukan berorientasi pada input. Selain itu, akan digunakan pada pengukuran dinamis yang memaksakan *output oriented*. Selanjutnya, model keluaran DEA CCR (Charnes, Cooper, dan Rhodes) dan BBC (Banker, Charnes, dan Cooper) dengan *Variable Return to Scale (VRS)* digunakan untuk mengukur efisiensi LKM di Indonesia. Secara umum, bentuk dual dari model CCR adalah sebagai berikut:

$$\min_{\lambda} z_0 = \Theta_0$$

Subject to :

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0} \quad r = 1, 2, \dots, s$$

$$\Theta_0 x_{i0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \geq 0, \quad r = 1, 2, \dots, m$$

$$\lambda_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Sedangkan model BBC adalah sebagai berikut:

$$\min_{\lambda} z_0 = \Theta_0$$

Subject to :

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0} \quad r = 1, 2, \dots, s$$

$$\Theta_0 x_{i0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \geq 0, \quad r = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$$

$$\lambda_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Terdapat dua metode dalam pemilihan variabel input dan output yaitu dengan pendekatan produksi dan intermediasi (Syamni dan Majid, 2016). Pada pendekatan produksi, input LKM merupakan segala biaya operasional yang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam aset. Output pada pendekatan ini berupa pinjaman dan deposito atau dana pihak ketiga (DPK). Jika deposito atau DPK digunakan sebagai output, maka input hanya mencakup biaya operasional saja dan tidak meliputi bunga yang dibayarkan untuk deposito atau DPK. Pada pendekatan intermediasi, LKM dilihat dari perannya sebagai penghubung antara penabung/deposan dengan investor. Output diukur dalam nilai uang, sementara total biaya meliputi biaya operasi dan beban bunga.

Penelitian ini akan mengukur tingkat efisiensi BPR/ BPRS dan KSP/ USP konvensional maupun syariah dengan pendekatan produksi dan intermediasi. Variabel input dan output yang digunakan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 10. Input dan Output Pengukuran Efisiensi**

Instansi	Input	Output
<b><i>Pendekatan Produksi</i></b>		
BPR/ BPRS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban bunga/ margin/ bagi hasil DPK</li> <li>2. Beban bunga/ margin/ bagi hasil dana pinjaman bank</li> <li>3. Gaji pegawai</li> <li>4. Biaya pengembangan karyawan</li> <li>5. Beban lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan bunga/ margin/ bagi hasil dari pinjaman yang disalurkan</li> <li>2. Penerimaan lainnya</li> </ol>
KSP/ USP Konvensional dan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban bunga/ margin/ bagi hasil pinjaman anggota</li> <li>2. Beban bunga/ margin/ bagi hasil dana pinjaman bank</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan bunga/ margin/ bagi hasil dari pinjaman yang disalurkan</li> <li>2. Penerimaan lainnya</li> </ol>



Instansi	Input	Output
	3. Beban bunga/ margin/ bagi hasil dana pinjaman koperasi lainnya 4. Beban bunga/ margin/ bagi hasil dana pinjaman sumber lain yang sah 5. Gaji pegawai 6. Biaya pengembangan karyawan 7. Biaya organisasi 8. Beban lainnya	
<b>Pendekatan Intermediasi</b>		
BPR/ BPRS	1. Modal 2. Tabungan 3. Deposito 4. Pinjaman Bank 5. Jumlah karyawan	Pinjaman yang disalurkan
KSP/ USP Konvensional dan Syariah	1. Simpanan pokok 2. Simpanan wajib 3. Dana cadangan 4. Donasi atau hibah 5. Pinjaman/ simpanan dari anggota 6. Pinjaman/ <i>linkage</i> dari koperasi lainnya 7. Pinjaman/ <i>linkage</i> dari bank atau lembaga keuangan lainnya 8. Pinjaman/ <i>linkage</i> dari sumber lain yang sah 9. Jumlah pengelola	Pinjaman yang disalurkan

Pada pendekatan produksi, penentuan variabel input dan output didasarkan pada fungsi produksi Cobb Douglas. Hajkova dan Hurnik (2007) mengemukakan bahwa persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut:

$$Y_i = A_i \cdot K_i^\alpha \cdot L_i^\beta \dots\dots\dots (1)$$

dimana Y, A, K, dan L adalah pendapatan, tingkat *total factor productivity* (TFP), input modal, dan input tenaga kerja. Dengan demikian, variabel output pada pendekatan ini berupa pendapatan yang diterima LKM. Sedangkan variabel input meliputi segala kemungkinan biaya yang muncul dari permodalan dan tenaga kerja (Vujcic dan Jemric, 2001).

Pada pendekatan intermediasi, variabel input dan output ditentukan untuk mengukur efisiensi LKM dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan demikian, variabel output yang digunakan hanya meliputi pinjaman yang disalurkan. Hal ini dikarenakan aktivitas utama BPR/ BPRS dan KSP/ USP konvensional maupun syariah adalah penyaluran dana ke nasabah/ anggota dan tingkat keberhasilannya dapat diukur melalui total penerimaan termasuk pendapatan bunga/margin/bagi hasil (Tesfamariam, Tesfay, dan Tesfay, 2013 dan Ochola, 2016). Sedangkan variabel input meliputi semua sumber dana yang digunakan untuk penyaluran dana termasuk modal dan hutang.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, modal koperasi terdiri dari modal sendiri/ *equity capital* dan modal pinjaman/ *debt capital* (Republik Indonesia, 1992, dan

Wasiaturrahma dan Ajija, 2016). Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi atau hibah. Sedangkan modal pinjaman meliputi pinjaman dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Dengan demikian, variabel input berupa modal akan dijabarkan menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau hibah, pinjaman/ simpanan dari anggota, pinjaman/ *linkage* dari koperasi lainnya, pinjaman/ *linkage* dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dan pinjaman/ *linkage* dari sumber lain yang sah.

#### 4.2.2. Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi

Setelah diketahui skor efisiensi baik melalui pendekatan produksi maupun intermediasi, maka akan diestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi skor efisiensi tersebut. Seperti halnya Nouaili, Abaoub, dan Ochi (2015), identifikasi determinan skor efisiensi pada penelitian ini juga dilihat dari kemungkinan faktor internal maupun eksternal.

**Tabel 11. Determinan Skor Efisiensi**

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
X <sub>1</sub>	Skala usaha yang diukur dari logaritma total aset	X <sub>10</sub>	Inflasi (pertumbuhan Indeks Harga Konsumen/ IHK)
X <sub>2</sub>	Tingkat kapitalisasi yang diukur dari rasio modal per total aset ( <i>capital adequacy ratio/ CAR</i> )	X <sub>11</sub>	Pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB)
X <sub>3</sub>	Struktur kepemilikan (milik pemerintah atau swasta)		
X <sub>4</sub>	<i>Market share</i> (rasio total pendapatan bank dibanding total pendapatan industri bank)		
X <sub>5</sub>	<i>Market concentration</i>		
X <sub>6</sub>	<i>Non performing loan/ NPL</i>		
X <sub>7</sub>	Usia (lama berdiri)		
X <sub>8</sub>	Jumlah kantor (kantor cabang dan kantor pusat)		
X <sub>9</sub>	Letak kantor (desa atau kota)		

Performa keuangan bank dipengaruhi oleh skala usaha, CAR, struktur kepemilikan, pangsa pasar, konsentrasi pasar, dan NPL. Bank yang memiliki skala usaha yang tinggi cenderung dapat menekan biaya produksinya karena sudah mencapai skala ekonomi yang tinggi (Short, 1979; Smirlock, 1985; Bikker dan Hu, 2002; Pasiouras, dkk, 2007; dan Guillen, dkk, 2014). Sebuah bank yang bagus adalah yang bisa menjaga CAR pada level tinggi karena hal tersebut dapat menekan tingkat kebangkrutan sebuah bank (Pasiouras dan Kosmidon, 2007 dan Liu, dkk, 2010). Pada umumnya, sebuah bank milik swasta akan lebih berdaya dibanding milik pemerintah (Nouaili, Abaoub, dan Ochi, 2015). Hal ini dikarenakan bank milik

pemerintah seringkali menanggung pinjaman yang lebih berisiko yaitu nasabah dengan risiko gagal bayar tinggi dan tidak memiliki kualitas aset yang bagus (Innota, dkk, 2007 dan Cornet, dkk, 2010). Sebuah bank yang memiliki pangsa pasar lemah biasanya cenderung memiliki performa yang kurang baik (Liu dan Wilson, 2010). Selain itu, semakin tinggi NPL sebuah bank biasanya berpengaruh negatif terhadap performanya (Georgievska, dkk 2011).

Kondisi makro ekonomi sangat mempengaruhi performa keuangan suatu bank (Chirwa dan Mlachia, 2004; Beck dan Hesse, 2006; Flamini, McDonald, dan Schumacher, 2009; Nouaili, Abaoub, dan Ochi, 2015). Pertumbuhan ekonomi seringkali berpengaruh positif terhadap performa bank (Flamini, McDonald, dan Schumacher, 2009). Tingkat inflasi yang terantisipasi ternyata memiliki pengaruh positif terhadap performa bank (Bourke, 1989; dan Molyneux dan Thornton, 1992). Lokasi juga sangat menentukan keberhasilan efisiensi LKM (Ferdousi, 2013). Usia LKM dan jumlah kantor dinilai berpengaruh positif terhadap efisiensi LKM (Akram, dkk, 2016).

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi skor efisiensi akan dilakukan dengan menggunakan metode panel Tobit. Menurut Matyas dan Sevestre (2008:393-399), basic model dari panel Tobit adalah sebagai berikut:

$$y_{it}^* = x_{it}\beta + y_{i,t-1}^*\lambda + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (2)$$

dimana y, x, i, t adalah variabel dependen, variabel independen, cross section ke-i, dan time series ke-t. Dengan demikian, model pane Tobit dalam penelitian ini adalah:

$$TE1_{it}^* = \alpha_1 x_{1it} + \alpha_2 x_{2it} + \alpha_3 x_{3it} + \alpha_4 x_{4it} + \alpha_5 x_{5it} + \alpha_6 x_{6it} + \alpha_7 x_{7it} + \alpha_8 x_{8it} + \alpha_9 x_{9it} + \alpha_{10} x_{10it} + \alpha_{11} x_{11it} + \lambda TE1_{i,t-1}^* + \varepsilon_{it} \dots (3)$$

$$SE1_{it}^* = \alpha_1 x_{1it} + \alpha_2 x_{2it} + \alpha_3 x_{3it} + \alpha_4 x_{4it} + \alpha_5 x_{5it} + \alpha_6 x_{6it} + \alpha_7 x_{7it} + \alpha_8 x_{8it} + \alpha_9 x_{9it} + \alpha_{10} x_{10it} + \alpha_{11} x_{11it} + \lambda SE1_{i,t-1}^* + \varepsilon_{it} \dots (4)$$

$$TE2_{it}^* = \alpha_1 x_{1it} + \alpha_2 x_{2it} + \alpha_3 x_{3it} + \alpha_4 x_{4it} + \alpha_5 x_{5it} + \alpha_6 x_{6it} + \alpha_7 x_{7it} + \alpha_8 x_{8it} + \alpha_9 x_{9it} + \alpha_{10} x_{10it} + \alpha_{11} x_{11it} + \lambda TE2_{i,t-1}^* + \varepsilon_{it} \dots (5)$$

$$SE2_{it}^* = \alpha_1 x_{1it} + \alpha_2 x_{2it} + \alpha_3 x_{3it} + \alpha_4 x_{4it} + \alpha_5 x_{5it} + \alpha_6 x_{6it} + \alpha_7 x_{7it} + \alpha_8 x_{8it} + \alpha_9 x_{9it} + \alpha_{10} x_{10it} + \alpha_{11} x_{11it} + \lambda SE2_{i,t-1}^* + \varepsilon_{it} \dots (6)$$

dimana TE1, SE1, TE2, dan SE2 adalah *Technical Efficiency* pendekatan produksi, *Scale Efficiency* pendekatan produksi, *Technical Efficiency* pendekatan intermediasi, dan *Scale Efficiency* pendekatan intermediasi.

## BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

### 5.1. Hasil

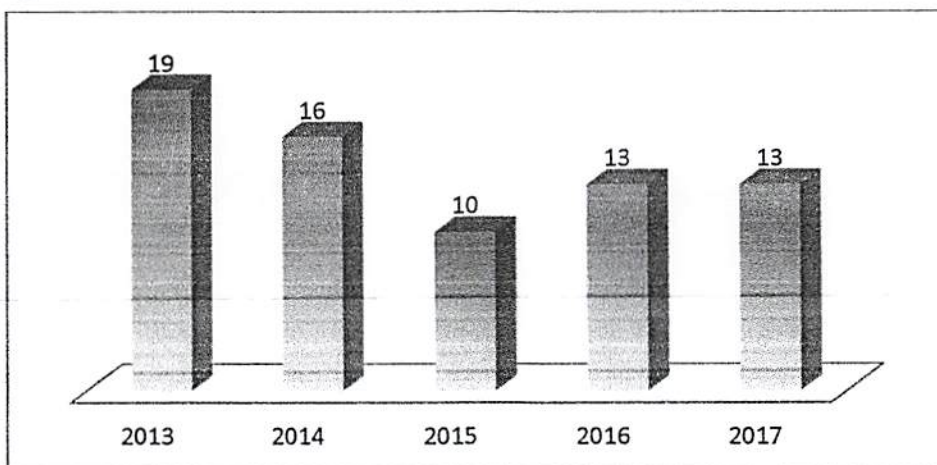
Penelitian ini menganalisis tingkat efisiensi pada masing-masing BPR dan BPRS di seluruh Indonesia dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan periode lima tahun dimulai tahun 2013 hingga 2017. Sedikit gambaran umum terkait tingkat efisiensi yang ada di BPR dan BPRS yaitu banyak BPRS yang memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dari BPR bahkan ada yang tidak mencapai 1% (satu persen).

#### 5.1.1. Pendekatan Intermediasi

Pendekatan intermediasi dalam penelitian menggunakan output pinjaman yang disalurkan, sedangkan variabel input terdiri dari modal, kewajiban yang segera dapat dibayar, tabungan, deposito, pinjaman bank, dan total aset.

##### 5.1.1.1. BPRS

Sebanyak 114 BPRS yang dijadikan sampel penelitian setelah diseleksi sesuai dengan kriteria sampel yang digunakan. Secara keseluruhan, dengan pendekatan intermedia jumlah BPRS dengan tingkat efisiensi sama dengan 1 (satu) lebih sedikit dibandingkan dengan pendekatan produksi. Tren jumlah BPRS efisien yang muncul tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami penurunan. Di tahun berikutnya meningkat dan stagnan.



Gambar 5.1. Jumlah BPRS yang Efisien

Pada tahun 2013, terdapat sejumlah 19 BPRS yang memiliki tingkat efisiensi sama dengan 1 atau 100%, yaitu BPRS Ikhsanul Amal Kab. Kebumen, BPRS Asad Alif Kab. Kendal, BPRS Mitra Agro Usaha Kota Bandar Lampung, BPRS Rahma Syariah Kab. Kediri, BPRS Bhakti Haji Kab. Malang, BPRS Unawi Barokah Kab Sidoarjo, BPRS Cahaya Hidup Kab. Sleman, BPRS Dana Agung Syariah Kab. Sleman, BPRS Mitra Cahaya Indonesia Kab. Sleman, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, BPRS Harta Insan Karimah Kota Makassar, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Daarut Tauhiid Kota Cimahi, BPRS Bina Amwalul Hasanah Kota Depok, BPRS Attaqwa Kab. Serang, BPRS Mulia Berkah Abadi Kab. Serang, dan BPRS Musawarah Ummat Indonesia Kota Tangerang.

Pada tahun 2014, jumlah BPRS yang beroperasi dengan efisien sebanyak 16 BPRS. Lebih sedikit dibandingkan tahun 2013. Ke-enam belas BPRS tersebut, yaitu BPRS Asad Alif Kab. Kendal, BPRS Rajasa Kab. Lampung Tengah, BPRS Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Attaqwa Kab. Serang, BPRS Muamalah Cilegon Kab. Serang, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Ibadurrahman Kab. Penajam Paset Utara, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, BPRS Daarut Tauhid Kota Cimahi, BPRS Al Hijrah Amanah Kota Depok, BPRS Bina Amwalul Hasanah Kota Depok, BPRS Investama Mega Baki Kota Makassar, BPRS Unawi Barokah Kab. Sidoarjo, BPRS Situbondo Kab Situbondo, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia Kota Tangerang.

Tahun 2015 jumlah BPRS menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2013 ada sebanyak 19, tahun 2014 sebanyak 16, maka di tahun 2015 turun menjadi hanya 10 BPRS saja yang beroperasi efisien. Sisanya hanya cukup efisien hingga sangat tidak efisien. Kesepuluh BPRS tersebut yaitu BPRS Asad Alif Kab. Kendal, BPR Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Ibadurrahman Kab. Penajam Paser Utara, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, BPRS Harta Insan Karimah Bekasi Kota Bekasi, BPRS Daarut Tauhid Kota Cimahi, BPRS Bina Amwalul Hasanah Kota Depok, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia Kota Tangerang.

Tahun berikutnya jumlah BPRS efisien meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016 terdapat sebanyak 13 BPRS efisien. BPRS-BPRS tersebut yaitu BPRS Adas Alif Kab. Kendal, BPRS Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kab. Bantul, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, BPRS Daarut Tauhiid Kota Cimahi, BPRS Bina Amwalul Hasanah Kota Depok, BPRS Harta Insan Karimah Kota Makassar, BPRS Investama Mega Bhakti Kota Makassar, BPRS Unawi

Barokah Kab. Sidoarjo, BPRS Situbondo Kab. Situbondo, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia Kota Tangerang.

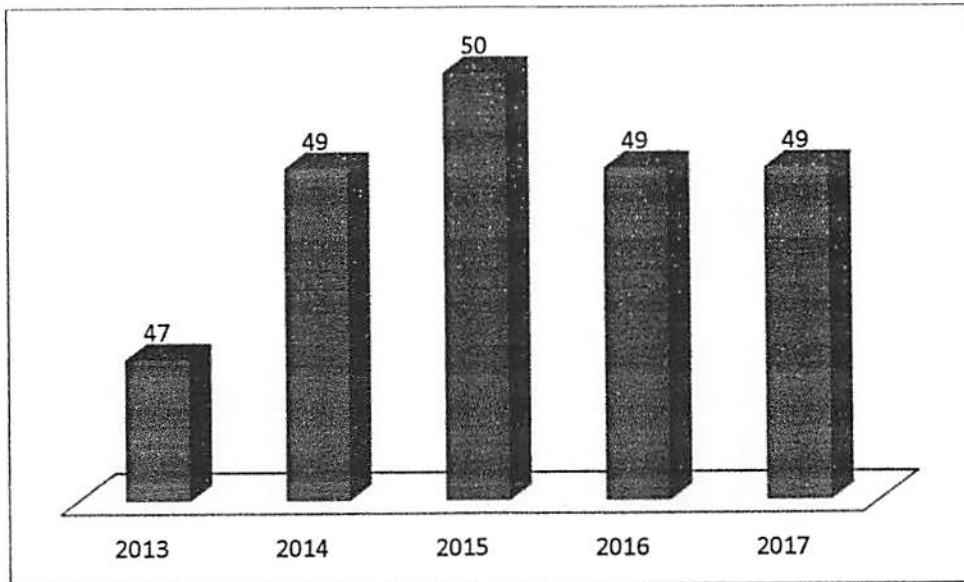
Tahun 2017 jumlah BPRS efisien tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni sebanyak 13. BPRS tersebut yaitu BPRS Mentari Pasaman Saiyo Kab. Pasaman Barat, BPRS Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Syariah Magetan Kab. Magetan, BPRS Bhakti Haji Kab. Malang, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, BPRS Daarut Tauhiid Kota Cimahi, BPRS Al Barokah Kota Depok, BPRS Investama Mega Bakti Kota Makassar, BPRS Unawi Barokah Kab. Sidoarjo, BPRS Situbondo Kab. Situbondo, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia Kota Tangerang.

**Tabel 5.1. BPRS Efisien Selama Lima Tahun**

BPRS	Kab./Kota	Nilai Efisiensi				
		2013	2014	2015	2016	2017
BPRS Al Ihsan	Kab. Bandung	1	1	1	1	1
BPRS Artha Fisabilillah	Kab. Cianjur	1	1	1	1	1
BPRS Gowata	Kab. Gowa	1	1	1	1	1
BPRS Surya Sejati	Kab. Takalar	1	1	1	1	1
BPRS Daarut Rauhiid	Kota Cimahi	1	1	1	1	1
BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	Kota Tangerang	1	1	1	1	1

Selama lima tahun, 2013 – 2017, terdapat enam BPRS yang selalu beroperasi secara efisien. Lima tahun berturut-turut berkinerja dengan sangat efisien, artinya pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan sebanding dengan modal, kewajiban, tabungan, deposito, pinjaman bank, dan total aset yang diperoleh. BPRS tersebut adalah BPRS Al Ihsan, BPRS Artha Fisabilillah, BPRS Gowata, BPRS Surya Sejati, BPRS Daarut Tauhiid, dan BPRS Musyarakah Ummah Indonesia.

Kondisi lainnya yaitu BPRS yang beroperasi dengan cukup efisien hingga sangat tidak efisien. Dikategorika bagi BPRS dengan *technical efficiency* kurang dari 0,5 atau 50% maka dinyatakan sangat tidak efisien, sementara untuk tingkat efisiensi lebih dari sama dengan 0,5 hingga kurang dari 1 dinyatakan cukup efisien.



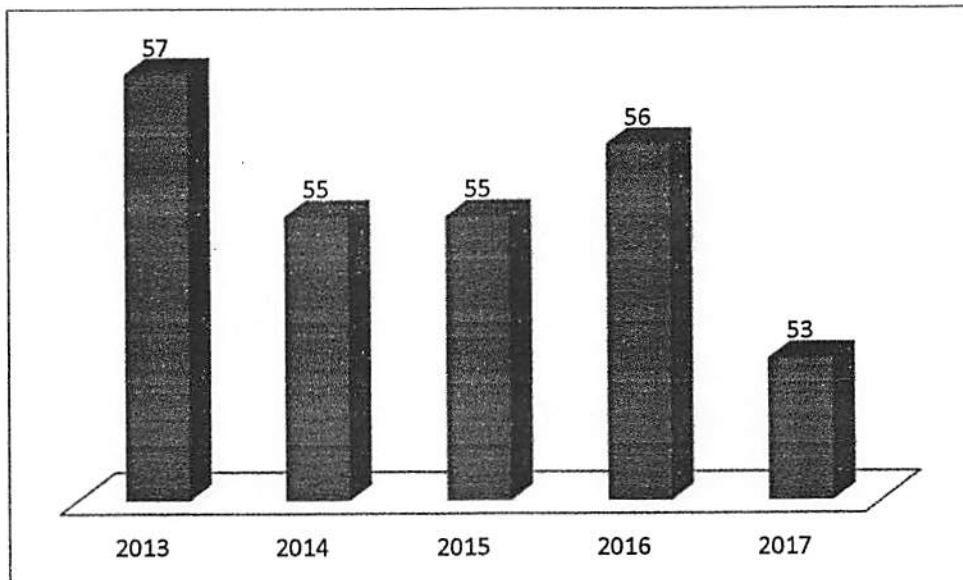
**Gambar 5.2. Jumlah BPRS dengan *Technical Efficiency* Kurang dari 0,5**

Sejauh ini, jumlah BPRS yang memiliki skor efisiensi kurang dari 0,5 atau 50% paling banyak ada di tahun 2015. Selama tahun 2013 hingga 2015 jumlah BPRS yang efisien menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah BPRS yang tidak efisien. Terdapat BPRS yang memiliki tingkat efisiensi yang tidak lebih besar dari 10% atau 0,01. Meskipun BPRS tersebut telah beroperasi minimal lima tahun, namun justru selama lima tahun tersebut tingkat efisiensinya tidak lebih dari 10%. BPRS tersebut adalah BPRS Arta Leksana yang berada di Kab. Banyumas. Selama lima tahun berturut-turut tingkat efisiensi berdasarkan pendekatan intermediasi hanya sebesar 0,009 atau hanya sebesar 9%.

Rata-rata BPRS di Indonesia beroperasi tidak efisien. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor efisiensi dari hasil perhitungan menunjukkan angka 55%-58% selama lima tahun. Dari seluruh BPRS sampel, ditemukan paling banyak 59 BPRS yang memiliki skor efisiensi yang ada di bawah rata-rata efisiensi di tahun tersebut.

Tahun 2013 rata-rata nilai efisiensi sebesar 58,48% atau 0,5848. Dari seluruh sampel BPRS yang digunakan terdapat 57 BPRS dengan skor efisiensi lebih kecil dari rata-rata. Di tahun 2014 nilai rata-rata efisiensi sebesar 57% atau 0,5700, mengalami penurunan rata-rata dibandingkan tahun 2013. Di tahun ini terdapat 55 BPRS di bawah rata-rata efisiensi BPRS nasional. Tahun 2015 nilai rata-rata efisiensi turun menjadi 0,5516 atau 55,16%. Dari rata-rata ini didapatkan sebanyak 55 BPRS yang ada di bawah rata-rata efisien. Tahun 2016 rata-rata efisiensi meningkat dibandingkan tahun 2015 dan jumlah BPRS yang berada di bawah rata-

rata pun meningkat. Sebanyak 56 BPRS tidak memiliki nilai efisiensi yang lebih besar dari nilai efisiensi rata-rata. Tahun 2017 menjadi tahun yang memiliki jumlah BPRS di bawah rata-rata paling sedikit. Meskipun nilai rata-rata meningkat menjadi 0,5691 atau 56,91% namun jumlah BPRS yang ada di bawah rata-rata menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak BPRS yang memiliki nilai efisiensi yang lebih besar dari rata-rata.



**Gambar 5.3. Jumlah BPRS dengan Skor Efisiensi di Bawah Efisiensi Rata-Rata**

Setelah dilakukan pengukuran tingkat efisiensi pada masing-masing BPRS, selanjutnya adalah membagi BPRS-BPRS tersebut berdasarkan rata-rata aset yang dimiliki. ketika BPRS tersebut memiliki jumlah aset di bawah rata-rata aset maka dikategorikan ke dalam sampel bawah, dan jika di atas rata-rata maka masuk ke dalam kategori sampel atas.

Ada sebanyak 26 BPRS yang masuk dalam kategori sampel atas dengan nilai *technical efficiency* (TE) terbesar 1 dan terendah 0,167. Artinya sebanyak 27% BPRS di Indonesia yang memiliki aset di atas rata-rata BPRS lainnya pada tahun 2013 hingga 2017 tidak semuanya beroperasi secara efisien jika dilihat dari pendekatan intermediasi.

Pada tahun 2013, hanya ada tujuh BPRS sampel atas yang efisien sempurna dengan skor sama dengan 1. Sedangkan ada tujuh BPRS sampel atas memiliki tingkat efisiensi kurang dari 50%. Dari seluruh BPRS sampel atas, hanya BPR Harta Insan Karimah Kota Tangerang yang secara kontinyu efisien dalam waktu lima tahun. Di tahun ini, nilai efisiensi terendah ada di BPRS Bangka Kab. Bangka. Dari seluruh sampel atas tahun 2013, rata-rata nilai efisiensi



sebesar 0,6669 atau 66,69%. Sebanyak 11 BPRS memiliki nilai efisiensi lebih kecil dari nilai rata-rata, yakni BPRS Suriyah, BPRS Buana Mitra Perwira, BPRS Sukowati Sragen, BPRS Insan Madani, BPRS Bangka, BPRS Dinar Ashri, BPRS Amanah Sejahtera, BPRS Lantabur Tebuireng, BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Margirizki Bahagia, dan BPRS Barokah Dana Sejahtera.

Tahun 2014 tidak seburuk 2013, di mana nilai efisiensi terendah sebesar 0,554 dan nilai rata-rata efisiensi sebesar 0,9020. Dibandingkan tahun 2012, performa BPRS sampel atas cukup baik. Terdapat 12 BPRS beroperasi efisien dengan nilai efisiensi sebesar 1. Sementara terdapat 8 BPRS sampel atas dengan nilai efisiensi di bawah rata-rata, yaitu BPRS Buana Mitra Perwira, BPRS Sukowati Sragen, BPRS Insan Madani, BPRS Lantabur Tebuireng, BPRS Bhakti Makmur Indah, BPRS Bakti Sumekar, dan BPRS Bangun Drajat Warga.

Efisiensi BPRS sampel atas meningkat di tahun 2015. Nilai minimal efisiensi pada BPRS sampel bawah adalah 0,688 yang dimiliki oleh tiga BPRS, yaitu BPRS Suriyah Kab. Cilacap, BPRS Buana Mitra Perwira Kab. Purbalingga, dan BPRS Sukowati Sragen Kab. Sragen. Ada sejumlah delapan BPRS sampel atas dengan nilai efisiensi sama dengan satu, seperti di BPRS Amanah Sejahtera Kab. Gresik, BPRS Margarizki Bahagia Kab. Bantul, BPRS Barokah Dana Sejahtera Kab. Yogyakarta, BPRS Amanah Insani Kab. Bekasi, BPRS Harta Insan Karimah Kota Bekasi, BPRS Cilegon Mandiri Kota Cilegon, dan BPRS Harta Indan Karimah Kota Tangerang.

Tingkat efisiensi pada sampel atas di tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016, nilai efisiensi paling kecil sebesar 0,865 dan tahun 2017 sebesar 0,808. Bertahannya nilai efisiensi di angka 0,8 di dua tahun terakhir menunjukkan bahwa BPRS sampel telah berusaha untuk beroperasi secara efisien. Tahun 2016, BPRS sampel atas yang benar-benar efisien sebanyak 11 BPRS, sedangkan di tahun 2017 sebanyak 12 BPRS.

**Tabel 5.2. Sampel Atas BPRS Tahun 2013-2017**

No	Kab./Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	KAB CILACAP- BPRS SURIYAH	0,366	1	0,688	0,865	0,808
2	KAB PURBALINGGA-BPRS BUANA MITRA PERWIRA	0,25	0,753	0,688	1	1
3	KAB SRAGEN-BPRS SUKOWATI SRAGEN	0,209	0,576	0,688	1	0,986
4	KAB SUKOHARJO-BPRS INSAN MADANI	0,179	0,554	0,75	1	0,961
5	KAB BANGKA- BPRS BANGKA	0,167	1	0,75	0,9	0,944

No	Kab./Kota	2013	2014	2015	2016	2017
6	KAB LAMPUNG UTARA-BPRS KOTABUMI	1	1	0,75	0,864	0,937
7	KAB AGAM-BPRS AMPEK AMPEK CANDUNG	0,705	1	0,75	0,899	1
8	KOTA MATARAM - BPRS DINAR ASHRI	0,566	1	0,75	1	0,999
9	KABUPATEN GRESIK/BPRS AMANAH SEJAHTERAH	0,473	1	1	0,94	1
10	KABUPATEN JOMBANG/BPRS LANTABUR TEBUIRENG	0,352	0,815	0,98	0,914	0,999
11	KOTA SIDOARJO/BPRS BHAKTI MAKMUR INDAH	0,704	0,763	0,943	0,883	0,998
12	KOTA SUMENEP/BPRS BAKTI SUMEKAR	0,704	0,727	0,919	0,874	1
13	KABUPATEN BANTUL/BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	0,5	0,727	0,92	1	1
14	KABUPATEN BANTUL/BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA	0,5	0,727	1	0,997	1
15	KOTA YOGYAKARTA/BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERAH	0,5	1	1	0,997	0,981
16	Kab. Bekasi-BPRS Amanah Insani	1	0,953	1	0,933	0,962
17	Kab. Bekasi-BPRS Artha Madani	1	1	0,999	0,941	1
18	Kab. Bekasi-BPRS Harta Insan Karimah Cibitung	1	0,953	0,999	1	0,999
19	Kab. Bogor-BPRS Amanah Ummah	1	0,925	1	1	0,998
20	Kab. Bandung - BPRS Al Ma'soem Syari'ah	1	1	0,981	0,996	0,998
21	Kab. Bandung - BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	0,833	1	0,981	0,985	0,999
22	Kota Bandung - BPRS Baiturridha Pusaka	0,833	0,993	0,963	0,985	1
23	Kota Bekasi - BPRS Artha Karimah Irsyadi	0,833	0,993	0,963	1	1
24	Kota Bekasi - BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	0,833	0,993	1	1	1
25	Kota Cilegon - BPRS Cilegon Mandiri	0,833	1	1	1	1
26	Kota Tangerang - BPRS Harta Insan Karimah	1	1	1	1	1

Setelah menganalisa BPRS sampel atas, selanjutnya adalah BPRS sampel bawah. Artinya telah diklasifikasikan BPRS dengan nilai aset di bawah nilai aset rata-rata. Terdapat sebanyak 88 BPRS atau 77,19% dari seluruh BPRS terkategori sebagai sampel bawah selama lima periode 2013 hingga 2017. Dari 88 BPRS tersebut, terdapat sekitar 42 hingga 45 BPRS yang memiliki nilai efisiensi di bawah rata-rata nilai efisiensi BPRS sampel bawah.

**Tabel 5.3. Jumlah BPRS Sampel Bawah dengan Nilai Efisiensi di Bawah Rata-Rata**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata Sampel Bawah	0,6001	0,5810	0,5596	0,5713	0,5805
Jumlah BPRS Sampel Bawah di Bawah Rata-Rata	44	43	45	44	42

Nilai rata-rata efisiensi BPRS sampel bawah berfluktuasi meskipun tidak terlalu banyak. Tahun 2013, rata-rata nilai efisiensi BPRS sampel bawah adalah 0,6001 dan terdapat 44 BPRS di bawah rata-rata. Tahun 2014 rata-rata menurun menjadi 0,5810 dan terdapat 43 BPRS di bawah rata-rata. Rata-rata kembali turun di tahun 2015 menjadi 0,5596 namun BPRS di bawah rata-rata meningkat menjadi 45. Berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun 2016 nilai rata-rata meningkat menjadi 0,5713 dan jumlah BPRS menurun menjadi 44. Begitu juga di tahun 2017, nilai rata-rata naik ke 0,5805 dan BPRS turun menjadi 42 unit.

**Tabel 5.4. Sampel Atas BPRS Tahun 2013-2017**

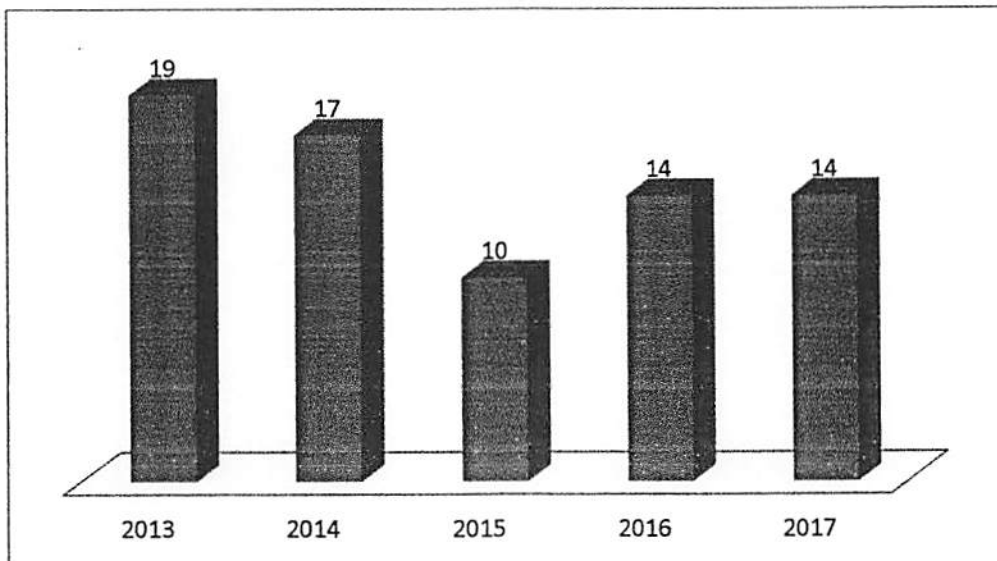
No	BPRS Sampel Bawah	2013	2014	2015	2016	2017
1	KAB BANYUMAS-BPRS ARTA LEKSANA	0,012	0,012	0,012	0,011	0,012
2	KAB BANYUMAS-BPRS BINA AMANAH SATRIA	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
3	KAB BANYUMAS- BPRS KHASANAH UMMAT	0,038	0,039	0,04	0,039	0,037
4	KAB CILACAP-BPRS BUMI ARTHA SAMPANG	0,046	0,046	0,046	0,046	0,047
5	KAB CILACAP-BPRS GUNUNG SLAMET	0,061	0,061	0,058	0,057	0,057
6	KAB GROBOGAN-BPRS GALA MITRA ABADI	0,068	0,073	0,07	0,071	0,07
7	KAB KEBUMEN-BPRS IKHSANUL AMAL	1	0,092	0,094	0,095	0,088
8	KAB KENDAL-BPRS ASAD ALIF	1	1	1	1	0,107
9	KAB KLATEN-BPRS AL MABRUR	0,115	0,116	0,116	0,116	0,118
10	KAB KUDUS-BPRS SAKA DANA MULIA	0,16	0,146	0,122	0,12	0,12
11	KAB PATI-BPRS ARTHA MAS ABADI	0,152	0,139	0,137	0,14	0,141
12	KAB SEMARANG-BPRS ARTHA AMANAH UMMAT	0,191	0,156	0,155	0,155	0,158
13	KOTA SEMARANG-BPRS ARTHA SURYA BAROKAH	0,161	0,163	0,148	0,148	0,148
14	KOTA SEMARANG-BPRS MITRA HARMONI KOTA SEMARANG	0,159	0,163	0,159	0,159	0,159
15	KOTA SEMARANG-BPRS PNM BINAMA	0,182	0,175	0,178	0,17	0,17
16	KOTA SOLO-BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA	0,182	0,192	0,182	0,182	0,182

No	BPRS Sampel Bawah	2013	2014	2015	2016	2017
17	KOTA SOLO-BPRS DANA AMANAH	0,195	0,205	0,202	0,207	0,209
18	KOTA SOLO-BPRS DANA MULIA	0,218	0,206	0,21	0,216	0,215
19	KAB BADUNG - BPRS SYARIAT FAJAR SEJAHTERA BALI	0,23	0,262	0,237	0,281	0,256
20	KAB BENGKULU-BPRS MUAMALAT HARKAT	0,229	0,232	0,227	0,227	0,227
21	KAB LAMPUNG TENGAH-BPRS RAJASA	0,279	1	0,267	0,274	0,243
22	KAB LAMPUNG TIMUR-BPRS LAMPUNG TIMUR	0,294	0,316	0,301	0,327	0,295
23	KAB TANGGAMUS-BPRS TANGGAMUS	0,273	0,313	0,297	0,31	0,31
24	KAB WAY KANAN-BPRS WAY KANAN	0,311	0,31	0,292	0,314	0,304
25	KOTA BANDAR LAMPUNG-BPRS BANDAR LAMPUNG	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284
26	KOTA BANDAR LAMPUNG-BPRS MITRA AGRO USAHA	1	0,351	0,304	0,297	0,295
27	KAB KAMPAR-BPRS BERKAH DANA FADHILAH	0,307	0,357	0,348	0,357	0,358
28	KOTA PEKANBARU-BPRS HASANAH	0,359	0,349	0,355	0,363	0,368
29	KAB AGAM-BPRS CARANA KIAMAT ANDALAS	0,337	0,336	0,33	0,332	0,335
30	KAB PASAMAN BARAT-BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO	0,395	0,4	0,41	0,42	1
31	KAB TANAH DATAR-BPRS HAJI MISKIN	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352
32	KOTA SOLOK-BPRS BARAKAH NAWAITUL IKHLAS	0,41	0,416	0,425	0,433	0,451
33	KAB BANYUASIN-BPRS AL FALAH	0,411	0,414	0,417	0,4	0,406
34	KAB LOMBOK TIMUR- BPRSTULEN AMANAH	0,391	0,386	0,386	0,386	0,392
35	KOTA MATARAM - BPRS PATUH BERAMAL	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398
36	KABUPATEN GRESIK/BPRS MANDIRI MITRA SUKSES	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409
37	KABUPATEN JEMBER/BPRS ASRI MADANI NUSNTARA	0,469	0,467	0,421	0,421	0,42
38	KABUPATEN KEDIRI/BPRS ARTHA PAMENANG	0,437	0,443	0,432	0,432	0,452
39	KABUPATEN KEDIRI/BPRS RAHMA SYARIAH	1	0,486	0,484	0,52	0,615
40	KABUPATEN MAGETAN/BPRS SYARIAH MAGETAN	0,517	0,573	0,491	0,606	1
41	KABUPATEN MALANG/BPRS BHAKTI HAJI	1	0,597	0,589	0,61	1
42	KOTA BATU/BPRS BUMI RINJANI BATU	0,483	0,504	0,549	0,485	0,515
43	KOTA KEDIRI/BPRS TANMIYA ARTHA	0,561	0,584	0,532	0,553	0,572
44	KOTA MALANG/BPRS MITRA HRMONI	0,62	0,581	0,557	0,659	0,638
45	KOTA MOJOKERTO/BPRS KOTA MOJOKERTO	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511
46	KOTA LAMONGAN/BPRS KOTA MADINAH	0,589	0,592	0,595	0,549	0,569

No	BPRS Sampel Bawah	2013	2014	2015	2016	2017
47	KOTA PAMEKASAN/BPRS SARANA PRIMA MANDIRI	0,54	0,548	0,557	0,534	0,677
48	KOTA PASURUAN/BPRS DAYA ARTHA MENTARI	0,589	0,66	0,638	0,669	0,681
49	KOTA PASURUAN/BPRS JABAL TSUR	0,563	0,557	0,557	0,557	0,557
50	KOTA PASURUAN/BPRS UMMU	0,613	0,726	0,703	0,72	0,744
51	KOTA PONOROGO/BPRS ALMABRUL BABADAN	0,595	0,6	0,626	0,632	0,634
52	KOTA SIDOARJO/BPRS ANISA MUKTI	0,625	0,675	0,64	0,604	0,651
53	KOTA SIDOARJO/BPRS UNAWI BAROKAH	1	1	0,774	1	1
54	KOTA SITUBONDO/BPRS SITUBONDO	0,966	1	0,764	1	1
55	KOTA SURABAYA/BPRS JABAL NUR	0,628	0,625	0,625	0,625	0,625
56	KABUPATEN BANTUL/BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERAH	0,636	0,636	0,708	1	0,636
57	KABUPATEN SLEMAN/BPRS CAHAYA HIDUP	1	0,737	0,696	0,648	0,681
58	KABUPATEN SLEMAN/BPRS DANA AGUNG SYARIAH	1	0,785	0,69	0,664	0,673
59	KABUPATEN SLEMAN/BPRS FORMES	0,715	0,722	0,695	0,67	0,67
60	KABUPATEN SLEMAN/BPRS MITRA AMAL USAHA	0,682	0,682	0,682	0,682	0,823
61	KABUPATEN SLEMAN/BPRS MITRA CAHAYA INDONESIA	1	0,793	0,746	0,715	0,733
62	KOTA YOGYAKARTA/BPRS HARMONI YOGYAKARTA	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705
63	JAKARTA SELATAN /BPRS CEMPAKA AL-AMIN	0,724	0,735	0,747	0,747	0,756
64	KABUPATEN KAMPAR/BPRS BERKAH DANA FADHILAH	0,727	0,846	0,825	0,846	0,862
65	KABUPATEN KAMPAR/BPRS HASANAH	0,832	0,81	0,823	0,843	0,873
66	KABUPATEN GOWA/BPRS GOWATA	1	1	1	1	1
67	KABUPATEN TAKALAR/BPRS SURYA SEJATI	1	1	1	1	1
68	KOTA MAKASSAR/BPRS INVESTAMA MEGA BAKTI	0,982	1	0,933	1	1
69	KOTA MAKASSAR/BPRS HARTA INSAN KARIMAH	1	0,882	0,948	1	1
70	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA/BPRS IBADURRAHMAN	0,954	1	1	1	0,988
71	Kab. Bogor-BPRS Bina Rahmah	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807
72	Kab. Bogor-BPRS Insan Cita Artha Jaya	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818
73	Kab. Cianjur-BPRS Artha Fisabilillah	1	1	1	1	1
74	Kab. Bandung-BPRS Al Ihsan	1	1	1	1	1
75	Kab. Bandung - BPRS Amanah Rabbaniah	0,862	0,875	0,888	0,852	0,852
76	Kab. Sumedang - BPRS Al Wadi'ah	0,941	0,949	0,957	0,957	0,969
77	Kota Bandung - BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung	0,875	0,911	0,875	0,875	0,969
78	Kota Tasikmalaya - BPRS AL Madinah Tasikmalaya	0,886	0,978	0,927	0,954	0,97

No	BPRS Sampel Bawah	2013	2014	2015	2016	2017
79	Kota Cimahi - BPRS Daarut Rauhiid	1	1	1	1	1
80	Kota Depok - BPRS Bina Amwalul Hasanah	1	1	1	1	0,909
81	Kota Depok - BPRS Al Barokah	0,92	0,92	0,92	0,92	1
82	Kota Depok - BPRS Al Hijrah Amanah	0,932	1	0,942	0,932	0,955
83	Kota Bekasi - BPRS Patriot Bekasi	0,943	0,943	0,943	0,943	0,943
84	Kab. Serang - BPRS Muamalah Cilegon	0,955	1	0,956	0,955	0,955
85	Kab. Serang - BPRS Attaqwa	1	1	1	0,967	0,966
86	Kab. Serang - BPRS Berkah Ramadhan	0,977	0,977	0,977	0,977	0,977
87	Kab. Serang - BPRS Mulia Berkah Abadi	1	1	0,997	0,989	0,989
88	Kota Tangerang - BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	1	1	1	1	1

Jumlah BPRS sampel yang memiliki nilai efisiensi sama dengan satu hanya sekitar 11% hingga 22% dari seluruh jumlah BPRS sampel bawah. Paling banyak ada di tahun 2013 dengan sejumlah 19 BPRS sampel bawah dinyatakan efisien. Kondisi turun menurun hingga di tahun 2015 menjadi 10 BPRS. Di tahun-tahun berikutnya, 2016 dan 2017, jumlah BPRS meningkat dan dalam posisi stagnan di angka 14.



**Gambar 5.4. Jumlah BPRS yang Efisien di Sampel Bawah**

Jika dibandingkan dengan kondisi BPRS pada sampel atas, maka persentase BPRS efisien pada sampel bawah jauh lebih sedikit. BPRS sampel atas, paling sedikit ada 27% dari seluruh BPRS sampel atas yang efisien, sedangkan di sampel bawah hanya 11%. Kondisi ini mungkin dapat diindikasikan bahwa dengan sedikitnya jumlah aset yang dimiliki memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi sebuah lembaga keuangan tersebut.

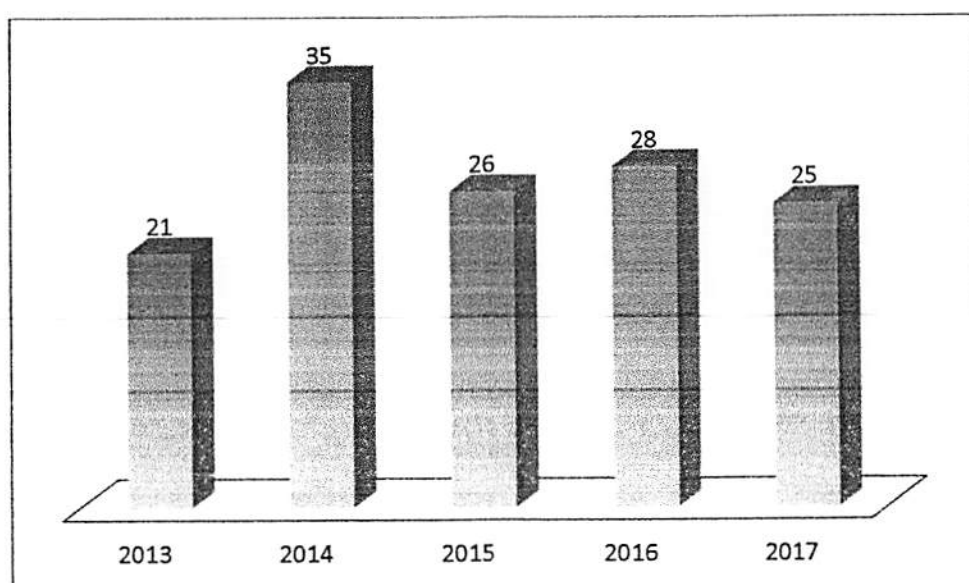
Terdapat beberapa BPRS sampel bawah dengan nilai efisiensi di bawah 0,1 atau 10% selama lima tahun berturut-turut, seperti BPRS Arta Leksana Kab. Banyumas, BPRS Bina Amanah Satria Kab. Banyumas, BPRS Khasanah Ummat Kab. Banyumas, BPRS Bumi Artha Sampang Kab. Cilacap, BPRS Gunung Slamet Kab. Cilacap, dan BPRS Gala Mitra Abadi Kab. Grobogan. Ada pula BPRS yang awalnya efisien, dengan nilai efisiensi sama dengan satu, di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga di bawah angka 0,1, yaitu BPRS Ikhsanul Amal Kab. Kebumen.

**Tabel 5.5. Perbandingan Jumlah BPRS Efisien Sampel Atas dan Sampel Bawah**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah BPRS Sampel Atas Efisien	27%	46%	31%	42%	46%
Jumlah BPRS Sampel Bawah Efisien	22%	19%	11%	16%	16%

#### 5.1.1.2. BPR

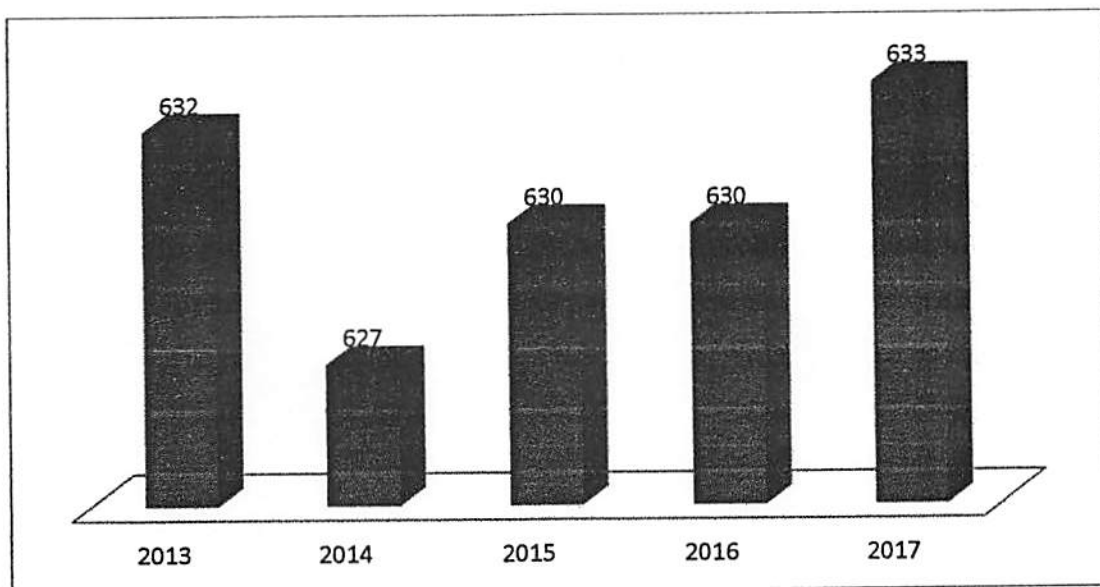
Jumlah BPR yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 1.308 dari 1.619 BPR di seluruh Indonesia atau sebesar 80,8% dari jumlah populasi. Setelah dilakukan uji efisiensi pada 1.308 BPR selama periode lima tahun dengan menggunakan pendekatan intermediasi, maka dihasilkan bahwa jumlah BPR yang efisien tidak mencapai angka 4% dari total keseluruhan jumlah BPR. Paling banyak dihasilkan di tahun 2014, dimana terdapat sebanyak 35 BPR yang efisien dari 1.308 BPR. Berdasarkan temuan ini, maka perlu dilakukan pembinaan kepada BPR agar dapat berjalan efisien.



**Tabel 5.5. Jumlah BPR yang Efisien**

Melihat sedikitnya BPR yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 atau yang benar-benar beroperasi secara efisien, maka dilakukan perhitungan jumlah BPR yang memiliki nilai efisiensi lebih besar dari 0,5 atau 50%. Dari tabel berikut dijelaskan bahwa selama lima tahun periode penelitian, jumlah BPR yang memiliki efisiensi lebih besar dari 50% hanya sekitar 48% dan tidak lebih dari 49%.

Jumlah BPR dengan nilai efisiensi kurang dari 50% pada tahun 2013 sebanyak 632 atau sebanyak 48,32% dari seluruh sampel. Di tahun 2014 turun menjadi 627 atau menjadi 47,94% dari keseluruhan sampel. Tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 630 atau 48,17% dan bertahan hingga akhir tahun 2016. Pada tahun 2017 bertambah tiga BPR menjadi 633 atau 48,39%.



**Gambar 5.5. Jumlah BPR dengan Skor Efisiensi Kurang dari 0,5**

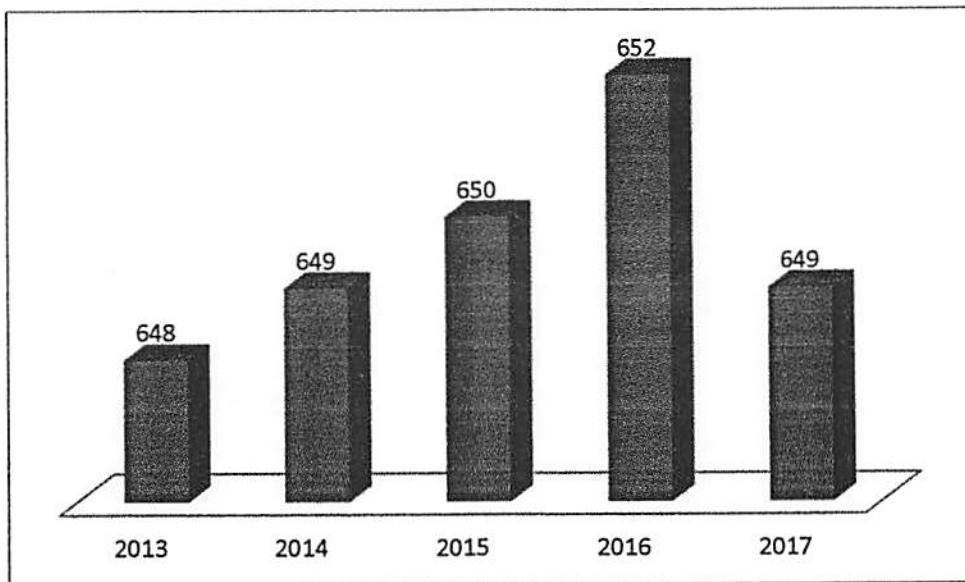
Setelah dilakukan perhitungan jumlah BPR yang memiliki nilai efisiensi di bawah 0,5, selanjutnya menghitung jumlah BPR yang memiliki nilai efisiensi di bawah rata-rata pada tahun yang tersebut. Rata-rata nilai efisiensi BPR setiap tahunnya memiliki angka yang hampir sama, berkisar di angka 0,51. Pada tahun 2013 rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,5127, di tahun 2014 sebesar 0,5157, tahun 2015 sebesar 0,5136, tahun 2016 sebesar 0,5151, dan di tahun 2017 sebesar 0,5136. Meskipun nilai rata-rata efisiensi hampir sama, namun jumlah BPR dengan nilai efisiensi di bawah rata-rata terus berubah meskipun dengan selisih yang tidak terlalu besar.



**Tabel 5.6. Nilai Rata-Rata Efisiensi BPR dan Jumlah BPR di Bawah Nilai Rata-Rata**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata Nilai Efisiensi BPR	0,5127	0,5157	0,5136	0,5151	0,5136
Jumlah BPR di Bawah Rata-rata	648	649	650	652	649

Tahun 2013 sebagai tahun dengan jumlah BPR dengan nilai efisiensi di bawah rata-rata paling sedikit dibandingkan empat tahun lainnya. Sebanyak 648 BPR dari 1.308 memiliki nilai efisiensi tidak lebih besar dari rata-rata. Tahun berikutnya, 2014, bertambah satu BPR menjadi 649. Tahun 2015 kembali bertambah satu BPR menjadi 650, dan puncaknya di tahun 2016 menjadi 652 BPR. Di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah sebanyak tiga BPR menjadi 649.

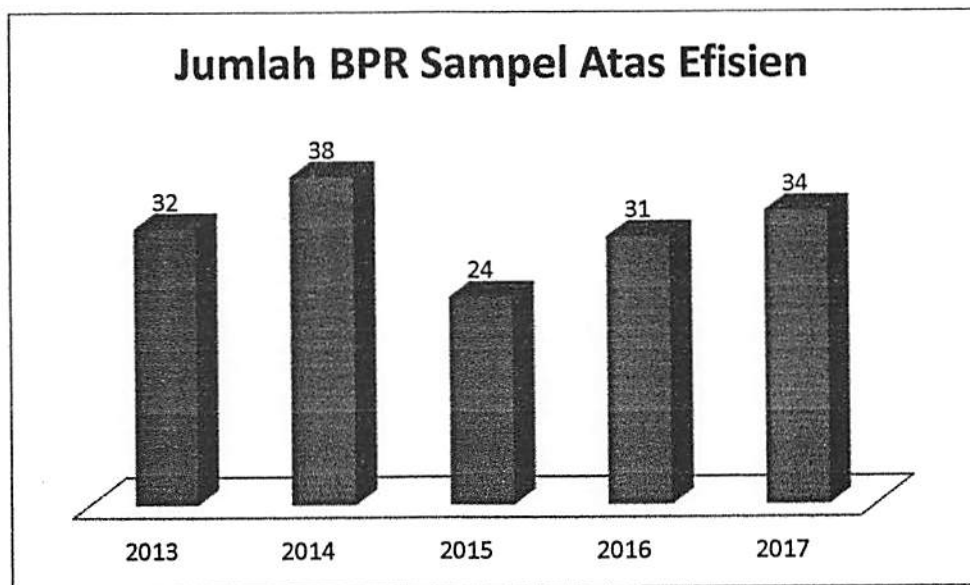
**Gambar 5.6. Jumlah BPR dengan Skor Efisiensi di Bawah Nilai Rata-Rata**

Setelah melihat kondisi BPR dari nilai efisiensi rata-rata BPR, selanjutnya adalah melihat kondisi efisiensi BPR berdasar nilai rata-rata aset yang dimiliki. BPR dengan nilai aset di atas rata-rata BPR sampel atas, sedangkan BPR dengan nilai aset lebih kecil dari rata-rata dinyatakan sebagai BPR sampel bawah.

Jumlah BPR sebagai sampel atas sebanyak 278 BPR dari 1.308 BPR atau sebesar 21,25% dinyatakan sebagai BPRS sampel atas. Di tahun 2013, ditemukan sebanyak 15 BPR yang memiliki nilai efisiensi kurang dari 0,1 atau 10% menjadi BPR sampel atas, yaitu BPR DP Taspen, BPR Kredit Mandiri Indonesia, BPR Olympindo Primadona, BPR Parasahabat

Bekasi, BPR Nusantara Bona Pasogit 2, BPR Sebaru Sejahtera Lestari, BPR Cianjur Jabar, BPR Babakan, BPR Intan Jabar, BPR Intidana Sukses Makmur, BPR Multi Sembada Dana, BPR Artharindo, BPR BKK Cilacap, BPR Gunung Slamet, dan BPR Karya Bhaktu Ughari.

Secara keseluruhan kondisi efisinesi BPR sampel atas cukup baik, meskipun mayoritas nilai efisinesi di dominasi oleh angka antara 0,5 hingga kurang dari 1. Jumlah BPR yang efisien dengan sempurna selama lima tahun terakhir sekitar 24 hingga 38. Tahun 2013 sebanyak 32, tahun berikutnya paling banyak dibandingkan tahun-tahun lainnya yakni sebanyak 38, tahun 2015 sebagai tahun terendah hanya ada 24 BPR, tahun 2016 naik menjadi 31, dan 2017 sedikit bertambah menjadi 34.



**Gambar 5.7. Jumlah BPR yang Efisien di Sampel Atas**

Kondisi di sampel atas tahun 2013 adalah adanya 32 BPR yang efisien. Dari ketiga puluh dua BPR tersebut mayoritas berada di Pulau Jawa. Sebanyak 84,37% dari 278 BPR sampel atas efisien berada di Pulau Jawa, sisanya ada di Pulau Bali dan Pulau Sumatera. Dari 278 BPR sampel atas tahun 2013, terdapat 172 BPR memiliki nilai efisiensi di atas 0,5 yang sebanyak 61,87% dari keseluruhan. Di tahun ini rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,5972 dan terdapat sebanyak 150 BPR berada di atas rata-rata. Artinya lebih dari separuh BPR sampel atas tahun 2013 memiliki nilai efisiensi di atas rata-rata.

Selanjutnya kondisi BPR sampel atas tahun 2014. Tahun ini merupakan tahun dengan jumlah BPR efisien sampel atas terbanyak di bandingkan tahun lainnya. Terdapat 38

dinyatakan efisien. Mayoritas merupakan BPR yang berada di Pulau Jawa. Sebanyak 30 BPR berada di Jawa dan sisanya ada di Lampung, NTT, Bali, Papua, dan Sulawesi Selatan. Nilai efisiensi meningkat dibandingkan tahun 2013 dibuktikan dengan tidak adanya BPR dengan nilai efisiensi di bawah 0,5. Artinya performa BPR sampel atas dikategorikan cukup baik meskipun masih diperlukan perbaikan dalam operasionalnya. Rata-rata nilai efisiensi sampel atas 2014 sebesar 0,8066. Lebih besar dari tahun 2013. Dari nilai rata-rata tersebut, diperoleh sebanyak 142 atau 51,08% BPR berada di atas nilai rata-rata.

Berikutnya merupakan tahun dengan jumlah BPR efisien paling sedikit dibanding tahun lainnya. Secara keseluruhan performa BPR sampel atas tahun 2015 membaik. Di tahun 2015 jumlah BPR sampel atas yang efisien hanya berjumlah 24 BPR yang terdiri dari 10 BPR di Jawa, dan sisanya di Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, dan Sumatera. Namun, ada banyak peningkatan di hal lainnya. Rata-rata nilai efisiensi meningkat dari sebelumnya di tahun 2014 sebesar 0,8055 naik menjadi 0,8521 di tahun 2015. Tidak ada satu BPR pun yang memiliki nilai efisiensi kurang dari 0,5 dan nilai paling rendah sebesar 0,673 sementara di tahun 2014 sebesar 0,523. Sebanyak 140 BPR atau separuh dari seluruh BPR sampel atas memiliki nilai efisiensi di atas nilai rata-rata sampel atas.

Dimulai tahun 2016, jumlah BPR sampel atas yang efisien terus meningkat hingga 2017. Sebanyak 31 BPR sampel atas dinyatakan efisien dengan nilai efisiensi sama dengan satu. Sementara untuk BPR dengan nilai efisiensi kurang dari 0,5 sebanyak 278 atau dapat dikatakan bahwa seluruh BPR sampel atas memiliki nilai efisiensi lebih besar dari 0,5. Nilai efisiensi rata-rata di tahun ini sebesar 0,8907 atau 0,0342 lebih tinggi dari tahun 2015. Jika dirunutkan berdasarkan rata-rata, maka sebanyak 138 BPR sampel atas memiliki efisinesi di atas rata-rata. Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa BPR sampel atas di tahun ini masih di dominasi oleh BPR yang berasal dari Pulau Jawa, sisanya berasal dari Bali, Jambi, dan Bandar Lampung.

Peningkatan jumlah BPR efisien pada sampel atas terus berlanjut di tahun 2017. Sebanyak 34 BPR sampel atas efisien. Seluruh BPR sampel atas di tahun ini memiliki nilai efisiensi lebih besar dari 0,5, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata efisiensi menunjukkan bahwa di tahun ini rata-rata efisiensi sebesar 0,9239 artinya adanya peningkatan angka efisiensi. Sebanyak 145 BPR atau 52,16% dari seluruh BPR sampel atas memiliki nilai efisiensi di atas nilai rata-rata.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi BPR sampel atas meskipun jumlah BPR yang efisien sempat mengalami penurunan dan terjadi perubahan jumlah yang tidak terlalu besar namun masih dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari rata-rata efisiensi yang terus meningkat setiap tahunnya dan mulai tahun kedua, 2014 hingga 2017, tidak ada satu pun BPR sampel atas yang memiliki nilai efisiensi di bawah 0,5. Dengan arti lain bahwa performa BPR sampel atas sudah cukup baik dengan diperlukan beberapa perbaikan yang dapat dilakukan dengan perhitungan selanjutnya.

Tabel 5.7. Skor Efisiensi BPR Sampel Atas 2013-2017

No.	BPR	TE Intermediasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bandung Barat-Arthaguna Mandiri	1	0,535	0,673	0,749	0,831
2	Bekasi-BPR DP Taspen	0,023	0,523	0,673	0,755	0,828
3	Bekasi-BPR Kredit Mandiri Indonesia	0,02	0,571	0,673	0,755	0,828
4	Bekasi-BPR Olympindo Primadona	0,019	0,561	0,673	0,755	1
5	Bekasi-BPR Parasahabat Bekasi	0,019	0,541	0,679	0,755	0,843
6	Bogor-Nusantara Bona Pasogit 2.	0,04	0,528	0,678	0,755	0,845
7	Bogor-Sebaru Sejahtera Lestasi	0,039	0,527	0,678	0,759	0,847
8	Cianjur-Cianjur Jabar	0,039	0,579	0,678	0,758	0,841
9	Cirebon-Babakan	0,039	0,566	0,678	0,758	0,844
10	Garut-Intan Jabar	0,039	0,56	0,684	0,758	0,848
11	Indramayu-Karya Remaja	0,123	0,533	0,683	0,758	0,847
12	Indramayu-Mitra Harmoni Indramayu	0,118	0,523	0,683	0,762	0,84
13	JAKARTA BARAT /INTIDANA SUKSES MAKMUR	0,078	0,529	0,683	0,762	0,833
14	JAKARTA BARAT /MULTI SEMBADA DANA	0,06	0,527	0,683	0,762	0,845
15	JAKARTA PUSAT /ARTHARINDO	0,059	0,527	0,693	0,762	0,843
16	JAKARTA PUSAT /BAHTERA MASYARAKAT	1	0,527	0,693	0,762	0,846
17	JAKARTA PUSAT /BANKSAR DANA LOKA	1	0,527	0,693	0,788	0,844
18	JAKARTA SELATAN /BINADANA SWADAYA	0,27	0,627	0,692	0,768	1
19	JAKARTA UTARA /OLYMPINDO	0,235	0,592	0,691	0,768	0,853
20	KAB BANGLI - BP KAB BANGLI	0,156	0,569	0,712	0,772	0,854
21	KAB BATANG BPR BKK BATANG	0,208	0,54	0,712	0,773	0,854
22	KAB BIMA - NTB BIMA	0,106	0,54	0,698	0,801	0,855
23	KAB CILACAP BPR BKK CILACAP	0,099	1	0,698	0,774	0,852
24	KAB CILACAP BPR GUNUNG SLAMET	0,097	1	0,698	0,774	0,82
25	KAB DELI SERDANG BPR KARYA BHAKTI UGAHARI	0,096	0,845	0,704	0,777	0,82
26	KAB DELI SERDANG BPR PIJER PODI KEKELENGEN	0,177	0,622	0,704	0,775	0,82
27	KAB DEMAK BPR BKK DEMAK	0,131	0,589	0,704	1	0,82
28	KAB DEMAK BPR MRANGGEN MITRAPERSADA	0,126	0,6	0,704	0,829	0,82
29	KAB GROBOGAN BKK PURWODADI	0,123	0,593	0,704	0,832	0,832
30	KAB GROBOGAN BPR WIROSARI IJO	0,12	0,587	0,711	0,826	0,824

No.	BPR	TE Intermediasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
31	KAB KARANGASEM - NUSAMBA MANGGIS	0,151	0,57	0,711	0,807	0,824
32	KAB KENDAL BPR BKK KENDAL	0,138	0,561	0,711	0,783	0,824
33	KAB KENDAL BPR KENDALI ARTHA	0,136	0,78	0,711	0,787	0,824
34	KAB KENDAL BPR NUSAMBA CEPIRING	0,137	0,725	0,711	0,788	0,827
35	KAB KENDAL BPR PASAR BOJA	0,139	0,716	0,715	0,786	0,827
36	KAB KLATEN-PT. BPR Shinta Bhakti Wedi	0,196	0,697	0,715	0,787	0,827
37	KAB KUDUS BPR BKK KUDUS	0,167	0,691	0,714	0,785	0,827
38	KAB LABUHAN BATU BPR MANGATUR GANDA	0,163	0,578	0,714	0,785	0,827
39	KAB LANGKAT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 13.	0,149	0,578	0,713	0,785	0,861
40	KAB LOMBOK BARAT-NTB LOMBOK BARAT	0,145	0,574	0,723	0,785	0,854
41	KAB LOMBOK TENGAH - NTB LOMBOK TENGAH	0,191	0,571	0,722	0,785	0,853
42	KAB LOMBOK TIMUR-NTB LOMBOK TIMUR	0,179	0,571	0,722	0,789	0,849
43	KAB LOMBOK TIMUR-SEGARA ANAK KENCANA	0,175	0,681	0,721	0,789	0,85
44	KAB MAGELANG BPR ARTHA MERTOYUDA	0,174	0,604	0,721	0,789	0,836
45	KAB MAGELANG BPR ARTHA SAMBHARA	0,174	0,589	0,745	0,789	0,835
46	KAB MAGELANG BPR BAPAS 69.	0,228	0,584	0,745	1	0,835
47	KAB MAGELANG BPR HIDUP ARTHA GRAHA	0,187	0,583	0,727	0,797	0,835
48	KAB MAGELANG BPR KEMBANG PARAMA	0,182	1	0,725	0,795	0,835
49	KAB MAGELANG BPR MUNTILAN	0,182	0,929	0,726	0,796	0,838
50	KAB MUARO JAMBI - PT. BPR Pondok Meja Indah	0,181	0,802	1	0,795	0,838
51	KAB PATI BPR ARTHA HUDA ABADI	0,198	0,786	0,882	0,794	0,838
52	KAB PATI BPR BANK DAERAH PATI	0,196	1	0,908	0,798	0,838
53	KAB PATI BPR BKK PATI	0,196	0,739	1	0,799	0,838
54	KAB PEKALONGAN BPR BKK KAB PEKALONGAN	0,196	0,664	1	0,798	1
55	KAB SUMBAWA - NTB SUMBAWA	0,196	0,646	1	0,798	0,884
56	KAB SUMBAWA - SAMAWA KENCANA	0,236	0,624	0,807	0,798	1
57	KAB TEGAL BPR BKK TEGAL	0,224	0,604	0,78	0,803	0,88
58	KAB TEGAL BPR NUSAMBA ADIWERNA	0,234	0,711	0,741	0,803	0,882
59	KAB WONOGIRI BPR BKK WONOGIRI	0,234	0,647	0,74	0,803	1
60	KAB. BADUNG - ADIARHTA UDIANA	0,23	0,633	0,747	0,803	1
61	KAB. BADUNG - BALI ARTHA ANUGRAH	0,232	0,614	0,748	0,803	0,893
62	KAB. BADUNG - GISAWA	0,233	0,613	0,752	0,868	0,893
63	KAB. BADUNG - JAYA KERTI	0,25	0,628	0,747	0,839	0,889
64	KAB. BADUNG - KITA SENTRADANA	0,256	0,664	0,747	0,817	1
65	KAB. BADUNG - MAHA BHOGA MARGA	0,257	0,8	0,752	0,816	1
66	KAB. BADUNG - MAMBAL	1	0,666	0,752	0,817	0,894
67	KAB. BADUNG - NUSAMBA MENGWI	0,967	0,629	0,752	0,823	0,883
68	KAB. BADUNG - PARASARI	1	0,628	0,752	0,822	0,862
69	Kab. Bandung-Gunadhana Mitrasembada	1	0,626	0,752	0,82	0,864
70	Kab. Bandung-Kerta Raharja	0,943	0,625	0,76	0,819	0,857

No.	BPR	TE Intermediasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
71	Kab. Bandung-Mitra Kanaka Santosa	0,299	0,625	0,76	0,814	0,853
72	KAB. BANYUMAS-PD. BPR BKK Purwokerto	0,295	0,625	0,76	0,823	0,853
73	KAB. BANYUMAS-PT. BPR Artha Mekar Sokaraja	0,295	0,745	0,76	0,821	0,853
74	KAB. BANYUMAS-PT. BPR Gunung Simping Artha	0,299	0,893	0,76	0,896	1
75	Kab. Banyuwangi - Delta Artha Panggung Banyuwangi	0,322	0,678	1	0,82	0,882
76	Kab. Banyuwangi - Nusamba Genteng	1	0,645	1	0,818	0,883
77	Kab. Blitar - Nusamba Wlingi	0,75	0,643	0,795	0,882	0,879
78	KAB. BLORA-PT. BPR Dutabhakti Insani	0,307	0,643	0,784	0,827	0,882
79	Kab. Bojonegoro - Bank Daerah Bojonegoro	0,301	0,643	0,784	1	0,86
80	KAB. BOYOLALI - PD. BPR Bank Boyolali	1	0,643	0,771	0,831	0,86
81	KAB. BOYOLALI - PD. BPR BKK Boyolali	0,334	0,643	0,77	0,822	0,86
82	KAB. BOYOLALI - PT. BPR Bank Desa Guna Daya	0,33	0,643	0,769	0,825	0,86
83	KAB. BOYOLALI - PT. BPR Nusamba Ampel	0,638	0,66	0,767	0,825	0,86
84	KAB. GIANYAR - ANGSA SEDANAYOGA	0,334	0,659	0,766	0,825	0,864
85	KAB. GIANYAR - ARTHA BALI JAYA	0,334	0,657	0,774	0,825	0,863
86	KAB. GIANYAR - BANK KERTIAWAN	0,364	0,657	0,775	0,825	0,878
87	KAB. GIANYAR - DEWATA CANDRADANA	0,36	0,657	0,775	0,845	0,877
88	KAB. GIANYAR - EKA AYU ARTHA BHUWANA	0,369	0,721	0,775	0,845	0,884
89	KAB. GIANYAR - GIANYAR PARTHASEDANA	0,378	0,664	0,776	0,83	0,88
90	KAB. GIANYAR - SUKAWATI PANCAKANTI	0,384	0,664	0,78	0,83	0,884
91	KAB. GIANYAR - SURYAJAYA UBUD	1	0,664	0,78	0,831	0,887
92	KAB. GIANYAR - TISH	1	0,664	0,78	1	0,881
93	KAB. GIANYAR - WERDHI SEDANA	0,849	1	0,779	0,867	0,88
94	Kab. Jember - Cinde Wilis	0,834	1	0,778	0,843	0,893
95	Kab. Jember - Nur Semesta Indah	0,649	0,928	0,803	0,853	0,89
96	KAB. JEPARA-PD. BPR Bank Jepara Artha	0,386	0,875	0,789	0,85	0,887
97	KAB. JEPARA-PD. BPR BKK Jepara Kota	0,366	0,796	0,789	1	0,88
98	KAB. JEPARA-PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara	0,358	0,761	0,789	0,843	0,878
99	Kab. Jombang - Bank Jombang	0,357	0,739	0,788	0,842	1
100	Kab. Jombang - Wijaya Prima	0,357	0,703	0,809	0,84	0,915
101	KAB. KARANGANYAR-PD. BPR Bank Daerah Karanganyar	0,419	0,684	0,795	0,84	0,913
102	KAB. KARANGANYAR-PD. BPR Bank Karanganyar	0,403	0,684	0,795	0,843	0,907
103	KAB. KARANGANYAR-PD. BPR BKK Tasikmadu	0,406	0,768	0,795	0,843	0,905
104	KAB. KARANGANYAR-PT. BPR Bina Sejahtera Insani	0,426	0,744	0,794	0,843	0,937
105	KAB. KEBUMEN - PD. BPR Bank Kebumen	0,381	0,713	0,867	0,843	0,906
106	KAB. KEBUMEN - PD. BPR BKK Kebumen	0,617	0,695	0,8	0,843	0,901
107	Kab. Kediri - Artha Pamenang	0,458	0,693	0,8	0,848	0,897
108	Kab. Kediri - Bank Daerah Kab. Kediri	0,426	0,886	0,8	0,848	0,897
109	Kab. Kediri - Bina Reksa Karyaartha	0,426	0,886	0,8	1	0,883
110	Kab. Kediri - Surya Artha Guna Mandiri	0,421	0,886	0,874	1	0,884
111	Kab. Kediri - Tunas Artha Jaya Abadi	0,427	0,769	0,806	0,848	0,881

No.	BPR	TE Intermediasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
112	KAB. KLATEN - PD. BPR Bank Klaten	0,411	0,76	0,806	1	0,881
113	Kab. Kuningan-BKPD Kuningan	0,411	0,758	0,806	0,876	0,881
114	Kab. Lamongan - Kabupaten Dati II Lamongan	0,419	0,739	0,806	0,868	0,896
115	Kab. Lamongan - Nusamba Brondong	0,411	1	0,808	0,868	0,889
116	Kab. Lumajang - Dharma Indra	0,429	0,712	0,809	0,868	0,888
117	Kab. Lumajang - Sentral Arta Asia	0,429	0,711	0,809	1	0,885
118	Kab. Madiun - Arta Kencana	0,429	0,719	0,808	0,879	0,885
119	Kab. Madiun - Kab. Dati II Madiun	0,429	0,717	0,808	0,858	0,888
120	Kab. Magetan - Ekadharma Bhina Raharja	0,429	0,714	0,815	0,859	0,888
121	KAB. Manokwari - BPR ARFAK INDONESIA	0,502	0,714	0,814	0,872	0,888
122	Kab. Nganjuk - Artha Pamenang Warujayeng	0,618	0,714	0,814	0,861	0,888
123	KAB. OGAN KOMERING ULU - PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel	0,612	0,724	0,814	0,861	0,888
124	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR - PT. BPR Agritans Batumarta	0,513	0,723	0,814	0,861	1
125	Kab. Pasuruan - Surasari Utama	0,507	1	0,82	0,862	0,93
126	Kab. Ponorogo - Ragasurya Nuansa	1	1	0,82	0,943	0,93
127	Kab. Probolinggo - Angga Perkasa	0,507	0,723	0,82	0,865	0,927
128	KAB. PURWOREJO - PD. BPR Bank Purworejo	0,481	0,791	0,82	0,865	0,93
129	KAB. PURWOREJO - PD. BPR BKK Purworejo	0,466	0,772	0,82	0,865	0,896
130	KAB. SEMARANG - BKK UNGARAN	0,488	0,742	0,831	0,866	0,896
131	Kab. Semarang-BPR MEKAR NUGRAHA KLEPU	0,531	0,742	0,83	0,865	0,896
132	KAB. SEMARANG-BPR MEKAR NUGRAHA KLEPU	0,531	0,737	0,83	0,87	0,896
133	Kab. Semarang-BPR RESTU KLEPU MAKMUR	0,515	1	0,83	0,87	0,896
134	KAB. SEMARANG-BPR RESTU KLEPU MAKMUR	0,497	0,853	0,83	0,87	0,976
135	Kab. Serang-Serang	0,502	0,83	0,836	0,871	0,957
136	KAB. SIDOARJO - PT. BPR Delta Artha	1	0,79	0,836	0,87	0,944
137	KAB. SRAGEN-PD. BPR BKK Karangmalang	0,766	0,787	0,836	0,874	0,942
138	KAB. SRAGEN-PD. BPR Djoko Tingkir	0,653	1	0,836	0,874	0,941
139	Kab. Sukabumi-Nusantara Bona Pasogit 11.	0,654	0,889	0,836	0,874	0,929
140	Kab. Sukabumi-Supra Artapersada	0,592	0,83	0,838	0,874	0,919
141	KAB. SUKOHARJO-PD. BP Kab. Dati II Sukoharjo	0,518	0,835	0,838	0,874	0,92
142	KAB. SUKOHARJO-PD. BPR BKK Grogol	0,518	0,845	0,838	0,887	0,919
143	KAB. SUKOHARJO-PT. BPR Kartasura Saribumi	0,518	0,842	0,838	0,967	0,918
144	KAB. SUKOHARJO-PT. PT. BPR Artha Sari Sentosa	0,518	0,814	0,838	1	0,916
145	KAB. TABANAN-DEWATA INDOBANK	0,518	0,788	1	1	0,906
146	KAB. TABANAN-LUHUR DAMAI	1	0,77	0,849	0,992	0,906
147	Kab. Tangerang-Central Artha Rezeki	0,674	0,772	0,849	0,883	0,906
148	Kab. Tangerang-Gita Makmur Utama	0,632	0,779	0,849	0,883	0,906
149	Kab. Tangerang-Mangga Jaya Utama	0,599	0,775	0,849	0,883	0,92
150	Kab. Tuban - Mentari Terang	0,598	0,769	0,866	0,883	1
151	Kab. Tulungagung - Bank Daerah Tulungagung	1	0,768	0,862	0,883	0,974
152	KAB. WONOSOBO - PD. BPR Bank Wonosobo	0,621	0,768	0,861	0,892	0,972

No.	BPR	TE Intermediasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
153	KAB. WONOSOBO - PD. BPR BKK Wonosobo	0,591	0,908	0,86	0,888	0,958
154	KAB. WONOSOBO - PT. BPR Surya Yudha	0,582	0,839	0,855	0,888	0,975
155	KAB.BLORA-PD. BPR BKK Blora	0,572	0,789	0,856	0,888	0,939
156	KABUPATEN BANJAR /MITRATAMA ARTHABUANA	0,571	0,787	0,856	0,888	0,925
157	KABUPATEN BANJAR NEGARA/BKK MANDIRAJA	0,571	0,786	0,856	0,896	0,926
158	KABUPATEN BANJAR NEGARA/SURYA YUDHA KENCANA	0,571	1	0,856	0,896	0,927
159	KABUPATEN BANTUL /BANK BANTUL	0,571	1	0,856	0,9	0,945
160	KABUPATEN BANTUL /CHANDRA MUKTIARTHA	0,571	0,804	1	0,894	0,929
161	KABUPATEN BANTUL /NUSAMBA BANGUNTAPAN	0,64	0,794	0,867	0,892	0,932
162	KABUPATEN BENGKALIS /MITRA ARTA MANDIRI	0,625	0,793	0,867	0,897	0,929
163	KABUPATEN BOLOAN MONGONDOW/CITRA DUMOGA	0,638	0,916	0,867	0,897	0,927
164	KABUPATEN BULELENG/INDAH CANDRA	0,624	0,882	0,867	0,897	0,921
165	KABUPATEN BULELENG/NUSAMBA KUBUTAMBAHAN	0,62	0,868	1	0,897	0,921
166	KABUPATEN BULELENG/SURYAJAYAKUBUTAMBAHAN	0,625	0,826	0,873	0,897	0,921
167	KABUPATEN GUNUNG KIDUL /BANK DAERAH GUNUNG KIDUL	0,616	0,799	0,873	0,901	0,921
168	KABUPATEN KAMPAR /SARIMADU	0,609	0,81	0,873	0,901	0,921
169	KABUPATEN KULON PROGO/BP KULON PROGO	0,607	0,806	0,871	0,901	0,968
170	KABUPATEN PALU/ PALU LOKADANA UTAMA	0,607	0,804	1	0,901	0,941
171	KABUPATEN PEKAN BARU/ARTHA MARGAYU	1	0,804	0,923	0,902	0,937
172	KABUPATEN PEMALANG/BKK TAMAN	0,893	0,804	0,915	1	0,928
173	KABUPATEN PEMALANG/HIDUP ARTHA PUTRA	0,85	1	0,91	0,941	0,924
174	KABUPATEN PURBALINGGA/ARTHA PERWIRA	0,81	0,927	0,906	0,921	0,968
175	KABUPATEN PURBALINGGA/BKK PURBALINGGA	0,771	0,903	0,899	0,907	0,97
176	KABUPATEN REMBANG/BKK LASEM	1	0,877	0,885	0,908	0,968
177	KABUPATEN SLEMAN /ARTA MLATIINDAH	0,715	0,894	0,885	1	0,966
178	KABUPATEN SLEMAN /BANK SLEMAN	0,76	1	0,885	1	0,945
179	KABUPATEN SLEMAN /BHAKTI DAYA EKONOMI	0,709	0,904	0,885	1	1
180	KABUPATEN SLEMAN /DANAAGUNG ABADI	0,701	0,881	1	1	0,957
181	KABUPATEN SLEMAN /DANAAGUNG BAKTI	0,715	0,843	0,93	0,999	0,953
182	KABUPATEN SLEMAN /SHINTA DAYA	0,705	0,833	0,931	0,918	0,948
183	KABUPATEN TEMANGGUNG/BKK TEMANGGUNG	0,699	0,943	0,92	0,918	0,95
184	KABUPATEN TEMANGGUNG/BP TEMANGGUNG	0,701	0,893	0,921	0,918	0,952
185	KABUPATEN TEMANGGUNG/KUSUMA SUMBING	0,688	0,89	1	0,917	0,952



No.	BPR	TE Intermediasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
186	Karawang-Pantura Abadi	1	0,87	1	0,927	0,952
187	KOTA ACEH BESAR BPR LKK MUSTAQIM SUKAMAKMUR	0,896	0,848	0,946	0,997	0,952
188	Kota Ambon- BPR MODERN EXPRESS	0,877	0,878	0,932	0,956	0,952
189	KOTA BANDAR LAMPUNG - PD. BPR BP Kota Bandar Lampung	0,776	0,847	0,898	0,924	1
190	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR Arta Kedaton Makmur	0,777	0,847	0,903	0,92	0,98
191	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR Langgeng Lestari Bersama	1	0,847	0,903	0,93	0,983
192	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR Trisurya Bumindo	0,841	0,844	0,902	1	0,973
193	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR Trisurya Bumindo	1	1	0,902	0,973	0,974
194	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung	1	1	0,901	0,93	1
195	KOTA BANDUNG-ARTHA MITRA KENCANA	1	1	0,91	0,927	0,942
196	KOTA BANDUNG-ARTHA NIAGA FINATAMA	0,834	0,998	0,908	0,94	0,942
197	KOTA BANDUNG-CITRADANA RAHAYU	0,749	0,996	0,907	0,932	0,942
198	KOTA BANDUNG-DAYA LUMBUNG ASIA	0,737	0,962	0,908	0,932	0,942
199	KOTA BANDUNG-KARYA GUNA MANDIRI	0,731	0,898	0,907	0,931	1
200	KOTA BANDUNG-KARYAJATNIKA SADAYA	0,723	0,909	0,915	0,932	0,992
201	KOTA BANDUNG-KERTAMULIA	0,755	0,895	0,911	0,931	1
202	KOTA BANDUNG-KOTA BANDUNG	0,75	0,877	0,911	0,938	0,991
203	Kota Bekasi-Aditama Arta	0,743	0,924	0,91	0,937	0,988
204	Kota Bekasi-Danatama Indonesia	0,739	0,917	0,91	0,937	1
205	Kota Bekasi-Wingsati	0,736	0,901	0,923	0,957	1
206	Kota Bogor-Bank Kota Bogor	1	0,873	0,92	0,955	0,995
207	Kota Bogor-Duta Pakuan Mandiri	0,962	0,87	0,919	0,937	0,996
208	Kota Cimahi-Kencana	0,889	0,978	0,918	0,937	0,995
209	Kota Cirebon-Cahaya Fajar	0,889	0,959	0,917	0,937	0,998
210	Kota Cirebon-Kota Cirebon	0,874	0,95	0,923	0,937	1
211	KOTA DENPASAR - BALI DANANIAGA	0,857	0,915	0,922	0,937	0,998
212	KOTA DENPASAR - BANK DESA SANUR	0,9	0,884	0,922	0,946	0,995
213	KOTA DENPASAR - HARI DEPAN	0,851	0,895	0,922	0,946	0,993
214	KOTA DENPASAR - HOKI	0,852	0,892	0,922	0,945	0,998
215	KOTA DENPASAR - LEGIAN	0,857	0,887	0,928	0,945	0,996
216	KOTA DENPASAR - PADMA	0,786	0,884	0,928	0,944	0,992
217	KOTA DENPASAR - PARTHA KENCANA TOHPATI	0,786	0,884	0,928	0,957	0,974
218	KOTA DENPASAR - PEDUNGAN	0,786	1	0,928	0,947	0,983
219	KOTA DENPASAR - PICU MANUNGGAL SEJAHTERA	0,786	1	0,928	0,948	1
220	KOTA DENPASAR - SRI ARTHA LESTARI	0,786	1	0,937	0,946	0,974
221	KOTA DENPASAR - TATA ANJUNGSARI	0,867	0,97	0,938	0,952	0,96
222	KOTA DEPOK-KARUNIA	0,857	0,997	0,937	1	0,96

No.	BPR	TE Intermediasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
223	KOTA JAMBI - PT. BPR Artha Prima Persada	0,851	0,902	0,937	1	0,96
224	KOTA JAMBI - PT. BPR Batanghari	0,841	0,902	0,937	0,989	0,964
225	KOTA JAMBI - PT. BPR Kencana Mandiri	0,829	0,902	0,94	0,962	0,964
226	KOTA JAMBI - PT. BPR Mitra Lestari	0,821	0,902	0,94	0,955	0,964
227	KOTA JAMBI - PT. BPR Prima Jambi Mandiri	0,821	0,902	0,94	0,958	0,964
228	Kota Jayapura - BPR IRIAN SENTOSA	0,823	1	0,94	0,958	0,964
229	KOTA KUPANG-CHRISTA JAYA PERDANA	0,821	1	0,94	0,957	1
230	KOTA KUPANG-TANA OBA LAIS MANEKAT	0,821	0,932	0,946	0,956	0,99
231	KOTA MADIUN - BPR Pemda Kota Madiun	0,839	0,919	0,946	0,956	0,982
232	KOTA MAGELANG- BANK MAGELANG	0,841	0,919	0,946	0,971	0,974
233	KOTA MAKASAR/HASA MITRA	0,841	1	0,946	0,96	0,968
234	KOTA MALANG - BPR Armindo Kencana	0,839	1	0,946	0,964	1
235	KOTA MANADO/CELEBES MITRA PERDANA	0,839	0,976	1	0,969	1
236	KOTA MANADO/CIPTA CEMERLANG INDONESIA	0,913	0,934	0,997	0,96	1
237	KOTA MANADO/DANA RAYA	0,905	0,929	0,993	0,967	0,971
238	KOTA PALEMBANG - PT. BPR Multidana Mandiri	0,897	0,944	0,99	0,965	0,971
239	KOTA PALEMBANG - PT. BPR Sukasada	0,888	0,944	1	0,964	1
240	KOTA PALEMBANG - PT. BPR Sumatera Selatan	0,866	0,944	0,963	0,964	1
241	KOTA PALEMBANG - PT. BPR Tri Gunung Selatan	0,899	0,944	0,963	0,964	0,983
242	KOTA PANGKAL PINANG - PT. BPR Ukabima Lestari	0,88	0,944	0,963	0,971	0,975
243	KOTA PEKALONGAN BPR ARTA UTAMA	0,875	1	0,963	0,972	0,975
244	KOTA PROBOLINGGO - SEMERU SWASTI	0,875	0,954	0,964	0,971	0,978
245	KOTA PROBOLINGGO - SENTRAL ARTA JAYA	0,875	0,944	0,987	0,97	0,978
246	KOTA SALATIGA BPR BANK SALATIGA	1	0,943	0,977	0,97	0,978
247	KOTA SEMARANG BPR BKK KOTA SEMARANG	1	0,946	0,999	0,973	0,978
248	KOTA SEMARANG BPR GUNUNG KINIBALU	1	0,946	0,997	0,976	0,978
249	KOTA SEMARANG BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA	1	0,946	0,997	0,975	1
250	KOTA SEMARANG BPR JATENG	1	0,946	1	0,973	0,983
251	KOTA SEMARANG BPR KEDUNG ARTO	1	0,946	0,975	0,979	0,982
252	KOTA SEMARANG BPR MANDIRI ARTHA ABADI	0,99	0,946	0,975	0,996	0,982
253	KOTA SEMARANG BPR MUNCUL ARTHA SEJAHTERA	0,984	0,963	0,975	0,994	0,982
254	KOTA SEMARANG BPR RESTU ARTHA MAKMUR	0,971	0,964	0,975	0,983	1
255	KOTA SEMARANG BPR RUDO INDOBANK	0,981	0,963	0,976	0,985	0,997
256	KOTA SEMARANG BPR WELERI MAKMUR	0,943	0,962	0,976	0,981	0,992
257	KOTA SOLO- BANK SOLO	0,931	0,962	0,976	1	0,986
258	KOTA SOLO-ADIPURA SANTOSA	0,929	1	0,976	1	0,986
259	KOTA SOLO-BINALANGGENG MULIA	0,929	0,989	0,976	1	0,989
260	KOTA SOLO-REJEKI INSANI	0,929	0,976	0,987	1	0,989
261	KOTA SOLO-SABAR ARTHA PRIMA	0,946	0,976	0,985	1	0,989

No.	BPR	TE Intermediasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
262	KOTA SURABAYA - BPR Jawa Timur	0,946	0,974	0,982	0,987	0,989
263	KOTA SURABAYA - KARYA PERDANA SEJAHTERA	0,946	1	0,982	0,987	0,989
264	Kota Tangerang Selatan-Akasia Mas	0,946	1	0,982	0,987	0,993
265	Kota Tangerang Selatan-Prima Kredit Mandiri	0,966	0,997	0,998	0,987	0,993
266	Kota Tangerang Selatan-Universal	0,965	0,994	0,994	0,987	0,993
267	Kota Tangerang-Hariarta Sedana	0,972	0,994	0,993	1	0,993
268	Kota Tasikmalaya-Artha Galunggung	0,964	1	0,993	0,992	0,993
269	KOTA TEGAL-CENTRAL ARTHA	0,964	0,998	0,993	0,996	0,996
270	Majalengka-Wahana Sentra Artha	0,964	1	1	0,998	0,996
271	Purwakarta-Nusamba Plered	1	0,999	1	0,997	0,996
272	Subang-Karya Utama Jabar	0,999	1	1	1	0,996
273	Subang-Pamanukan Bangunarta	0,993	1	1	0,999	0,996
274	Sumedang-Nusamba Tanjungsari	0,99	1	0,999	1	1
275	Sumedang-Sumedang	0,985	1	1	1	1
276	Tasikmalaya-Artha Sukapura	1	1	1	1	1
277	Tasikmalaya-Cipatujah Jawa Barat	1	1	1	1	1
278	Tasikmalaya-Nusamba Singaparna	1	1	1	1	1

Setelah dilakukan klasifikasi pada BPR sampel atas selanjutnya adalah BPR sampel bawah. Jumlah BPR sampel bawah jauh lebih banyak dibandingkan sampel atas. Dalam sampel bawah terdapat 1.030 dimana masing-masing BPR tersebut memiliki nilai aset di bawah rata-rata nilai aset BPR.

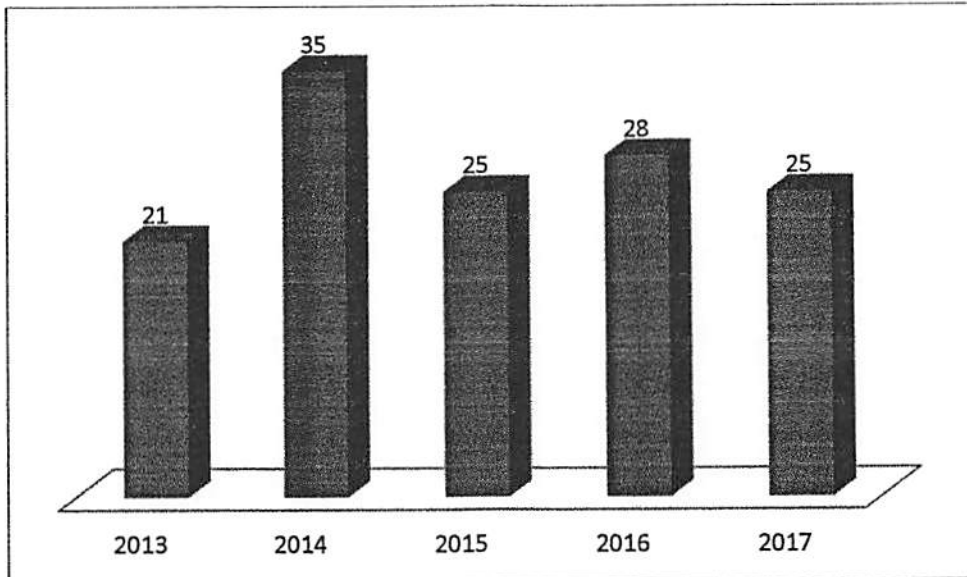
Sejauh tahun 2013 hingga 2017 jumlah BPR sampel bawah yang efisien tidak lebih dari 2%-3% tiap tahunnya. Rata-rata jumlah BPR efisien tiap tahunnya sebanyak 26 BPR. Tahun dengan BPR sampel bawah efisien terbanyak ada di tahun 2014, yaitu sebesar 3,40%. Selebihnya masih di bawah 3%. Kondisi umum lainnya adalah masih banyaknya BPR yang memiliki efisiensi kurang dari 5%, bahkan selama lima tahun berturut-turut memiliki efisiensi yang stagnan.

Perkembangan jumlah BPR sampel bawah efisien berfluktuasi. Pada awal periode penelitian, tahun 2013 menjadi tahun dengan jumlah BPR terendah, yaitu 21 BPR. Selanjutnya di tahun 2014 naik cukup banyak menjadi 35 BPR. Terjadi penurunan jumlah di tahun 2015 menjadi hanya 25. Tahun berikutnya, tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah BPR efisien menjadi 28, dan kembali turun dan jumlahnya sam seperti tahun 2015, yaitu 25 BPR.

**Tabel 5.8. Rata-Rata TE Intermediasi BPR Sampel Bawah**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata TE intermediasi	0,5149	0,5187	0,5160	0,5177	0,5160
Jumlah BPR dengan efisiensi di atas rata-rata	519	521	517	519	518

Nilai rata-rata efisiensi pada BPR sampel bawah hanya berkisar angka 0,51 dan tidak pernah mencapai angka 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata BPR sampel bawah tidak cukup efisien. Berdasarkan rata-rata efisiensi, terhitung sebanyak di tahun 2013 terdapat 519, tahun 2014 sebanyak 521, tahun 2015 sebanyak 517, tahun 2016 sebanyak 519, dan tahun 2017 sebanyak 518 BPR sampel bawah dengan efisiensi di atas rata-rata.

**Gambar 5.8. Skor Efisiensi BPR yang Efisien di Sampel Bawah**

Dari ribuan BPR sampel bawah hanya terdapat 11 BPR dengan efisiensi sama dengan 1 selama lima tahun berturut-turut, yaitu BPR Porsea Jaya, BPR LPN Magek, BPR Tripakarti Dhanatama, BPR Putra Artha Dewata, BPR Putra Niaga Mandiri, BPR Cahaya Arthasejati, BPR Tata Asia, BPR Karpana Tasia, BPR Nusantara Bona Pasogit 31, BPR Nusumma Singaparna, dan BPR Sahat Sentosa.

**Tabel 5.9. BPR Sampel Bawah Efisien Selama Lima Tahun**

No.	Kab./Kota- Nama Bpr
1	Kab. Toba Samosir BPR Porsea Jaya
2	Kab. Agam - BPR LPN Magek
3	Kota Batu – BPR Tripakarti Dhanatama
4	Kota Malang - BPR Putra Artha Dewata
5	Kota Palopo-BPR Putra Niaga Mandiri
6	Kota Tangerang-BPR Cahaya Arthasejati
7	Subang- BPR Tata Asia
8	Sumedang-BPR Karpana Tasia
9	Tasikmalaya-BPR Nusantara Bona Pasogit 31.
10	Tasikmalaya-BPR Nusumma Singaparna
11	Tasikmalaya- BPR Sahat Sentosa

### 5.1.2. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, variabel output yang digunakan adalah penerimaan bunga/margin/bagi hasil dari pinjaman yang disalurkan, dan penerimaan lainnya. Sementara variabel input yang digunakan adalah beban bunga/margin/bagi hasil DPK, beban penyisihan kerugian aset produktif, beban administrasi dan umum, beban lainnya, dan beban non-operasional.

Sama halnya dengan pendekatan intermediasi, dalam bagian ini akan dibahas mengenai kondisi efisiensi masing-masing BPR dan BPRS dengan berdasarkan nilai efisiensi, rata-rata efisiensi, rata-rata nilai aset (yang kemudian dibagi menjadi sampel atas dan sampel bawah), serta beberapa kondisi lainnya.

Secara keseluruhan efisiensi BPRS dengan menggunakan pendekatan produksi lebih baik dari pada dengan menggunakan pendekatan intermediasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai efisiensi pada masing-masing lembaga keuangan baik itu BPR maupun BPRS. Jika dengan menggunakan pendekatan intermediasi sering ditemukan BPR atau BPRS dengan nilai efisiensi di bawah 0,1 atau 10% namun di pendekatan produksi tidak ditemukan satu pun BPR atau BPR dengan nilai efisiensi kurang dari 10% meskipun masih ada beberapa yang ada di angka 20%. Selain itu, rata-rata efisiensi jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan pendekatan intermediasi. Jika pada pendekatan intermediasi rata-rata efisiensi hanya sekitar angka 0,5 namun di pendekatan produksi berada di angka 0,8 – 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan produksi kondisi lembaga keuangan mikro lebih baik.

### 5.1.2.1.BPRS

Kondisi efisiensi BPRS selama tahun 2013 – 2017 mengalami pasang surut. Di awal periode, tahun 2013, dari 114 BPR yang dinyatakan efisien dengan menggunakan pendekatan produksi sebanyak 42 BPRS. Di tahun berikutnya, tahun 2014, jumlah berkurang menjadi 38, di tahun 2015 naik kembali menjadi 41, tahun 2016 turun menjadi 39, dan kembali naik seperti posisi semula menjadi 42 di tahun 2017.

Tahun 2013 BPRS efisien cukup banyak dengan disertai performa BPRS yang cukup baik. Sebanyak 36,84% dari seluruh BPRS dinyatakan efisien. Sementara terdapat sebanyak 14 BPRS dengan efisiensi di bawah 0,5, seperti BPRS Carana Kiat Andalas Kab. Agam dengan efisiensi 0,395, BPRS Arta Leksana Kab Banyumas dan BPRS Suriyah Kab. Cilacap dengan efisiensi 0,2, dan BPRS Bina Amanah Satria dengan efisiensi 0,4. Sisanya sebanyak 58 BPRS memiliki efisiensi antara 0,5 – 0,99. Rata-rata efisiensi pada tahun 2013 sebesar 0,8019. Dari 114 BPRS terdapat 52 BPRS dengan efisiensi kurang dari rata-rata, seperti BPRS Barokah Dana Sejahtera Kota Yogyakarta dengan efisiensi 0,696, BPRS Gowata Kab. Gowa dengan efisiensi 0,739, dan BPRS Bhakti Makmur Indah Kab. Sidoarjo dengan efisiensi 0,6.

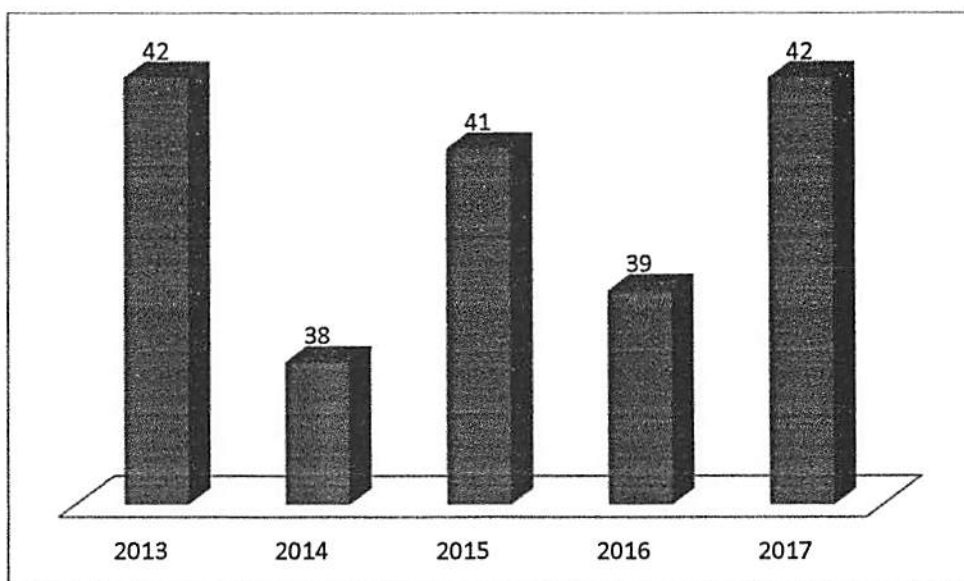
Jika tahun 2013 banyak ditemukan BPRS dengan efisiensi kurang dari 0,5, di tahun 2014 tidak ada satu pun BPRS dengan efisiensi kurang dari 0,5. Jumlah BPRS efisien turun hingga sebanyak 4 BPRS menjadi 38. Rata-rata efisiensi tahun 2014 sebesar 0,8710 dan terdapat sebanyak 45 BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata, seperti BPRS Mentari Pasaman Saiyo Kab. Pasaman Barat dengan efisiensi 0,644, BPRS Carana Kiat Andalas Kab. Agam dengan efisiensi 0,395, dan BPRS Patuh Beramal Kota Mataram dengan efisiensi 0,51.

Di tahun 2015, jumlah BPRS yang efisien mengalami peningkatan menjadi 41. Ada sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2014. Peningkatan jumlah BPRS efisien diikuti dengan tidak adanya BPRS yang memiliki efisiensi di bawah 0,5. Selain itu rata-rata efisiensi juga meningkat menjadi 0,9088. Dari rata-rata efisiensi tersebut terdapat sebanyak 48 BPRS yang memiliki efisiensi di bawah rata-rata, seperti BPRS Bakti Sumekar Kab. Sumenep dengan efisiensi 0,879, BPRS Jabal Tsur Kab. Pasuruan dengan efisiensi 0,891, dan BPRS Tulen Amanah Kab. Lombok Timur dengan efisiensi 0,833.

Setelah sempat mengalami penurunan dan kenaikan jumlah BPRS efisien di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebanyak 2 BPRS. Jika di tahun 2015 sebanyak 41 maka di tahun 2016 sebanyak 39 BPRS. Rata-rata efisiensi di tahun ini naik dari tahun sebelumnya, menjadi 0,9276 dan berdasarkan rata-rata tersebut terdapat 43 BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata, seperti BPRS Al Falah dari Kab. Banyuasin dengan

efisiensi 0,859, BPRS Rahma Syariah dari Kab. Kediri dengan efisiensi 0,881, dan BPRS Tanggamus dari Kab. Tanggamus dengan efisiensi 0,847.

Tahun 2017 BPRS efisien kembali bertambah menjadi 42. Hal ini diikuti dengan meningkatnya rata-rata efisiensi, namun juga diiringi dengan semakin banyaknya BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata. Rata-rata efisiensi sebesar 0,9474 dan ada sebanyak 45 BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata, seperti BPRS Sarana Prima Mandiri dari Pamekasan dengan efisiensi 0,904, BPRS Way Kanan dari Kab. Way Kanan dengan efisiensi 0,86, dan BPRS Tulen Amanah dari Kab. Lombok Timur dengan efisiensi 0,877.



**Gambar 5.9. Jumlah BPRS yang Efisien dengan Pendekatan Produksi**

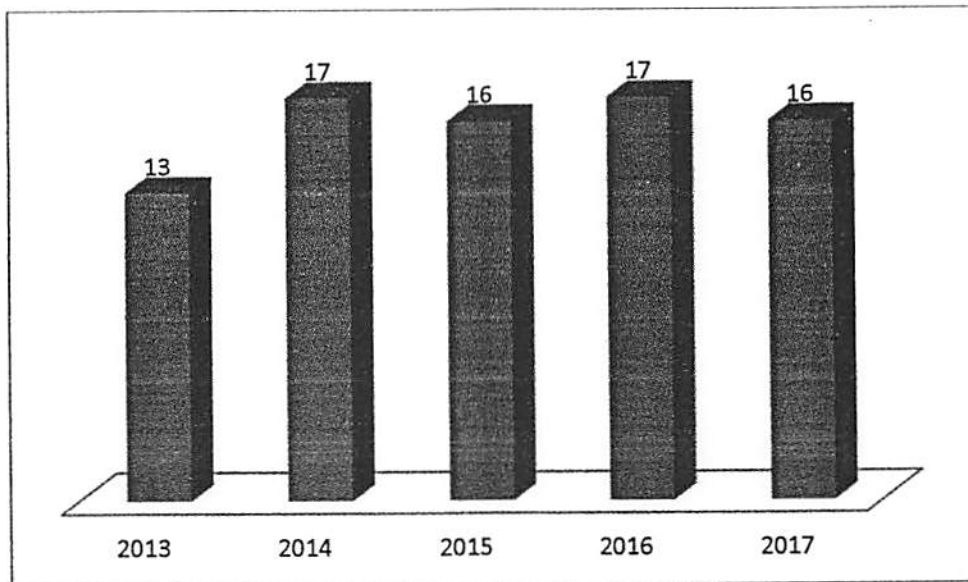
Selama lima tahun, terdapat beberapa BPRS yang memiliki performa efisien sempurna. Artinya dalam lima tahun beroperasi efisien secara kontinyu, yaitu BPRS Mulia Berkah Abadi, BPRS Cilegon Mandiri, BPRS Harta Insan Karimah, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia.

**Tabel 5.10. BPRS Kontinyu Efisien Selama Lima Tahun**

Nama BPRS	TE Produksi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Serang - BPRS Mulia Berkah Abadi	1	1	1	1	1
Kota Cilegon - BPRS Cilegon Mandiri	1	1	1	1	1
Kota Tangerang - BPRS Harta Insan Karimah	1	1	1	1	1
Kota Tangerang - BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	1	1	1	1	1

Setelah menganalisis BPRS berdasarkan efisiensi, maka sama seperti penjelasan di pendekatan intermediasi selanjutnya adalah analisis berdasarkan rata-rata nilai aset. Berdasarkan rata-rata nilai aset dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sampel atas dan sampel bawah. BPRS sampel atas adalah BPRS yang memiliki nilai aset di atas rata-rata nilai aset, sedangkan sampel bawah merupakan BPRS dengan nilai aset di bawah rata-rata aset.

Jumlah BPRS sampel atas sebanyak 26 BPRS. Dibandingkan dengan sampel atas BPRS pendekatan intermediasi, jumlah BPRS efisien yang cukup banyak. Rata-rata efisiensi antara 0,86 hingga 0,97.



**Gambar 5.10. Jumlah BPRS yang Efisien di Sampel Atas**

Kondisi sampel atas tahun 2013 cukup baik. Nilai rata-rata efisiensi sebesar 0,8690 dan ada 8 BPRS memiliki efisiensi di bawah efisiensi rata-rata, seperti BPRS Suriyah di Kab. Cilacap dengan efisiensi 0,28, BPRS Buana Mitra Perwira di Kab. Purbalingga dengan efisiensi sebesar 0,576, dan BPRS Kotabumi di Kab. Lampung Utara dengan efisiensi 0,482. Di tahun ini, jumlah BPRS efisien sebanyak 13 dari 26 atau separuh dari BPRS sampel atas merupakan BPRS yang beroperasi secara efisien, seperti BPRS Amanah Insani di Kab. Bekasi, BPRS Artha Karimah Irsyadi di Kota Bekasi, dan BPRS Cilegon Mandiri di Kota Cilegon.

Tahun 2014 juga dapat dikatakan tahun dengan BPRS sampel atas dengan kondisi yang cukup baik. Rata-rata efisiensi meningkat cukup banyak dari tahun 2013 menjadi 0,9450. Terdapat 6 BPRS memiliki efisiensi di bawah rata-rata tersebut dan dari 26 BPRS terdapat 17



BPRS efisien. Beberapa contoh BPRS sampel engan efisiensi di bawah rata-rata adalah BPRS Bhakti Makmur Indah di Kab. Sidoarjo dengan efisiensi 0,818, BPRS Sukowati Sragen di Kab. Sragen dengan efisiensi 0,8, dan BPRS Kotabumi di Kab. Lampung Utara dengan efisiensi 0,78. Sementara beberapa contoh BPRS sampel atas yang telah efisien diantaranya adalah BPRS Dinar Manah Sejahtera di Kab. Gresik, BPRS Bangun Drajat Warga di Kab. Bantul, dan BPRS Baiturridha Pusaka di Kota Bandung.

Tahun 2015 kondisi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Rata-rata efisiensi hanya selisih 0,0070 dari rata-rata tahun 2014. Rata-rata efisiensi di tahun ini sebesar 0,9520 dan terdapat 6 BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata. Dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2014. Namun ada sedikit perbedaan dengan tahun 2014, tahun 2014 jumlah BPRS efisien berkurang 1 menjadi 16 BPRS. Ada BPRS yang semula efisien namun di tahun 2015 tidak efisien dan begitu juga sebaliknya. Beberapa BPRS yang semula tidak efisien dan di tahun 2015 efisien di antaranya adalah BPRS Lantabur Tebuireng di Kab. Sumenep, BPRS Bakti Sumekar di Kab. Sumenep, BPRS Dinar Ashri di Kota Mataram. Sementara BPRS yang semula efisien kemudian di tahun 2015 tidak efisien di antaranya adalah BPRS Insan Madani di Kab. Sukoharjo, BPRS Ampek Ampek Candung di Kab. Agam, dan BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan di Kab. Bandung.

Di tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan dari tahun 2015, terutama rata-rata efisiensi yang meningkat menjadi 0,9810. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut terdapat 6 BPRS di bawah rata-rata efisiensi, seperti BPRS Bangka di Kab. Bangka dengan efisiensi 0,881, BPRS Insan Madani di Kab. Sukoharjo dengan efisiensi 0,907, dan BPRS Kotabumi di Kab. Lampung Utara dengan efisiensi 0,886. Sementara itu terdapat 17 BPRS efisien, seperti BPRS Dinar Ashri di Kota Mataram, BPRS Suriyah di Kab. Cilacap, dan BPRS Buana Mitra Perwira di Kab. Purbalingga.

Jika tahun-tahun sebelumnya secara garis besar performa BPRS sampel atas cukup baik, di tahun 2017 justru sebaliknya. Terjadi penurunan performa pada BPRS sampel atas. Nilai rata-rata efisiensi turun menjadi 0,9792 dan terdapat 8 BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata dan jumlah BPRS efisien turun menjadi 16. Beberapa contoh BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata adalah BPRS Barokah Dana Sejahtera di Kota Yogyakarta dengan efisiensi 0,942, BPRS Margirizki Bahagia di Kab. Bantul dengan efisiensi 0,948, dan BPRS Insan Madani di Kab. Sukoharjo dengan efisiensi 0,901.

Selama lima tahun periode penelitian, 2013 – 2017, terdapat 8 BPRS yang memiliki efisiensi sama dengan 1 kontinyu selama lima tahun. BPRS tersebut yaitu BPRS Al Ma'soem Syariah di Kab. Bandung, BPRS Amanah Insani di Kab. Bekasi, BPRS Artha Madani di Kab. Bekasi, BPRS Harta Insan Karimah Cibitung di Kab. Bekasi, BPRS Amanah Ummah di Kab. Bogor, BPRS Artha Karimah Irsyadi di Kota Bekasi, BPRS Cilegon Mandiri di Kota Cilegon, dan BPRS Harta Insan Karimah di Kota Tengerang.

**Tabel 5.11. Sampel Atas BPRS Pendekatan Produksi**

NO.	NAMA BPRS	TE PRODUKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	KAB CILACAP- BPRS SURIYAH	0,28	0,673	0,866	1	1
2	KAB PURBALINGGA-BPRS BUANA MITRA PERWIRA	0,576	0,674	0,8	1	0,941
3	KAB SRAGEN-BPRS SUKOWATI SRAGEN	1	0,8	1	1	0,926
4	KAB SUKOHARJO-BPRS INSAN MADANI	0,902	1	0,75	0,907	0,901
5	KAB BANGKA- BPRS BANGKA	1	1	0,75	0,881	0,908
6	KAB LAMPUNG UTARA-BPRS KOTABUMI	0,482	0,78	0,771	0,886	1
7	KAB AGAM-BPRS AMPEK AMPEK CANDUNG	0,617	1	0,898	1	1
8	KOTA MATARAM - BPRS DINAR ASHRI	0,733	0,918	1	1	0,991
9	KABUPATEN GRESIK/BPRS AMANAH SEJAHTERAH	0,946	1	1	0,972	1
10	KABUPATEN JOMBANG/BPRS LANTABUR TEBUIRENG	1	0,95	1	0,947	1
11	KOTA SIDOARJO/BPRS BHAKTI MAKMUR INDAH	0,555	0,818	0,961	0,917	1
12	KOTA SUMENEP/BPRS BAKTI SUMEKAR	1	0,957	1	1	0,956
13	KABUPATEN BANTUL/BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	0,758	1	1	1	0,947
14	KABUPATEN BANTUL/BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA	1	1	1	1	0,948
15	KOTA YOGYAKARTA/BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERAH	1	1	1	0,998	0,942
16	KAB. BEKASI-BPRS AMANAH INSANI	1	1	1	1	1
17	KAB. BEKASI-BPRS ARTHA MADANI	1	1	1	1	1
18	KAB. BEKASI-BPRS HARTA INSAN KARIMAH CIBITUNG	1	1	1	1	1
19	KAB. BOGOR-BPRS AMANAH UMMAH	1	1	1	1	1
20	KAB. BANDUNG - BPRS AL MA'SOEM SYARIAH	1	1	1	1	1
21	KAB. BANDUNG - BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN	0,84	1	0,977	0,998	1
22	KOTA BANDUNG - BPRS BAITURRIDHA PUSAKA	0,944	1	0,978	1	1
23	KOTA BEKASI - BPRS ARTHA KARIMAH IRSYADI	1	1	1	1	1

NO.	NAMA BPRS	TE PRODUKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
24	KOTA BEKASI - BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI	0,96	1	1	1	1
25	KOTA CILEGON - BPRS CILEGON MANDIRI	1	1	1	1	1
26	KOTA TANGERANG - BPRS HARTA INSAN KARIMAH	1	1	1	1	1

Setelah sampel atas, berikutnya adalah sampel bawah. Sama seperti sampel bawah dengan pendekatan intermediasi, jumlah sampel bawah pendekatan produksi sebanyak 88 BPRS. Secara keseluruhan, performa BPRS sampel bawah cukup baik. Setiap tahunnya rata-rata efisiensi meningkat, jumlah BPRS di bawah rata-rata efisiensi berfluktuasi, dan jumlah BPRS efisien meskipun sempat turun namun kembali naik di akhir periode.

Selama tahun 2013 kondisi BPRS sampel bawah cukup baik. Hampir separuh dari sampel bawah dinyatakan efisien dan sebanyak 38,64% berada di bawah rata-rata efisiensi sampel bawah. Rata-rata efisiensi di tahun ini sebesar 0,8287 dan terdapat 34 BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata efisiensi. Jika dilihat dari BPRS efisien, maka sebanyak 41 BPRS sampel bawah efisien. Contoh beberapa BPRS di bawah rata-rata yaitu BPRS Mitra Cahaya Indonesi di Kab. Sleman dengan efisiensi 0,726, BPRS Cempaka Al Amin di Kota Jakarta Selatan dengan efisiensi 0,744, dan BPRS Arta Leksana di Kab. Banyuman dengan efisiensi 0,2. Sementara contoh beberapa BPRS yang efisien di tahun ini adalah BPRS Muamalat Harkat di Kab. Bengkulu, BPRS Al Falah di Kab. Banyuasin, dan BPRS Rahma Syariah di Kab. Kediri.

Terjadi perubahan yang cukup besar di tahun 2014 dari tahun 2013. Rata-rata efisiensi sampel bawah meningkat sebesar 0,0595 dari tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun-tahun lainnya, perubahan di tahun 2014 paling besar. Nilai rata-rata efisiensi sebesar 0,8882 dan terdapat 38 BPRS di bawah rata-rata dan 37 BPRS efisien. Beberapa BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata seperti yang terjadi pada BPRS Arta Leksana di Kab. Banyumas dengan efisiensi 0,8, BPRS Gunung Slamet di Kab. Cilacap dengan efisiensi 0,802, dan BPRS Asad Alif di Kab. Kendal dengan efisiensi 0,559. Sementara BPRS yang efisien banyak yang di tahun sebelumnya dinyatakan tidak efisien namun di tahun 2014 berhasil memperbaiki performa dan efisien, seperti BPRS Gala Mitra Abadi di Kab. Grobogan, BPRS Ikhsanul Amal di Kab. Kebumen, dan BPRS Artha Amanah Ummat di Kab. Semarang.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 terjadi peningkatan rata-rata efisiensi sampel bawah yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah BPRS di bawah rata-rata dan jumlah BPRS efisien di tahun ini merupakan jumlah paling sedikit dibandingkan tahun lainnya. Sebanyak 28 BPRS efisien di tahun ini dan kebanyakan awalnya belum terlalu efisien kemudian di tahun ini bekerja efisien, seperti BPRS Al Ihsan di Kab. Bandung, BPRS Situbondo di Kab. Situbondo, dan BPRS Formes di Kab. Sleman. Turunnya jumlah BPRS efisien disebabkan banyaknya BPRS yang semula efisien justru di tahun 2015 kurang efisien, seperti BPRS Gala Mitra Abadi di Kab. Grobogan dengan efisiensi 0,698, BPRS Cahaya Hidup di Kab. Sleman dengan efisiensi 0,887, dan BPRS Dana Amanah di Kota Solo dengan efisiensi 0,737.

Tahun 2016 perubahan tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Nilai rata-rata efisiensi bertambah 0,0194 dari tahun sebelumnya menjadi 0,9189. Berdasarkan rata-rata efisiensi tersebut, terdapat 41 BPRS di bawah rata-rata dan 30 BPRS dinyatakan efisien. BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata beberapa di antaranya yaitu BPRS Bina Amanah Satria di Kab. Banyuman dengan efisiensi 0,805, BPRS Khasanah Ummat di Kab. Banyumas dengan efisiensi 0,781, dan BPRS Asad Alif di Kab. Kendal dengan efisiensi 0,777. Sementara BPRS yang efisien beberapa di antaranya yaitu BPRS Central Syariah Utama di Kota Solo, BPRS Rajasa di Kab. Lampung Tengah, dan BPRS Haji Miskin di Kab. Tanah Datar.

Selanjutnya adalah di tahun 2017 dimana menjadi tahun dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2016. Jumlah BPRS efisien naik cukup banyak menjadi 38 dan 32 BPRS dengan efisiensi di bawah rata-rata. Selisih rata-rata efisiensi dari tahun sebelumnya sebesar 0,0329 menjadi 0,9518. Beberapa contoh BPRS dibawah rata-rata adalah BPRS Gunung Slamet di Kab. Cilacap dengan efisiensi 0,818, BPRS Al Mabur di Kab. Klaten dengan efisiensi 0,83, dan BPRS Jabal Nur di Kota Surabaya dengan efisiensi 0,932. Sementara itu, contoh beberapa BPRS efisien yang sebelumnya belum efisien adalah BPRS Daya Artha Mentari di Kab. Pasuruan, BPRS Unawi Barokah di Kab. Sidoarjo, dan BPRS Artha Fisabilillah di Kab. Cianjur.

**Tabel 5.12. Sampel Bawah BPRS Pendekatan Produksi**

NO	NAMA BPRS SAMPEL BAWAH	TE PRODUKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	KAB BANYUMAS-BPRS ARTA LEKSANA	0,2	0,8	1	1	0,807
2	KAB BANYUMAS-BPRS BINA AMANAH SATRIA	0,4	1	1	0,805	0,807

NO	NAMA BPRS SAMPEL BAWAH	TE PRODUKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	KAB BANYUMAS- BPRS KHASANAH UMMAT	0,6	0,683	0,8	0,781	1
4	KAB CILACAP-BPRS BUMI ARTHA SAMPANG	0,8	1	1	0,803	0,818
5	KAB CILACAP-BPRS GUNUNG SLAMET	1	0,802	0,698	0,874	0,818
6	KAB GROBOGAN-BPRS GALA MITRA ABADI	0,2	1	0,698	1	0,818
7	KAB KEBUMEN-BPRS IKHSANUL AMAL	0,4	1	0,721	0,775	0,843
8	KAB KENDAL-BPRS ASAD ALIF	0,6	0,559	0,8	0,777	1
9	KAB KLATEN-BPRS AL MABRUR	0,8	0,569	1	0,781	0,83
10	KAB KUDUS-BPRS SAKA DANA MULIA	1	0,6	0,717	0,8	1
11	KAB PATI-BPRS ARTHA MAS ABADI	1	0,8	0,717	1	0,83
12	KAB SEMARANG-BPRS ARTHA AMANAH UMMAT	0,443	1	0,719	0,789	1
13	KOTA SEMARANG-BPRS ARTHA SURYA BAROKAH	0,763	0,721	0,8	0,791	1
14	KOTA SEMARANG-BPRS MITRA HARMONI KOTA SEMARANG	0,912	0,744	1	0,795	1
15	KOTA SEMARANG-BPRS PNM BINAMA	1	0,792	0,736	0,8	1
16	KOTA SOLO-BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA	0,267	0,8	0,736	1	1
17	KOTA SOLO-BPRS DANA AMANAH	0,401	1	0,737	0,831	1
18	KOTA SOLO-BPRS DANA MULIA	0,6	0,652	0,865	0,833	1
19	KAB BADUNG - BPRS SYARIAT FAJAR SEJAHTERA BALI	0,8	0,68	1	0,816	0,852
20	KAB BENGKULU-BPRS MUAMALAT HARKAT	1	0,67	0,755	0,819	0,852
21	KAB LAMPUNG TENGAH-BPRS RAJASA	0,291	0,8	0,755	1	0,852
22	KAB LAMPUNG TIMUR-BPRS LAMPUNG TIMUR	0,4	1	0,755	0,817	0,852
23	KAB TANGGAMUS-BPRS TANGGAMUS	0,6	0,662	0,8	0,819	1
24	KAB WAY KANAN-BPRS WAY KANAN	0,8	0,672	1	0,823	0,864
25	KOTA BANDAR LAMPUNG-BPRS BANDAR LAMPUNG	1	0,729	1	0,828	0,864
26	KOTA BANDAR LAMPUNG-BPRS MITRA AGRO USAHA	0,474	0,8	1	1	0,864
27	KAB KAMPAR-BPRS BERKAH DANA FADHILAH	0,926	1	0,943	0,831	0,969
28	KOTA PEKANBARU-BPRS HASANAH	0,847	0,686	1	0,833	1
29	KAB AGAM-BPRS CARANA KIAM ANDALAS	0,967	0,684	1	0,837	1
30	KAB PASAMAN BARAT-BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO	1	0,69	0,792	0,842	0,965
31	KAB TANAH DATAR-BPRS HAJI MISKIN	0,524	0,8	0,792	1	0,948
32	KOTA SOLOK-BPRS BARAKAH NAWAITUL IKHLAS	0,692	1	0,792	0,848	0,977
33	KAB BANYUASIN-BPRS AL FALAH	1	0,708	0,807	0,849	1
34	KAB LOMBOK TIMUR- BPRSTULEN AMANAH	1	0,747	1	0,851	0,886
35	KOTA MATARAM - BPRS PATUH BERAMAL	1	0,71	1	0,862	0,886

NO	NAMA BPRS SAMPEL BAWAH	TE PRODUKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
36	KABUPATEN GRESIK/BPRS MANDIRI MITRA SUKSES	0,69	0,8	0,811	1	0,886
37	KABUPATEN JEMBER/BPRS ASRI MADANI NUSNTARA	0,617	1	0,811	0,872	0,896
38	KABUPATEN KEDIRI/BPRS ARTHA PAMENANG	0,849	1	0,89	0,865	1
39	KABUPATEN KEDIRI/BPRS RAHMA SYARIAH	1	1	1	0,871	0,898
40	KABUPATEN MAGETAN/BPRS SYARIAH MAGETAN	1	0,905	0,83	0,87	1
41	KABUPATEN MALANG/BPRS BHAKTI HAJI	0,521	1	0,83	1	1
42	KOTA BATU/BPRS BUMI RINJANI BATU	1	1	0,83	0,879	1
43	KOTA KEDIRI/BPRS TANMIYA ARTHA	0,784	0,834	0,853	0,877	1
44	KOTA MALANG/BPRS MITRA HRMONI	0,89	0,808	1	0,879	1
45	KOTA MOJOKERTO/BPRS KOTA MOJOKERTO	1	1	0,849	0,884	0,99
46	KOTA LAMONGAN/BPRS KOTA MADINAH	1	0,853	0,849	1	1
47	KOTA PAMEKASAN/BPRS SARANA PRIMA MANDIRI	1	1	0,849	0,903	1
48	KOTA PASURUAN/BPRS DAYA ARTHA MENTARI	1	0,877	0,86	0,888	1
49	KOTA PASURUAN/BPRS JABAL TSUR	0,926	0,945	1	0,893	0,92
50	KOTA PASURUAN/BPRS UMMU	1	0,871	0,868	1	0,92
51	KOTA PONOROGO/BPRS ALMABRUL BABADAN	0,634	0,94	0,868	1	0,92
52	KOTA SIDOARJO/BPRS ANISA MUKTI	0,633	1	0,868	0,912	0,92
53	KOTA SIDOARJO/BPRS UNAWI BAROKAH	0,657	0,835	0,877	0,912	1
54	KOTA SITUBONDO/BPRS SITUBONDO	0,8	0,864	1	0,985	1
55	KOTA SURABAYA/BPRS JABAL NUR	1	0,924	0,887	0,931	0,932
56	KABUPATEN BANTUL/BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERAH	1	1	0,887	1	0,932
57	KABUPATEN SLEMAN/BPRS CAHAYA HIDUP	0,702	1	0,887	0,928	0,938
58	KABUPATEN SLEMAN/BPRS DANA AGUNG SYARIAH	1	0,932	0,899	0,941	1
59	KABUPATEN SLEMAN/BPRS FORMES	1	0,933	1	0,93	0,943
60	KABUPATEN SLEMAN/BPRS MITRA AMAL USAHA	1	0,937	0,906	0,949	0,943
61	KABUPATEN SLEMAN/BPRS MITRA CAHAYA INDONESIA	0,726	0,933	0,906	1	0,943
62	KOTA YOGYAKARTA/BPRS HARMONI YOGYAKARTA	0,737	1	0,906	0,987	0,943
63	JAKARTA SELATAN /BPRS CEMPAKA AL-AMIN	0,744	0,862	0,924	1	1
64	KABUPATEN KAMPAR/BPRS BERKAH DANA FADHILAH	0,8	0,87	1	0,983	0,955
65	KABUPATEN KAMPAR/BPRS HASANAH	1	0,888	0,925	0,983	0,955
66	KABUPATEN GOWA/BPRS GOWATA	1	0,884	0,925	1	0,957

NO	NAMA BPRS SAMPEL BAWAH	TE PRODUKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
67	KABUPATEN TAKALAR/BPRS SURYA SEJATI	0,986	1	0,925	0,999	0,968
68	KOTA MAKASSAR/BPRS INVESTAMA MEGA BAKTI	1	1	0,93	1	1
69	KOTA MAKASSAR/BPRS HARTA INSAN KARIMAH	0,921	1	1	1	0,966
70	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA/BPRS IBADURRAHMAN	1	1	0,943	1	1
71	KAB. BOGOR-BPRS BINA RAHMAH	0,876	1	0,943	1	1
72	KAB. BOGOR-BPRS INSAN CITA ARTHA JAYA	0,887	1	0,943	0,958	0,966
73	KAB. CIANJUR-BPRS ARTHA FISABILILLAH	0,898	0,989	0,947	0,958	1
74	KAB. BANDUNG-BPRS AL IHSAN	0,944	0,969	1	0,963	0,977
75	KAB. BANDUNG - BPRS AMANAH RABBANIAH	1	0,972	0,962	0,967	0,977
76	KAB. SUMEDANG - BPRS AL WADI'AH	1	0,983	0,962	1	0,977
77	KOTA BANDUNG - BPRS MITRA HARMONI KOTA BANDUNG	1	1	0,962	1	0,977
78	KOTA TASIKMALAYA - BPRS AL MADINAH TASIKMALAYA	1	1	0,965	0,996	1
79	KOTA CIMAHU - BPRS DAARUT RAUHIID	1	0,995	1	0,996	0,989
80	KOTA DEPOK - BPRS BINA AMWALUL HASANAH	1	1	0,981	1	0,989
81	KOTA DEPOK - BPRS AL BAROKAH	1	1	1	1	0,989
82	KOTA DEPOK - BPRS AL HIJRAH AMANAH	1	1	0,981	0,996	0,989
83	KOTA BEKASI - BPRS PATRIOT BEKASI	1	1	0,982	1	1
84	KAB. SERANG - BPRS MUAMALAH CILEGON	1	1	1	1	1
85	KAB. SERANG - BPRS ATTAQWA	1	1	1	1	1
86	KAB. SERANG - BPRS BERKAH RAMADHAN	1	1	1	1	1
87	KAB. SERANG - BPRS MULIA BERKAH ABADI	1	1	1	1	1
88	KOTA TANGERANG - BPRS MUSYARAKAH UMMAT INDONESIA	1	1	1	1	1

Ditinjau dari jumlah BPRS dengan efisiensi sama dengan 1 selama lima tahun kontinyu maka hanya ada 5 BPRS, sama dengan sampel atas. BPRS tersebut adalah BPRS Attaqwa di Kab. Serang, BPRS Berkah Ramadhan di Kab. Serang, BPRS Muamalah Cilegon di Kab. Serang, dan BPRS Mulia Berkas Abadi di Kab. Serang, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Kota Tangerang. Kelima-limanya merupakan BPRS yang berada di Provinsi Banten. Artinya banyak BPRS di Provinsi Banten dengan aset di bawah rata-rata mampu beroperasi efisien dalam lima tahun berturut-turut.

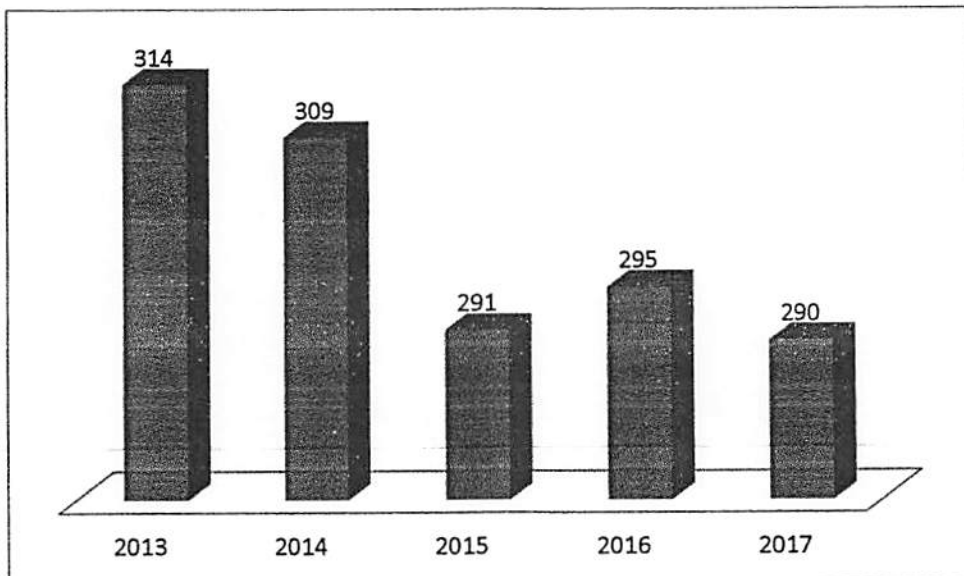
### 5.1.2.2.BPR

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai kondisi efisiensi BPR dengan menggunakan pendekatan produksi mulai dari nilai efisiensi, rata-rata efisiensi, serta kondisi sampel atas dan sampel bawah. Secara garis besar, kondisi efisiensi pada BPR dengan menggunakan pendekatan produksi lebih baik dibandingkan dengan pendekatan intermediasi. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata efisiensi yang lebih besar dan cenderung memiliki *range* nilai efisiensi yang lebih besar dibandingkan intermediasi.

**Tabel 5.13. Perbandingan Rata-Rata Efisiensi BPR Intermediasi dengan Produksi**

Rata-rata Efisiensi	2013	2014	2015	2016	2017
Intermediasi	0,5127	0,5157	0,5136	0,5151	0,5136
Produksi	0,7377	0,8327	0,8782	0,9048	0,9237

Jika dilihat dari BPR yang efisien, maka dapat dikatakan bahwa trend yang muncul adalah terus menurun. Di tahun 2013 meskipun dengan rata-rata efisiensi paling rendah namun jumlah BPR efisien paling tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. Di tahun 2013 terdapat sebanyak 314 BPR efisien. Sementara itu di tahun 2014 turun menjadi 309, dan terus turun di tahun 2015 menjadi 291. Tahun selanjutnya, 2016, terjadi sedikit peningkatan menjadi 295 dan kembali turun di tahun 2017 menjadi 290.



**Gambar 5.11. Jumlah BPR yang Efisien Dengan Pendekatan Produksi**



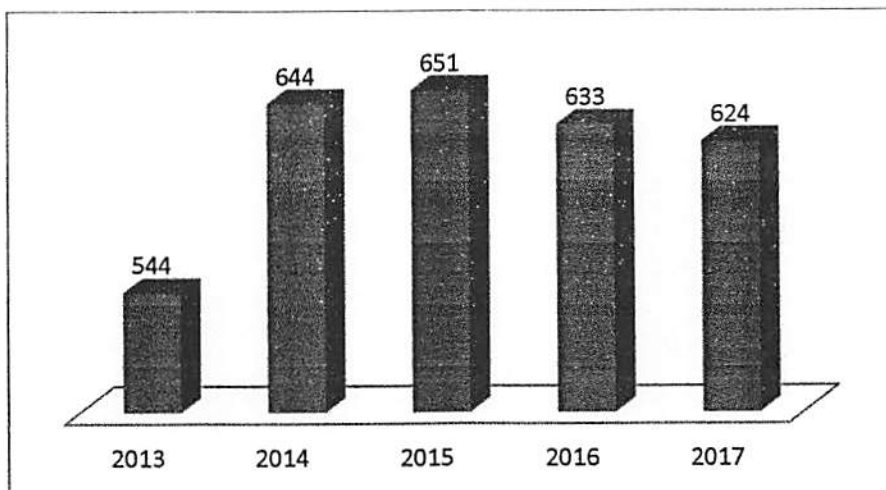
Selanjutnya menganalisis rata-rata efisiensi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013, rata-rata efisiensi sebesar 0,7377. Di tahun ini, masih ada BPR yang memiliki efisiensi kurang dari 0,5, yakni sebanyak 244 atau sebesar 18,65% dari seluruh BPR memiliki efisiensi kurang dari 0,5. Sementara tahun-tahun berikutnya tidak ada yang efisiensi kurang dari 0,5. Sementara itu, jumlah BPR dengan efisiensi kurang dari rata-rata sebanyak 544 BPR, seperti yang terjadi pada BPR Adhierresa di Kab. Bandung Barat dengan efisiensi 0,437, BPR Dana Multi Guna di Bekasi dengan efisiensi 0,8, dan BPR Prima Nusantara di Bekasi dengan efisiensi 0,4.

Selanjutnya di tahun 2014 terjadi peningkatan pada beberapa kategori. Rata-rata efisiensi meningkat menjadi 0,8327 yang diikuti dengan meningkatnya jumlah BPR dengan efisiensi kurang dari rata-rata menjadi 644 BPR. Beberapa contoh BPR dengan efisiensi kurang dari rata-rata adalah BPR Wedariyaksa di Kab. Pati dengan efisiensi 0,606, BPR BKK Tegal di Kab. Tegal dengan efisiensi 0,61, dan BPR Gisawa di Kab. Badung dengan efisiensi 0,8.

Tahun 2015 kembali terjadi peningkatan baik rata-rata hingga jumlah BPR dengan efisiensi kurang dari rata-rata. Di tahun 2015 rata-rata efisiensi meningkat menjadi 0,8782 dan BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata ada sebanyak 651. Beberapa contoh BPR tersebut adalah BPR Dinar Jagad di Kab. Badung dengan efisiensi sebesar 0,747, BPR Panji Aronta di Kab. Jombang dengan efisiensi 0,794, dan BPR Babat Lestari di Kab. Lamongan dengan efisiensi 0,808.

Kondisi di tahun 2016 menunjukkan sedikit terjadi penurunan pada kategori tertentu. Rata-rata efisiensi naik dari yang sebelumnya 0,8782 menjadi 0,9048 yang menyebabkan menurunnya jumlah BPR dengan efisiensi kurang dari rata-rata menjadi 633. Contoh BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata adalah BPR Majatama di Kab. Mojokerto dengan efisiensi 0,875, BPR Tridanasakti di Kab. Malang dengan efisiensi 0,868, dan BPR Arthamas di Kab. Demak dengan efisiensi 0,86.

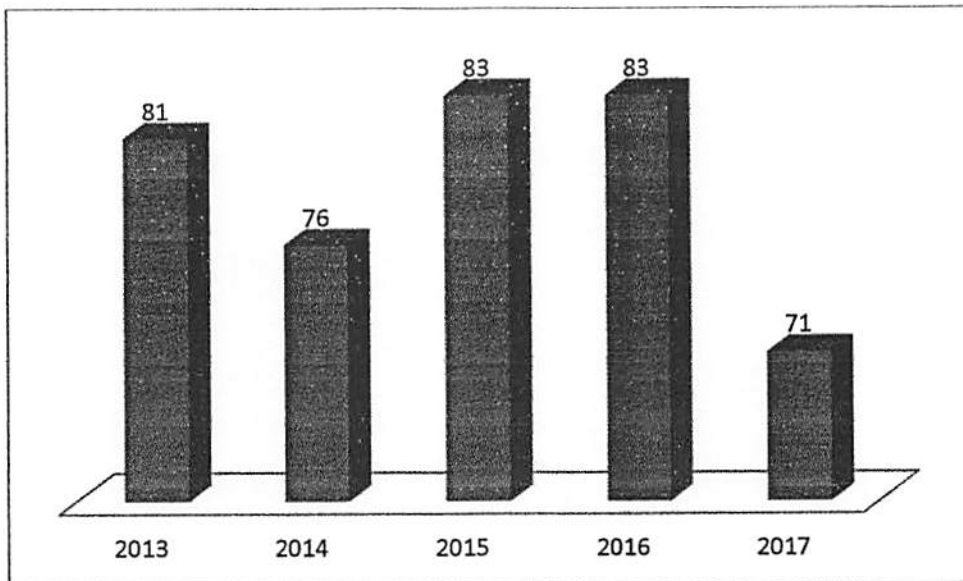
Hal yang serupa terjadi di tahun 2017. Rata-rata efisiensi meningkat menjadi 0,9237 dan jumlah BPR di bawah rata-rata efisien menurun menjadi 624. Artinya kondisi BPR semakin membaik dengan semakin banyaknya BPR yang efisien. Contoh beberapa BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata adalah BPR Tulus Puji Rejeki di Kab. Kediri dengan efisiensi 0,901, BPR Gunung Mas di Kab. Klaten dengan efisiensi 0,884, dan BPR Vita Jasaguna di Kab. Sidoarjo dengan efisiensi 0,914.



**Gambar 5.12. Jumlah BPR yang Efisien Kurang dari Rata-Rata**

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sampel atas dan sampel bawah. Jumlah BPR yang masuk dalam kategori sampel atas sebanyak 278. Dari sampel atas tersebut, hanya di tahun 2013 yang terdapat 45 BPR dengan efisiensi kurang dari 0,5, seperti yang terjadi pada BPR Arthaguna Mandiri di Kab. Bandung Barat dengan efisiensi 0,2, BPR DP Taspen di Bekasi dengan efisinesi 0,4, dan BPR Mitra Harmoni Indramayu di Kab. Indramayu dengan efisiensi 0,4. Sisanya tidak ada yang memiliki efisiensi kurang dari 0,5.

Pada sampel atas, rata-rata nilai efisiensi BPR tahun 2013 sebesar 0,7668. Dari rata-rata tersebut, terdapat sebanyak 105 BPR dengan efisiensi kurang dari rata-rata, seperti BPR BKK Cilacap di Kab. Cilacap dengan efisiensi 0,6, BPR Bank Klaten di Kab. Klaten dengan efisiensi 0,434, dan BPR BKPD Kuningan di Kab. Kuningan dengan efisiensi 0,6. Sementara itu, di awal periode penelitian, tahun 2013 sudah memiliki BPR sampel atas efisien yang cukup banyak. Di tahun ini terdapat sebanyak 81 BPR efisien, seperti BPR Nusamba Plered di Kab. Purwakarta, BPR Wahana Sentra Srtha di Kab. Majalengka, dan Kab Rejeki Insani di Kota Solo.



**Gambar 5.14. Jumlah BPR yang Efisien pada Sampel Atas**

Tahun 2014 mengalami penurunan jumlah BPR efisien menjadi sebanyak 76 BPR. Meski demikian, tidak ditemukan BPR dengan efisiensi di bawah 0,5. Dengan rata-rata efisiensi sampel atas tahun 2014 sebesar 0,8487, selisih 0,0819 dari tahun 2013, terdapat 131 BPR, seperti BPR Kulon Progo di Kab. Kulon Progo dengan efisiensi sebesar 0,807, BPR Gita Makmur Utama di Kab. Tangerang dengan efisiensi sebesar 0,786, dan BPR Mentari Terang di Kab. Tuban dengan efisiensi 0,786. Artinya masih banyak BPR di tahun 2014 dengan efisiensi antara 0,5 hingga 0,8.

Berikutnya tahun 2015 dan 2016 yang merupakan tahun dengan jumlah BPR efisien tertinggi di sampel atas. Sebanyak 83 BPR efisien di kedua tahun tersebut. Meski demikian, bukan berarti terdapat 83 BPR yang sama efisien berturut-turut selama dua tahun. Banyak yang efisien di tahun 2015 namun tidak di 2016, begitu juga sebaliknya efisien di 2016 namun di 2015 tidak, seperti yang terjadi pada BPR Mangga Jaya Utama di Kab. Tangerang dimana di tahun 2015 efisien namun di 2016 tidak dengan efisiensi 0,885, kemudian juga pada BPR Pantura Abadi dimana tahun 2015 memiliki efisiensi 0,91 yang kemudian di 2016 efisien. Namun ada juga beberapa yang memang efisien selama dua tahun, seperti BPR Danaagung Bakti di Kab. Sleman, BPR Artha Niaga Finatama di Kota Bandung, dan BPR Bank Kota Bogor di Kota Bogor yang memang selama 2015 dan 2016 efisien.

Nilai rata-rata efisiensi pada 2015 dan 2016 berbeda. Di 2015 rata-rata efisiensi sebesar 0,8922, naik 0,0436 dari 2014, sedangkan di 2016 naik sebesar 0,0236 menjadi 0,9159.

Berdasarkan rata-rata efisiensi, di 2015 terdapat 126 BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata dan di 2016 lebih banyak dengan adanya 128 BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata. Contoh beberapa BPR sampel atas 2015 di bawah rata-rata adalah BPR BKK Lasem di Kab. Rembang dengan efisiensi 0,882, BPR BKK Blora di Kab. Blora dengan efisiensi 0,856, dan BPR BKK Ungaran di Kab. Semarang dengan efisiensi 0,88. Sementara itu beberapa contoh BPR sampel atas 2016 dengan efisiensi di bawah rata-rata, seperti BPR BKK Wonosobo di Kab. Wonosobo dengan efisiensi 0,905, BPR Serang di Kab. Serang dengan efisiensi 0,873, dan BPR Sarimadu di Kab. Kampar 0,903.

Jika di 2015 dan 2016 jumlah BPR meningkat cukup banyak, justru di 2017 terjadi banyak penurunan BPR efisien. Terdapat selisih sebesar 12 BPR dari tahun sebelumnya sehingga terdapat 71 BPR efisien di tahun ini. Banyak BPR yang performanya menurun namun masih berada di kisaran antara 0,93 hingga 0,99. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata. Jika di 2017 rata-rata efisiensi sebesar 0,9389 dengan adanya 126, lebih sedikit dari 2016, BPR di bawah rata-rata berarti banyak yang di atas rata-rata, seperti BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang dan BPR Nusamba Plered di Kab. Purwakarta dimana jika empat tahun sebelumnya, 2013 hingga 2016, selalu efisien namun di 2017 justru tidak efisien dengan efisiensi sebesar 0,996.

Terdapat lima BPR dengan performa yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan selalu beroperasi efisien selama lima tahun berturut-turut, yaitu BPR Pamanukan Bangunarta di Kab. Subang, BPR Sumedang di Kab. Sumedang, BPR Artha Sukapura di Kab. Tasikmalaya, BPR Cipatujuh Jawa Barat di Kab. Tasikmalaya, dan BPR Nusamba Singaparna di Kab. Tasikmalaya.

**Tabel 5.14. Skor Efisiensi BPR pada Sampel Atas**

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	BANDUNG BARAT-ARTHAGUNA MANDIRI	0,2	0,8	0,672	1	0,845
2	BEKASI-BPR DP TASPEN	0,4	1	0,675	0,753	0,841
3	BEKASI-BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA	0,6	0,541	0,8	0,754	1
4	BEKASI-BPR OLYMPINDO PRIMADONA	0,8	0,523	1	0,756	0,83
5	BEKASI-BPR PARASAHABAT BEKASI	1	0,6	0,69	0,8	0,826
6	BOGOR-NUSANTARA BONA PASOGIT 2.	0,2	0,8	0,686	1	0,822
7	BOGOR-SEBARU SEJAHTERA LESTASI	0,4	1	0,687	0,758	0,841
8	CIANJUR-CIANJUR JABAR	0,6	0,531	0,8	0,759	1
9	CIREBON-BABAKAN	0,8	0,535	1	0,76	1
10	GARUT-INTAN JABAR	1	0,6	0,686	0,8	1

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
11	INDRAMAYU-KARYA REMAJA	0,2	0,8	0,683	1	0,846
12	INDRAMAYU-MITRA HARMONI INDRAMAYU	0,4	1	0,684	0,762	0,86
13	JAKARTA BARAT /INTIDANA SUKSES MAKMUR	0,6	0,528	0,8	0,763	1
14	JAKARTA BARAT /MULTI SEMBADA DANA	0,8	0,53	1	0,765	0,831
15	JAKARTA PUSAT /ARTHARINDO	1	0,6	0,695	0,8	0,834
16	JAKARTA PUSAT /BAHTERA MASYARAKAT	0,2	0,8	0,695	1	0,832
17	JAKARTA PUSAT /BANKSAR DANA LOKA	0,4	1	0,696	1	0,841
18	JAKARTA SELATAN /BINADANA SWADAYA	0,6	0,564	0,8	1	1
19	JAKARTA UTARA /OLYMPINDO	0,8	0,553	1	0,79	0,842
20	KAB BANGLI - BP KAB BANGLI	1	0,614	0,697	0,802	0,841
21	KAB BATANG BPR BKK BATANG	0,2	0,8	0,699	1	0,843
22	KAB BIMA - NTB BIMA	0,4	1	0,704	0,773	0,862
23	KAB CILACAP BPR BKK CILACAP	0,6	1	0,8	0,773	1
24	KAB CILACAP BPR GUNUNG SLAMET	0,8	1	1	0,774	0,82
25	KAB DELI SERDANG BPR KARYA BHAKTI UGAHARI	1	1	0,704	0,8	0,82
26	KAB DELI SERDANG BPR PIJER PODI KEKELENGEN	0,2	1	0,705	1	0,82
27	KAB DEMAK BPR BKK DEMAK	0,4	1	0,708	1	0,82
28	KAB DEMAK BPR MRANGGEN MITRAPERSADA	0,6	0,58	0,8	1	1
29	KAB GROBOGAN BKK PURWODADI	0,8	0,707	1	1	0,853
30	KAB GROBOGAN BPR WIROSARI IJO	1	0,6	1	0,9	0,84
31	KAB KARANGASEM - NUSAMBA MANGGIS	0,2	0,8	0,849	1	0,831
32	KAB KENDAL BPR BKK KENDAL	0,4	1	0,958	1	0,824
33	KAB KENDAL BPR KENDALI ARTHA	0,6	0,586	1	0,783	1
34	KAB KENDAL BPR NUSAMBA CEPIRING	0,8	0,572	1	0,787	0,848
35	KAB KENDAL BPR PASAR BOJA	1	0,6	0,714	0,8	0,842
36	KAB KLATEN-PT. BPR SHINTA BHAKTI WEDI	0,2	0,8	0,714	1	0,83
37	KAB KUDUS BPR BKK KUDUS	0,4	1	0,717	0,792	0,827
38	KAB LABUHAN BATU BPR MANGATUR GANDA	0,6	0,578	0,8	0,786	1
39	KAB LANGKAT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 13.	0,8	0,576	1	0,787	0,866
40	KAB LOMBOK BARAT-NTB LOMBOK BARAT	1	0,6	0,722	0,8	0,867
41	KAB LOMBOK TENGAH - NTB LOMBOK TENGAH	0,21	0,8	0,724	1	0,868
42	KAB LOMBOK TIMUR-NTB LOMBOK TIMUR	0,4	1	0,725	0,789	0,912

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
43	KAB LOMBOK TIMUR-SEGARA ANAK KENCANA	0,6	0,744	0,8	0,79	1
44	KAB MAGELANG BPR ARTHA MERTOYUDA	0,8	0,652	1	0,791	0,897
45	KAB MAGELANG BPR ARTHA SAMBHARA	1	0,657	0,731	0,8	0,894
46	KAB MAGELANG BPR BAPAS 69.	0,2	0,8	0,758	1	0,865
47	KAB MAGELANG BPR HIDUP ARTHA GRAHA	0,4	1	0,78	0,794	0,877
48	KAB MAGELANG BPR KEMBANG PARAMA	0,6	0,644	0,801	0,795	1
49	KAB MAGELANG BPR MUNTILAN	0,8	0,637	1	0,796	0,838
50	KAB MUARO JAMBI - PT. BPR PONDOK MEJA INDAH	1	0,629	0,749	0,8	0,838
51	KAB PATI BPR ARTHA HUDA ABADI	0,204	0,8	0,746	1	0,838
52	KAB PATI BPR BANK DAERAH PATI	0,4	1	0,762	0,8	0,838
53	KAB PATI BPR BKK PATI	0,6	0,631	0,8	0,799	1
54	KAB PEKALONGAN BPR BKK KAB PEKALONGAN	0,8	0,632	1	0,8	0,851
55	KAB SUMBAWA - NTB SUMBAWA	1	0,66	1	0,802	0,842
56	KAB SUMBAWA - SAMAWA KENCANA	0,239	0,8	0,793	1	0,842
57	KAB TEGAL BPR BKK TEGAL	0,4	1	0,774	0,803	0,844
58	KAB TEGAL BPR NUSAMBA ADIWERNA	0,6	0,623	0,8	0,803	1
59	KAB WONOGIRI BPR BKK WONOGIRI	0,8	0,634	1	0,805	0,882
60	KAB. BADUNG - ADIARTHA UDIANA	1	0,631	0,746	0,806	0,876
61	KAB. BADUNG - BALI ARTHA ANUGRAH	0,235	0,8	0,764	1	0,876
62	KAB. BADUNG - GISAWA	0,4	1	0,805	0,812	0,888
63	KAB. BADUNG - JAYA KERTI	0,6	0,626	0,807	0,811	1
64	KAB. BADUNG - KITA SENTRADANA	0,8	0,624	1	0,812	0,881
65	KAB. BADUNG - MAHA BHOGA MARGA	1	0,624	0,751	0,812	0,873
66	KAB. BADUNG - MAMBAL	0,307	0,8	0,753	1	0,869
67	KAB. BADUNG - NUSAMBA MENGWI	0,4	1	0,758	0,814	0,866
68	KAB. BADUNG - PARASARI	0,6	0,626	0,8	0,814	1
69	KAB. BANDUNG-GUNADHANA MITRASEMBADA	0,8	0,628	1	0,814	0,865
70	KAB. BANDUNG-KERTA RAHARJA	1	0,63	0,759	0,815	0,853
71	KAB. BANDUNG-MITRA KANAKA SANTOSA	0,306	0,8	0,762	1	0,853
72	KAB. BANYUMAS-PD. BPR BKK PURWOKERTO	0,4	1	0,768	0,816	0,901
73	KAB. BANYUMAS-PT. BPR ARTHA MEKAR SOKARAJA	0,6	0,657	0,8	0,818	1
74	KAB. BANYUMAS-PT. BPR GUNUNG SIMPING ARTHA	0,8	0,647	1	0,818	0,901
75	KAB. BANYUWANGI - DELTA ARTHA PANGGUNG BANYUWANGI	1	0,639	0,763	0,82	0,924
76	KAB. BANYUWANGI - NUSAMBA GENTENG	0,326	0,8	0,764	1	0,951
77	KAB. BLITAR - NUSAMBA WLINGI	0,4	1	0,766	0,993	0,964

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
78	KAB. BLORA-PT. BPR DUTABHAKTI INSANI	0,6	0,644	0,8	1	1
79	KAB. BOJONEGORO - BANK DAERAH BOJONEGORO	0,8	0,646	1	0,861	0,873
80	KAB. BOYOLALI - PD. BPR BANK BOYOLALI	1	0,648	0,772	0,887	0,873
81	KAB. BOYOLALI - PD. BPR BKK BOYOLALI	1	0,8	0,778	1	0,921
82	KAB. BOYOLALI - PT. BPR BANK DESA GUNA DAYA	1	1	0,788	0,828	0,936
83	KAB. BOYOLALI - PT. BPR NUSAMBA AMPEL	1	0,658	0,8	0,828	1
84	KAB. GIANJAR - ANGSA SEDANAYOGA	1	0,657	1	0,827	0,863
85	KAB. GIANJAR - ARTHA BALI JAYA	1	0,668	0,778	0,829	0,863
86	KAB. GIANJAR - BANK KERTIAWAN	1	0,8	0,785	1	0,863
87	KAB. GIANJAR - DEWATA CANDRADANA	0,436	1	0,791	0,83	0,863
88	KAB. GIANJAR - EKA AYU ARTHA BHUWANA	1	0,673	0,8	0,83	1
89	KAB. GIANJAR - GIANJAR PARTHASEDANA	0,8	0,675	1	1	0,94
90	KAB. GIANJAR - SUKAWATI PANCAKANTI	1	0,69	0,778	0,833	0,901
91	KAB. GIANJAR - SURYAJAYA UBUD	0,396	0,8	0,778	1	0,903
92	KAB. GIANJAR - TISH	0,4	1	0,779	1	0,93
93	KAB. GIANJAR - WERDHI SEDANA	0,6	1	0,8	0,928	1
94	KAB. JEMBER - CINDE WILIS	0,8	0,79	1	0,874	0,883
95	KAB. JEMBER - NUR SEMESTA INDAH	1	0,749	1	0,854	0,878
96	KAB. JEPARA-PD. BPR BANK JEPARA ARTHA	1	0,8	0,798	1	0,892
97	KAB. JEPARA-PD. BPR BKK JEPARA KOTA	0,461	1	0,802	0,845	0,885
98	KAB. JEPARA-PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN JEPARA	0,74	0,687	0,809	0,841	1
99	KAB. JOMBANG - BANK JOMBANG	0,8	0,684	1	0,841	0,903
100	KAB. JOMBANG - WIJAYA PRIMA	1	0,685	1	0,842	0,895
101	KAB. KARANGANYAR-PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR	0,431	0,8	0,804	1	0,903
102	KAB. KARANGANYAR-PD. BPR BANK KARANGANYAR	0,44	1	0,808	0,843	0,913
103	KAB. KARANGANYAR-PD. BPR BKK TASIKMADU	0,6	0,711	0,814	0,844	1
104	KAB. KARANGANYAR-PT. BPR BINA SEJAHTERA INSANI	0,8	0,695	1	0,845	0,91
105	KAB. KEBUMEN - PD. BPR BANK KEBUMEN	1	0,703	0,798	0,846	0,911
106	KAB. KEBUMEN - PD. BPR BKK KEBUMEN	0,467	0,8	0,797	1	0,913
107	KAB. KEDIRI - ARTHA PAMENANG	0,481	1	0,797	0,848	0,926
108	KAB. KEDIRI - BANK DAERAH KAB. KEDIRI	0,6	0,714	0,803	0,849	1
109	KAB. KEDIRI - BINA REKSA KARYAARTHA	0,8	0,716	1	0,849	0,899

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
110	KAB. KEDIRI - SURYA ARTHA GUNA MANDIRI	1	0,737	0,804	0,851	0,895
111	KAB. KEDIRI - TUNAS ARTHA JAYA ABADI	0,43	0,8	0,803	1	0,895
112	KAB. KLATEN - PD. BPR BANK KLATEN	0,434	1	0,803	0,852	0,885
113	KAB. KUNINGAN-BKPD KUNINGAN	0,6	0,766	0,808	0,853	1
114	KAB. LAMONGAN - KABUPATEN DATI II LAMONGAN	0,8	1	1	0,854	0,914
115	KAB. LAMONGAN - NUSAMBA BRONDONG	1	0,848	0,808	0,855	0,91
116	KAB. LUMAJANG - DHARMA INDRA	0,429	0,8	0,808	1	0,909
117	KAB. LUMAJANG - SENTRAL ARTA ASIA	0,435	1	0,809	0,906	0,908
118	KAB. MADIUN - ARTA KENCANA	0,6	0,731	0,813	0,863	1
119	KAB. MADIUN - KAB. DATI II MADIUN	0,8	0,722	1	0,865	0,888
120	KAB. MAGETAN - EKADHARMA BHINA RAHARJA	1	0,722	0,819	0,899	0,888
121	KAB. MANOKWARI - BPR ARFAK INDONESIA	0,569	0,8	0,815	1	0,894
122	KAB. NGANJUK - ARTHA PAMENANG WARUJAYENG	0,529	1	0,815	0,861	0,89
123	KAB. OGAN KOMERING ULU - PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA SUMSEL	0,6	0,724	0,819	0,861	1
124	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR - PT. BPR AGRITANS BATUMARTA	0,8	0,726	1	0,863	0,932
125	KAB. PASURUAN - SURASARI HUTAMA	1	1	0,82	0,871	0,938
126	KAB. PONOROGO - RAGASURYA NUANSA	0,492	1	0,82	1	0,937
127	KAB. PROBOLINGGO - ANGGA PERKASA	0,51	1	0,82	0,865	0,958
128	KAB. PURWOREJO - PD. BPR BANK PURWOREJO	0,6	0,842	0,825	0,866	1
129	KAB. PURWOREJO - PD. BPR BKK PURWOREJO	0,8	0,739	1	0,867	0,896
130	KAB. SEMARANG - BKK UNGARAN	1	0,739	0,88	0,875	0,896
131	KAB. SEMARANG-BPR MEKAR NUGRAHA KLEPU	0,516	0,8	0,838	1	0,896
132	KAB. SEMARANG-BPR MEKAR NUGRAHA KLEPU	0,55	1	0,84	0,87	0,896
133	KAB. SEMARANG-BPR RESTU KLEPU MAKMUR	0,603	0,76	0,845	0,87	1
134	KAB. SEMARANG-BPR RESTU KLEPU MAKMUR	0,8	0,756	1	0,872	0,925
135	KAB. SERANG-SERANG	1	0,757	0,832	0,873	0,919
136	KAB. SIDOARJO - PT. BPR DELTA ARTHA	0,597	0,8	0,835	1	0,909
137	KAB. SRAGEN-PD. BPR BKK KARANGMALANG	0,583	1	0,836	0,875	0,911
138	KAB. SRAGEN-PD. BPR DJOKO TINGKIR	0,6	0,839	0,841	0,875	1
139	KAB. SUKABUMI-NUSANTARA BONA PASOGIT 11.	0,8	0,799	1	0,876	0,903
140	KAB. SUKABUMI-SUPRA ARTAPERSADA	1	0,78	0,838	0,878	0,903



NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
141	KAB. SUKOHARJO-PD. BP KAB. DATI II SUKOHARJO	0,518	0,805	0,838	1	0,903
142	KAB. SUKOHARJO-PD. BPR BKK GROGOL	0,522	1	0,838	0,88	0,903
143	KAB. SUKOHARJO-PT. BPR KARTASURA SARIBUMI	0,6	0,829	0,842	0,88	1
144	KAB. SUKOHARJO-PT. PT. BPR ARTHA SARI SENTOSA	0,8	0,805	1	0,898	0,906
145	KAB. TABANAN-DEWATA INDOBANK	1	0,811	0,944	0,9	0,906
146	KAB. TABANAN-LUHUR DAMAI	0,698	0,845	0,934	1	0,906
147	KAB. TANGERANG-CENTRAL ARTHA REZEKI	0,714	1	0,949	0,884	0,906
148	KAB. TANGERANG-GITA MAKMUR UTAMA	0,706	0,786	0,958	0,884	1
149	KAB. TANGERANG-MANGGA JAYA UTAMA	0,8	0,775	1	0,885	0,91
150	KAB. TUBAN - MENTARI TERANG	1	0,786	0,929	0,887	1
151	KAB. TULUNGAGUNG - BANK DAERAH TULUNGAGUNG	0,683	0,8	1	1	0,963
152	KAB. WONOSOBO - PD. BPR BANK WONOSOBO	0,732	1	1	0,896	0,969
153	KAB. WONOSOBO - PD. BPR BKK WONOSOBO	0,744	0,839	0,993	0,905	1
154	KAB. WONOSOBO - PT. BPR SURYA YUDHA	0,8	0,83	1	0,89	1
155	KAB. BLORA-PD. BPR BKK BLORA	1	0,943	0,856	0,891	0,985
156	KABUPATEN BANJAR /MITRATAMA ARTHABUANA	0,571	0,812	0,856	1	0,914
157	KABUPATEN BANJAR NEGARA/BKK MANDIRAJA	0,585	1	0,856	0,896	0,914
158	KABUPATEN BANJAR NEGARA/SURYA YUDHA KENCANA	0,613	0,857	0,86	0,896	1
159	KABUPATEN BANTUL /BANK BANTUL	0,8	0,807	1	0,894	0,936
160	KABUPATEN BANTUL /CHANDRA MUKTIARTHA	1	0,846	1	0,896	1
161	KABUPATEN BANTUL /NUSAMBA BANGUNTAPAN	0,725	0,846	0,878	1	0,932
162	KABUPATEN BENGKALIS /MITRA ARTA MANDIRI	0,68	1	0,879	0,897	0,924
163	KABUPATEN BOLOAN MONGONDOW/CITRA DUMOGA	0,689	0,838	0,888	0,897	1
164	KABUPATEN BULELENG/INDAH CANDRA	0,8	0,838	1	0,899	0,921
165	KABUPATEN BULELENG/NUSAMBA KUBUTAMBAHAN	1	0,814	0,914	0,9	0,921
166	KABUPATEN BULELENG/SURYAJAYAKUBUTAMBAHAN	0,641	0,863	0,891	1	0,921
167	KABUPATEN GUNUNG KIDUL /BANK DAERAH GUNUNG KIDUL	0,651	1	0,892	0,901	0,921
168	KABUPATEN KAMPAR /SARIMADU	0,671	0,812	0,883	0,902	1
169	KABUPATEN KULON PROGO/BP KULON PROGO	0,8	0,807	1	0,903	0,953

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
170	KABUPATEN PALU/ PALU LOKADANA UTAMA	1	0,809	0,879	0,905	0,951
171	KABUPATEN PEKAN BARU/ARTHA MARGAYU	0,721	0,811	0,878	1	0,972
172	KABUPATEN PEMALANG/BKK TAMAN	0,718	1	0,879	1	0,967
173	KABUPATEN PEMALANG/HIDUP ARTHA PUTRA	0,714	0,964	0,901	0,97	1
174	KABUPATEN PURBALINGGA/ARTHA PERWIRA	0,8	0,875	1	0,937	0,947
175	KABUPATEN PURBALINGGA/BKK PURBALINGGA	1	0,856	0,882	0,927	0,942
176	KABUPATEN REMBANG/BKK LASSEM	0,919	0,826	0,882	1	0,954
177	KABUPATEN SLEMAN /ARTA MLATIINDAH	0,854	1	0,882	0,91	0,948
178	KABUPATEN SLEMAN /BANK SLEMAN	0,803	0,876	0,885	0,911	1
179	KABUPATEN SLEMAN /BHAKTI DAYA EKONOMI	0,859	0,881	1	0,913	0,999
180	KABUPATEN SLEMAN /DANAAGUNG ABADI	1	1	1	0,93	0,97
181	KABUPATEN SLEMAN /DANAAGUNG BAKTI	0,693	0,942	1	1	0,944
182	KABUPATEN SLEMAN /SHINTA DAYA	0,687	1	0,955	0,916	0,99
183	KABUPATEN TEMANGGUNG/BKK TEMANGGUNG	0,701	0,922	0,97	0,917	1
184	KABUPATEN TEMANGGUNG/BP TEMANGGUNG	0,8	0,895	1	0,922	0,935
185	KABUPATEN TEMANGGUNG/KUSUMA SUMBING	1	0,872	0,902	0,919	0,935
186	KARAWANG-PANTURA ABADI	0,801	0,866	0,91	1	0,935
187	KOTA ACEH BESAR BPR LKK MUSTAQIM SUKAMAKMUR	0,784	1	0,915	0,922	0,935
188	KOTA AMBON- BPR MODERN EXPRESS	0,77	0,846	0,922	0,952	1
189	KOTA BANDAR LAMPUNG - PD. BPR BP KOTA BANDAR LAMPUNG	0,8	0,847	1	1	0,983
190	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR	1	0,845	0,898	0,923	0,98
191	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR LANGGENG LESTARI BERSAMA	1	0,846	0,898	1	0,974
192	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR TRISURYA BUMINDO	0,994	1	0,898	1	0,965
193	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR TRISURYA BUMINDO	1	0,87	0,901	0,946	1
194	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG	1	0,866	1	0,932	0,942
195	KOTA BANDUNG-ARTHA MITRA KENCANA	1	0,863	1	0,937	0,942
196	KOTA BANDUNG-ARTHA NIAGA FINATAMA	0,808	0,886	1	1	0,942
197	KOTA BANDUNG-CITRADANA RAHAYU	0,751	1	1	0,955	0,942

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
198	KOTA BANDUNG-DAYA LUMBUNG ASIA	0,775	0,861	1	0,945	1
199	KOTA BANDUNG-KARYA GUNA MANDIRI	0,811	0,861	1	0,945	1
200	KOTA BANDUNG-KARYAJATNIKA SADAYA	1	0,862	0,96	0,963	0,983
201	KOTA BANDUNG-KERTAMULIA	0,736	0,89	0,915	1	1
202	KOTA BANDUNG-KOTA BANDUNG	0,742	1	0,915	0,933	0,986
203	KOTA BEKASI-ADITAMA ARTA	0,772	0,872	0,917	0,933	1
204	KOTA BEKASI-DANATAMA INDONESIA	0,8	0,873	1	0,934	0,999
205	KOTA BEKASI-WINGSATI	1	0,871	1	0,937	0,98
206	KOTA BOGOR-BANK KOTA BOGOR	0,801	0,873	1	1	0,973
207	KOTA BOGOR-DUTA PAKUAN MANDIRI	0,792	1	0,93	0,937	0,972
208	KOTA CIMAHI-KENCANA	0,804	0,899	0,933	0,94	1
209	KOTA CIREBON-CAHAYA FAJAR	0,878	0,884	1	0,939	0,953
210	KOTA CIREBON-KOTA CIREBON	1	0,886	0,922	0,94	0,953
211	KOTA DENPASAR - BALI DANANIAGA	0,888	0,887	0,922	1	0,966
212	KOTA DENPASAR - BANK DESA SANUR	0,818	1	0,922	0,942	0,971
213	KOTA DENPASAR - HARI DEPAN	0,862	0,899	0,924	0,943	1
214	KOTA DENPASAR - HOKI	0,901	0,89	1	0,943	0,957
215	KOTA DENPASAR - LEGIAN	1	0,889	0,929	0,951	0,957
216	KOTA DENPASAR - PADMA	0,786	0,891	0,931	1	0,957
217	KOTA DENPASAR - PARTHA KENCANA TOHPATI	0,786	1	0,931	0,946	0,957
218	KOTA DENPASAR - PEDUNGAN	0,791	0,983	0,933	0,947	1
219	KOTA DENPASAR - PICU MANUNGGAL SEJAHTERA	0,8	0,998	1	0,948	0,98
220	KOTA DENPASAR - SRI ARTHA LESTARI	1	0,99	0,936	0,95	0,981
221	KOTA DENPASAR - TATA ANJUNGSARI	0,918	1	0,936	1	1
222	KOTA DEPOK-KARUNIA	0,912	1	0,939	0,963	0,992
223	KOTA JAMBI - PT. BPR ARTHA PRIMA PERSADA	0,917	0,902	0,943	0,989	1
224	KOTA JAMBI - PT. BPR BATANGHARI	0,927	0,904	1	0,993	0,964
225	KOTA JAMBI - PT. BPR KENCANA MANDIRI	1	0,906	0,94	1	0,964
226	KOTA JAMBI - PT. BPR MITRA LESTARI	0,821	0,909	0,94	1	0,964
227	KOTA JAMBI - PT. BPR PRIMA JAMBI MANDIRI	0,821	1	0,94	1	0,964
228	KOTA JAYAPURA - BPR IRIAN SENTOSA	0,859	0,919	0,942	0,964	1
229	KOTA KUPANG-CHRISTA JAYA PERDANA	0,987	0,921	1	0,959	1
230	KOTA KUPANG-TANA OBA LAIS MANEKAT	1	0,92	0,946	0,963	0,986
231	KOTA MADIUN - BPR PEMDA KOTA MADIUN	1	0,918	0,946	1	0,989
232	KOTA MAGELANG- BANK MAGELANG	0,869	1	0,946	0,963	0,989
233	KOTA MAKASAR/HASA MITRA	0,876	0,931	1	0,968	1
234	KOTA MALANG - BPR ARMINDO KENCANA	1	0,927	1	0,991	1

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
235	KOTA MANADO/CELEBES MITRA PERDANA	1	0,927	0,952	0,994	0,971
236	KOTA MANADO/CIPTA CEMERLANG INDONESIA	0,985	0,927	0,952	1	0,971
237	KOTA MANADO/DANA RAYA	0,949	1	0,952	0,964	0,971
238	KOTA PALEMBANG - PT. BPR MULTIDANA MANDIRI	0,961	0,936	0,953	0,964	1
239	KOTA PALEMBANG - PT. BPR SUKASADA	0,98	0,933	1	0,968	1
240	KOTA PALEMBANG - PT. BPR SUMATERA SELATAN	1	0,933	0,962	0,967	0,992
241	KOTA PALEMBANG - PT. BPR TRI GUNUNG SELATAN	1	0,935	0,959	1	0,987
242	KOTA PANGKAL PINANG - PT. BPR UKABIMA LESTARI	0,952	1	0,959	0,972	0,983
243	KOTA PEKALONGAN BPR ARTA UTAMA	0,933	0,98	0,96	0,972	1
244	KOTA PROBOLINGGO - SEMERU SWASTI	0,948	0,955	1	0,975	0,978
245	KOTA PROBOLINGGO - SENTRAL ARTA JAYA	1	0,954	1	0,982	0,978
246	KOTA SALATIGA BPR BANK SALATIGA	1	0,949	0,99	1	0,978
247	KOTA SEMARANG BPR BKK KOTA SEMARANG	0,995	1	0,983	0,973	0,978
248	KOTA SEMARANG BPR GUNUNG KINIBALU	1	0,947	0,987	0,973	1
249	KOTA SEMARANG BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA	1	0,949	1	0,976	0,987
250	KOTA SEMARANG BPR JATENG	1	0,951	0,98	0,986	0,985
251	KOTA SEMARANG BPR KEDUNG ARTO	1	0,953	1	1	0,982
252	KOTA SEMARANG BPR MANDIRI ARTHA ABADI	0,968	1	0,983	1	0,984
253	KOTA SEMARANG BPR MUNCUL ARTHA SEJAHTERA	0,974	0,966	0,994	0,992	1
254	KOTA SEMARANG BPR RESTU ARTHA MAKMUR	0,957	0,961	1	1	0,995
255	KOTA SEMARANG BPR RUDO INDOBANK	1	0,961	0,976	1	0,993
256	KOTA SEMARANG BPR WELERI MAKMUR	1	0,964	0,976	1	0,991
257	KOTA SOLO- BANK SOLO	0,992	1	0,976	1	0,995
258	KOTA SOLO-ADIPURA SANTOSA	0,971	1	0,977	1	1
259	KOTA SOLO-BINALANGGENG MULIA	1	1	1	0,998	0,989
260	KOTA SOLO-REJEKI INSANI	1	1	0,982	1	0,989
261	KOTA SOLO-SABAR ARTHA PRIMA	0,946	0,975	0,982	1	0,989
262	KOTA SURABAYA - BPR JAWA TIMUR	0,946	1	0,982	0,987	0,989
263	KOTA SURABAYA - KARYA PERDANA SEJAHTERA	0,951	0,994	0,984	0,996	1
264	KOTA TANGERANG SELATAN-AKASIA MAS	0,957	0,983	1	0,988	0,993
265	KOTA TANGERANG SELATAN-PRIMA KREDIT MANDIRI	1	0,981	1	0,99	0,993
266	KOTA TANGERANG SELATAN-UNIVERSAL	0,964	0,98	0,995	1	0,993

NO.	NAMA BPR	TE EFISIENSI SAMPEL ATAS				
		2013	2014	2015	2016	2017
267	KOTA TANGERANG-HARIARTA SEDANA	0,964	1	0,996	1	0,993
268	KOTA TASIKMALAYA-ARTHA GALUNGGUNG	0,965	1	0,998	1	1
269	KOTA TEGAL-CENTRAL ARTHA	0,977	0,994	1	0,994	0,996
270	MAJALENGKA-WAHANA SENTRA ARTHA	1	0,994	1	0,994	0,996
271	PURWAKARTA-NUSAMBA PLERED	1	1	1	1	0,996
272	SUBANG-KARYA UTAMA JABAR	1	1	1	1	0,996
273	SUBANG-PAMANUKAN BANGUNARTA	1	1	1	1	1
274	SUMEDANG-NUSAMBA TANJUNGSARI	1	1	1	0,999	1
275	SUMEDANG-SUMEDANG	1	1	1	1	1
276	TASIKMALAYA-ARTHA SUKAPURA	1	1	1	1	1
277	TASIKMALAYA-CIPATUJAH JAWA BARAT	1	1	1	1	1
278	TASIKMALAYA-NUSAMBA SINGAPARNA	1	1	1	1	1

Selanjutnya adalah mendeskripsikan kondisi sampel bawah. Disini terdapat 1.030 BPR.

Selama lima tahun periode penelitian, hanya di 2013 ditemukan BPR dengan efisiensi kurang dari 0,5. Sebanyak 188 BPR efisiensi di bawah 0,5 dan selebihnya tidak ditemukan. Tren yang muncul dalam jumlah BPR efisien di sampel bawah adalah menurun setiap tahunnya namun rata-rata efisiensi terus meningkat.

Tahun 2013 sebagai tahun dengan jumlah BPR efisien terbanyak dan memiliki *range* efisiensi lebih besar. Sebanyak 265 BPR efisien. Memiliki rata-rata efisien sebesar 0,7436 dan terdapat 419 BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata. Dari seluruh BPR sampel bawah, ditemukan sebanyak 188 BPR dengan efisiensi di bawah 0,5 yang tidak ditemukan di tahun-tahun setelahnya. Contoh beberapa BPR yang di bawah rata-rata seperti BPR Ngunut Arta di Kab. Tulungagung dengan efisiensi 0,68, BPR Berkah di Kab. Pendeglang dengan efisiensi 0,591, dan BPR Arta Taman Dayu di Kab. Pasuruan dengan efisiensi 0,6.

Setelah di tahun 2013 jumlah BPR efisien cukup banyak, di tahun 2014 justru mengalami penurunan jumlah BPR efisien. Terdapat selisih yang cukup banyak dari 2013 ke 2014, yakni sebesar 23 BPR. Di tahun 2014 terdapat 242 BPR efisien dengan rata-rata efisiensi 0,8318. Sepanjang tahun 2014 tidak ditemukan BPR dengan efisiensi di bawah 0,5. Namun untuk BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata efisiensi meningkat pesat hingga 79 BPR sehingga terdapat 498 BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata, seperti BPR Tanah Badar di Kab. Lumajang dengan efisiensi 0,723, BPR Sapadhana di Kab. Madiun dengan efisiensi 0,8, dan BPR Rukun Karya Sari di Kab. Lamongan dengan efisiensi 0,716.

Di tahun 2015 kembali terjadi penurunan jumlah BPR efisien. Selisih dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5 BPR, sehingga di 2015 terdapat 237 BPR efisien dengan rata-rata efisiensi sebesar 0,8769. Di tahun ini jumlah BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata meningkat menjadi 500, seperti BPR Suadana di Kab. Gianyar dengan efisiensi 0,784, BPR Artha Asri Mulia di Kab. Jember dengan efisiensi 0,8, dan BPR Laksana Binacilegon di Kab. Cilegon dengan efisiensi 0,779. Artinya banyak BPR efisien yang kemudian menjadi tidak efisien di tahun ini.

Tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan. Jumlah BPR efisien meningkat menjadi 242 dengan rata-rata efisiensi sebesar 0,9072. Berdasarkan rata-rata efisiensi tersebut didapatkan sebanyak 499 BPR kurang dari rata-rata, seperti BPR Jember Lestari di Kab. Jember dengan efisiensi 0,847, BPR Arjawinangun di Kab. Cirebon dengan efisiensi 0,763, dan BPR BPR Bhakti di Kab. Sidoarjo dengan efisiensi 0,893.

Setelah mengalami naik turun, di tahun 2017 kembali terjadi penurunan jumlah BPR efisien menjadi 234 dengan rata-rata efisiensi meningkat dari tahun 2016 menjadi 0,9245. Sementara jumlah BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata turun menjadi 494, artinya BPR sampel bawah tahun 2017 banyak yang memiliki efisiensi antara 0,93 – 1. Contoh beberapa BPR dengan efisiensi di bawah rata-rata adalah BPR Inti Ambarawa Sejahtera di Kab. Semarang dengan efisiensi 0,909, BPR Wedariyaksa di Kab. Pati dengan efisiensi 0,84, dan BPR BPR Beber di Kab. Cirebon dengan efisiensi 0,842.

Pada sampel bawah terdapat 210 BPR dengan yang efisien secara kontinyu selama lima tahun. Beberapa di antaranya adalah BPR Bangil Idaman di Kab. Pasuruan, BPR Lambang Ganda di Kab. Serang, dan BPR Bumi Jaya di Kab. Mojokerto. Berikut daftar lengkap seluruh BPR efisien selama lima tahun.

**Tabel 5.15. Daftar BPR yang Efisien Secara Kontinyu Dalam Lima Tahun**

NO	NAMA BPR
1	BANDUNG BARAT-SINAR MAS PELITA
2	BEKASI-BPR CIKARANG RAHARJA
3	BEKASI-BPR KARYA KURNIA UTAMA
4	BEKASI-BPR SIWA RAHARDJA UTAMA
5	BOGOR-ARTHA JAYA CITEUREUP
6	BOGOR-DANA MANDIRI BOGOR
7	BOGOR-LPK CITEUREUP
8	BOGOR-NUSANTARA BONA PASOGIT 14.
9	CIAMIS-BKPD LAKBOK

<b>NO</b>	<b>NAMA BPR</b>
10	CIANJUR-DANA POS
11	CIREBON-BALDAH SENTOSA
12	CIREBON-CIWARINGIN
13	CIREBON-KARANGSEMBUNG
14	CIREBON-PLUMBON
15	CIREBON-WERU
16	INDRAMAYU-BONGAS
17	JAKARTA PUSAT /ANUGRAH ARTASENTOSA PRIMA
18	JAKARTA PUSAT /SWADAYA TUNGGAL NUSANTARA
19	KAB BANGLI - KINTAMANI PERDANA
20	KAB BIMA - BIMA ABDI SWADAYA
21	KAB CILACAP BPR BANYU ARTHACITRA
22	KAB DELI SERDANG BPR DISKY SURYAJAYA
23	KAB DELI SERDANG BPR MULTI TATA PERKASA
24	KAB DELI SERDANG BPR SOLIDER
25	KAB DEMAK BPR ARTHANUGRAHA MAKMUR SEJAHTERA
26	KAB FLORES TIMUR - BINA USAHA DANA
27	KAB GROBOGAN BPR SEMERU
28	KAB KENDAL BPR ANUGERAH HARTA KALIWUNGU
29	KAB KENDAL BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO
30	KAB KERINCI - PT. BPR PEMBANGUNAN KERINCI
31	KAB KLATEN-PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA
32	KAB KLUNGKUNG - TRI DHARMA PUTRI
33	KAB KUDUS BP KAB KUDUS
34	KAB KUDUS BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA
35	KAB LOMBOK BARAT-PESISIR LAYAR BERKEMBANG
36	KAB LOMBOK TENGAH - TRESNA NIAGA
37	KAB MAGELANG BPR MULYO LUMINTU
38	KAB MATARAM - GRAHA LESTARI
39	KAB PATI BPR ASABAHANA SEJAHTERA
40	KAB PATI BPR TAYU DUTAPERSADA
41	KAB SAROLANGUN - PT. BPR JAMBI CITRA SAHABAT
42	KAB SIMALUNGUN BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 6.
43	KAB TANJUNG JABUNG TIMUR - PD. BPR TANGGO RAJO
44	KAB TEGAL BPR ARTHA KRAMAT
45	KAB TEGAL BPR MEGA ARTHA MUSTIKA
46	KAB TOBA SAMOSIR BPR SURUNGAN NAULI
47	KAB. AGAM - BPR LPN MAGEK
48	KAB. AGAM - BPR TILATANG KAMANG
49	KAB. BADUNG - CAHAYA BINAWERDI

<b>NO</b>	<b>NAMA BPR</b>
50	KAB. BADUNG - KARYA ARTHA SEJAHTERA INDONESIA
51	KAB. BADUNG - KUSUMA MANDALA
52	KAB. BADUNG - MITRA BALI MANDIRI
53	KAB. BADUNG - PRIMA DEWATA
54	KAB. BADUNG - SARI WIRA TAMA
55	KAB. BADUNG - SUAR ARTHA DHARMA
56	KAB. BADUNG - WAHYU NIRMALA
57	KAB. BANDUNG-DUTA ARTHA SEJAHTERA
58	KAB. BANDUNG-KREDIT MANDIRI JABAR
59	KAB. BANDUNG-NUSANTARA BONA PASOGIT 30.
60	KAB. BANGKA - PT. BPR SENTRAL MITRA SEJAHTERA
61	KAB. BANYUMAS-PT. BPR ELESKA ARTHA
62	KAB. BANYUWANGI - BLAMBANGAN MAKMUR
63	KAB. BANYUWANGI - RESTUDHANA CITRASEJAHTERA
64	KAB. BIAK NUMFOR - BPR PHIDECTAMA BIAK
65	KAB. BLITAR - WLINGI PAHALA PAKTO
66	KAB. BONDOWOSO - BINTANG MAS MAESAN
67	KAB. BOYOLALI - PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI
68	KAB. BREBES-PT. BPR BUMIA YU BANGUN CITRA
69	KAB. GIANYAR - BASKARA DEWATA
70	KAB. GIANYAR - NAGA
71	KAB. GIANYAR - SADHU ARTHA
72	KAB. GRESIK - ARINDOMEGAH ABADI
73	KAB. GRESIK - INTAN KITA
74	KAB. GRESIK - RAJADANA MENGANTI
75	KAB. JEMBER - BALUNG ARTHA GUNA
76	KAB. JEMBER - EKA USAHA
77	KAB. JEMBER - NUSAMBA RAMBIPUJI
78	KAB. JEMBER - SURYA KENCANA
79	KAB. JOMBANG - BUMI ARTA
80	KAB. JOMBANG - SURYA ARTHAGUNA ABADI
81	KAB. KARANGANYAR-PT. BPR CITA DEWI
82	KAB. KARANGANYAR-PT. BPR TAWANGMANGU JAYA
83	KAB. KEDIRI - AGRO CIPTA ADIGUNA
84	KAB. KEDIRI - BUMIDINAR KENCANA
85	KAB. KEDIRI - TANJUNG TANI
86	KAB. KLATEN - PT. BP GUNUNG LAWU
87	KAB. KLATEN - PT. BPR GUNUNG MAS
88	KAB. LAMONGAN - DAMATA ARTHANUGRAHA
89	KAB. LAMPUNG SELATAN - PT. BPR DANA MASTER BAHTERA



<b>NO</b>	<b>NAMA BPR</b>
90	KAB. LAMPUNG TIMUR - PT. BPR FAJAR WARAPASTIKA
91	KAB. LIMAPULUH KOTO - PT. BPR DHARMA PEJUANG EMPAT LIMA
92	KAB. MADIUN - ARTA NAWA
93	KAB. MAGETAN - MULYO RAHARJO
94	KAB. MALANG - ARTHA WIWAHA ARJUNA
95	KAB. MALANG - DAU ANUGERAH
96	KAB. MALANG - EKA DANA UTAMA
97	KAB. MALANG - KRIDADHANA CITRANUSA
98	KAB. MALANG - SADHYA MUKTIPARAMA
99	KAB. MALUKU TENGGARA - BPR ARTHA TUAL
100	KAB. MOJOKERTO - BUMI JAYA
101	KAB. MOJOKERTO - SEJAHTERA
102	KAB. OGAN ILIR - PT. BPR CINTA MANIS AGROLOKA
103	KAB. PAMEKASAN - PAMEKASAN PURAPERSADA
104	KAB. PASAMAN-PT. BPR SEMBILAN MUTIARA
105	KAB. PASURUAN - BANGIL IDAMAN
106	KAB. PASURUAN - KALIMASADA
107	KAB. PASURUAN - PURWOSARI ANUGERAH
108	KAB. PONOROGO - ASWAJA
109	KAB. PROBOLINGGO - BENUA KRAKSAAN
110	KAB. SEMARANG-BPR DANA MITRA SETOSA
111	KAB. SEMARANG-BPR KLEPU MITRA KENCANA
112	KAB. SEMARANG-BPR PERSADA GANDA
113	KAB. SERANG- LAMBANG GANDA
114	KAB. SIDOARJO - PT. BPR ARTA WARU SURYA
115	KAB. SIDOARJO - PT. BPR BUANA DANA MAKMUR
116	KAB. SIDOARJO - PT. BPR DANUMAS BINADHANA
117	KAB. SIDOARJO - PT. BPR GEMA NUSA
118	KAB. SIDOARJO - PT. BPR MEGAKERTA SWADIRI
119	KAB. SIDOARJO - PT. BPR PURIDANA ARTAMAS
120	KAB. SIDOARJO - SENTRA DANA MAKMUR
121	KAB. SIDOARJO - SURABAYA LESTARI
122	KAB. SIDOARJO - VITA JASAGUNA
123	KAB. SITUBONDO - ARTHA WARINGIN JAYA
124	KAB. SRAGEN-PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI
125	KAB. SUKOHARJO-PT. BPR BEKONANG SUKOHARJO
126	KAB. SUKOHARJO-PT. BPR KARTASURA MAKMUR
127	KAB. SUKOHARJO-PT. BPR SURYA UTAMA
128	KAB. TABANAN-AYUNULUS
129	KAB. TABANAN-KARUNIA DEWATA
130	KAB. TABANAN-SARI DANANIAGA
131	KAB. TANGERANG-ARTHA MITRA USAHA

<b>NO</b>	<b>NAMA BPR</b>
132	KAB. TANGERANG-INDOSURYA DAYA SUKSES
133	KAB. TANGERANG-MARCOINDO PERDANA
134	KAB. TANGERANG-RAGAM PERANMANDIRI
135	KAB. TRENGGALEK - ARTHA PANGGUNG PERKASA
136	KAB. TULANG BAWANG - PT. BPR CEMPAKA MITRA USAHA
137	KAB. TULUNGAGUNG - HAMBANGUN ARTHA SELARAS
138	KAB. WONOSOBO - PT. BPR PUSPA KENCANA
139	KABUPATEN BANJAR /SIMPANG EMPAT
140	KABUPATEN BANTUL /KURNIA SEWON
141	KABUPATEN BULELENG/CAHAYA BINA PUTRA
142	KABUPATEN GUNUNG KIDUL /UKABIMA NINDYA RAHARJA
143	KABUPATEN KAMPAR /BUMI RIAU INSANI
144	KABUPATEN MINAHASA /MAPALUS TUMETENDEN
145	KABUPATEN PARIGI MOUTOG/SULAWESI KARYA SENTOSA
146	KABUPATEN PEKAN BARU/FIANKA REZALINA FATMA
147	KABUPATEN PEKAN BARU/PRIMA RIAU SENTOSA
148	KABUPATEN PELAWAN /DANA AMANAH
149	KABUPATEN ROKAN HULU /ROKAN HULU
150	KABUPATEN SLEMAN /BERLIAN BUMI ARTA
151	KABUPATEN SLEMAN /NATASHA BINTANG ANUGRAH
152	KABUPATEN SLEMAN /WIJAYA MULYA SANTOSA
153	KABUPATEN TANAH LAUT /PELAIHARI
154	KABUPATEN TEMANGGUNG/KEDU ARTHA SETIA
155	KARAWANG-GEMA ESAMAS ABADI
156	KARAWANG-SANGGABUANA AGUNG
157	KARAWANG-TRISURYA TATA ARTHA
158	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR AJI CAKA
159	KOTA BANDAR LAMPUNG - PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI
160	KOTA BANDUNG-BINA MAJU USAHA
161	KOTA BANDUNG-NATA CITRAPERDANA
162	KOTA BANDUNG-SENTRAL INVESTASI
163	KOTA BATU - ARTATAMA SEJAHTERA
164	KOTA BATU - TRIPAKARTI DHANATAMA
165	KOTA BEKASI-ANA ARTHA
166	KOTA BEKASI-BINTARA PRATAMA SEJAHTERA
167	KOTA BEKASI-DIAN FARAQO GEMILANG
168	KOTA BEKASI-KARYA BAKTI SEJAHTERA
169	KOTA BEKASI-METROPOLITAN PUTRA
170	KOTA BEKASI-SINAR TERANG

<b>NO</b>	<b>NAMA BPR</b>
171	KOTA BEKASI-VARIA CENTRAL ARTHA
172	KOTA BOGOR-MITRA DAYA MANDIRI
173	KOTA CIMAHI-DANAMASA CIMAHI
174	KOTA DENPASAR - DUTA BALI
175	KOTA DENPASAR - SHRI GANGGA BALI
176	KOTA DEPOK-ARTHAKELOLA CAHAYATAMA
177	KOTA DEPOK-DANABERKAH LESTARI
178	KOTA DEPOK-LAKSANA BINACIMANGGIS
179	KOTA DEPOK-NARWASTU MIKRO PERKASA
180	KOTA DEPOK-TAPEUNA DANA
181	KOTA JAMBI - PT. BPR CITRA DARMA WANGSA
182	KOTA JAYAPURA - BPR PAPUA MANDIRI MAKMUR
183	KOTA KEDIRI - BPR MAHKOTA MITRA USAHA
184	KOTA LHOKSEUMAWE BPR SABEE MEUSAMPEE
185	KOTA MAGELANG- BKK KOTA MAGELANG
186	KOTA MAKASAR/SULAWESI MANDIRI
187	KOTA MALANG - BPR PUTERA DANA
188	KOTA MANADO/NUSA UTARA
189	KOTA PALEMBANG - PT. BPR MUSI ARTHA SURYA
190	KOTA PALOPO/PUTRA NIAGA MANDIRI
191	KOTA PEKALONGAN SEJAHTERA ARTHA SEMBADA
192	KOTA SEMARANG BPR ADIL JAYA ARTHA
193	KOTA SEMARANG BPR ESTETIKA ARTHA GUNA
194	KOTA SEMARANG BPR SINAR MITRA SEJAHTERA
195	KOTA SOLO-SUKADYARINDANG
196	KOTA SUKABUMI-KOTA SUKABUMI
197	KOTA SURABAYA - KOSANDA
198	KOTA TANGERANG SELATAN-MARENSABANK
199	KOTA TANGERANG-BUMIDHANA
200	KOTA TANGERANG-DANA NIAGA
201	KOTA TANGERANG-MITRABINA ARTHAMAKMUR
202	KOTA TASIKMALAYA-ARTHA JAYA MANDIRI
203	KOTA TEGAL-BP KOTA TEGAL
204	SUBANG-GEDE ARTAGUNA
205	SUBANG-TATA ASIA
206	SUMEDANG-KARPANA TASIA
207	TASIKMALAYA-MITRA KOPJAYA MANDIRI
208	TASIKMALAYA-NUSANTARA BONA PASOGIT 31.
209	TASIKMALAYA-NUSUMMA SINGAPARNA
210	TASIKMALAYA-SAHAT SENTOSA

## 5.2. Luaran yang Dicapai

Luaran dari penelitian ini adalah buku dan publikasi di jurnal nasional dan internasional. Secara rinci luaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.16. Target Luaran Penelitian**

No	Jenis Luaran	Nama Jurnal	Judul	Status
1	Jurnal Internasional Bereputasi	Economic Development and Cultural Change (Scopus Q1)	Measuring Performance of Islamic Microfinance in Promoting Microenterprises in Indonesia	<i>Submitted</i>
2	Visiting Lecturer	University Technology Petronas Malaysia	Performance of Islamic Co-operatives in Indonesia	Terlaksana
3	Buku Referensi (ISBN 978-602-336-622-4)	-	Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi	Terbit
4	Buku Referensi (ISBN)	-	Profil BPRS di Indonesia	Draft

Luaran utama dari penelitian ini adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Dalam hal ini, peneliti telah mengunggah manuskrip di *Economic Development and Cultural Change* (Scopus Q1) per 15 Desember 2018.

*Guest Lecturer* dilakukan secara bersamaan dengan *student* dan *staff outbound* Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dengan University Technology Petronas (UTP), Malaysia. Kegiatan ini dilakukan pada Senin, 27 Agustus 2018. Peserta kuliah tamu ini adalah 30 mahasiswa Unair-UTP dan dua dosen dari UTP.

**BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Rencana tahap berikutnya dari penelitian ini adalah menyelesaikan pencapaian target luaran. Secara rinci rencana tahapan berikutnya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1. Rencana Tahapan Berikutnya**

No	Jenis Luaran	Nama Jurnal	Judul	Status
1	Jurnal Internasional Bereputasi	Economic Development and Cultural Change (Scopus Q1)	Measuring Performance of Islamic Microfinance in Promoting Microenterprises in Indonesia	<i>Accepted</i>
2	Visiting Lecturer	University Technology Petronas Malaysia	Performance of Islamic Co-operatives in Indonesia	Terlaksana
3	Buku Referensi (ISBN 978-602-336-622-4)	-	Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi	Terbit
4	Buku Referensi (ISBN)	-	Profil BPRS di Indonesia	Terbit



## BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1. Kesimpulan

Sebanyak 114 BPRS yang dijadikan sampel penelitian setelah diseleksi sesuai dengan kriteria sampel yang digunakan. Secara keseluruhan, dengan pendekatan intermedia jumlah BPRS dengan tingkat efisiensi sama dengan 1 (satu) lebih sedikit dibandingkan dengan pendekatan produksi. Rata-rata BPRS di Indonesia beroperasi tidak efisien. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor efisiensi dari hasil perhitungan menunjukkan angka 55%-58% selama lima tahun. Dari seluruh BPRS sampel, ditemukan paling banyak 59 BPRS yang memiliki skor efisiensi yang ada di bawah rata-rata efisiensi di tahun tersebut. Tahun 2013 rata-rata nilai efisiensi sebesar 58,48% atau 0,5848.

Jumlah BPR yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 1.308 dari 1.619 BPR di seluruh Indonesia atau sebesar 80,8% dari jumlah populasi. Setelah dilakukan uji efisiensi pada 1.308 BPR selama periode lima tahun dengan menggunakan pendekatan intermediasi, maka dihasilkan bahwa jumlah BPR yang efisien tidak mencapai angka 4% dari total keseluruhan jumlah BPR. Paling banyak dihasilkan di tahun 2014, dimana terdapat sebanyak 35 BPR yang efisien dari 1.308 BPR. Berdasarkan temuan ini, maka perlu dilakukan pembinaan kepada BPR agar dapat berjalan efisien.

### 7.2. Saran

Penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis performa Lembaga keuangan mikro yang berbentuk non bank.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of Baitul Maal. *Humanomics* , 31 (2), 160-182.
- Akbar, R. A. (2010). Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA): Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah pada Tahun 2009). *Skripsi tidak diterbitkan*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Akram, W., Shan, S., Shaikh, S., & Yashkun, U. U. (2016). Determinants of Microfinance Institutions' Efficiency in South Asia during Financial Crisis: A Two-Stage Analysis. *Pakistan Journal of Social Science* , 36 (2), 1089-1099.
- Ameer. (2016). Measuring the Outreach Performance of Interest-Free Microfinance: A Theoretical Framework. *Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management and Technology* , 5 (4), 45-51.
- Awaworyi, S. K., & Marr, A. (2014). Sustainability and Outreach: A Comparative Study of MFIs in South Asia and Latin America and the Caribbean. *Monash University Business and Economics Discussion Paper* .
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi, 2006-2015*. Dipetik Juni 12, 2017, dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1314>
- Bank Indonesia. (2016). Dipetik Juni 12, 2017, dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Konvensional: <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-konvensional/Default.aspx>
- Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. *Management Science* , 1078 - 1092 .
- Beck, T., & Hesse, H. (2006). Foreign Bank Entry, Market Structure and Bank Efficiency in Uganda. *World Bank Policy Research Working Paper* .
- Berger, A. H. (1997). Efficiency of Financial Institutions; International Survey and Directions for Future Research. *European Journal of Operational Research* , 98 (2), 175 - 212.
- Bikker, J. A., & Hu, H. (2002). Cyclical Patterns in Profits, Provisioning, and Lending of Banks Pro-cyclicality of the New Basel Capital Requirements. *BNL Quarterly Review* , 221, 143-175.
- Bourke, P. (1989). Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia. *Journal of Banking and Finance* , 13, 65-79.
- Chirwa, E., & Mlachila, M. (2004). Financial Reforms and Interest Rate Spreads in the Commercial Banking System in Malawi. *IMF Staff Papers* , 51 (1), 96-122.
- Eko, Y. (2011). Pengukuran Tingkat Efisiensi Bank-Bank Umum di Indonesia (2000- 2007): Aplikasi Data Envelopment Analysis (DEA) dan Tobit Analysis. *Jurnal Riset Ekonomi* , 3 (1), 1-19.
- Ferdousi, F. (2013). Performance of Microfinance Institutions in Asia: DEA Based Efficiency Analysis. *International Conference on the Modern Development of Humanities and Social Science* (hal. 91-94). Atlantis Press.

- Flamini, V., McDonald, C., & Schumacher, L. (2009). Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa. *IMF Working Paper* .
- Georgievska, L., Kabashi, R., Trajkovska, N. M., Mitreska, A., & Vaskov, M. (2011). Determinants of Lending Interest Rates and Interest Rate Spreads. *SEE Workshop - Bank of Greece* (hal. 5-45). Athens: Bank of Greece Printing Works.
- Guillen, J., Erick, W. R., & Emre, O. (2014). Relative Power and Efficiency as a Main Determinant of Banks' Profitability in Latin America. *Borsa Istanbul Review* , 14, 1-7.
- Hajkova, D., & Hurnik, J. (2007). Cobb-Douglas Production Function: The Case of a Converging Economy. *Czech Journal of Economics and Finance* , 57, 465-476.
- Hendrojogi. (2015). *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. Jakarta: Pusat Kebijakan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementrian Perdagangan.
- Kurnia, A. S. (2004). Mengukur Efisiensi Intermediasi Sebelas Bank Terbesar Indonesia Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Bisnis Strategi* , 13, 126-140.
- Liu, H., & Wilson, J. O. (2010). The Profitability of Banks in Japan. *Applied Financial Economics* , 20 (24), 1851-1866.
- Masngudi. (1990). *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi.
- Matyas, L., & Sevestre, P. (2008). *The Econometrics of Panel Data*. Verlag Berlin Heidelberg: Springer.
- Moulyneux, P., & Thornton, J. (1992). Determinants of European Bank Profitability: A Note. *Journal of Banking and Finance* , 16, 1173-1178.
- Nouaili, M., Abaoub, E., & Ochi, A. (2015). The Determinants of Banking Performance in Front of Financial Changes: Case of Trade Banks in Tunisia. *International Journal of Economics and Financial* , 5 (2), 410-417.
- Ochola, P. (2016). Two-Stage Study of Efficiency of Savings and Credit Cooperatives. *International Journal of Economics, Commerce and Management* , 4 (4), 1106-1123.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Dipetik Juni 12, 2017, dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>
- Pasiouras, F., Kosmidou, K., & Tsaklanganos, A. (2007). Domestic and Multinational Determinants of Foreign Bank Profits: The Case of Greek Banks Operating Abroad. *Journal of Multinational Financial Management* , 7, 1-15.
- Pasouras, F., & Kosmidou, K. (2007). Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union. *Research in International Business and Finance* , 21 (2), 222-237.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Short, B. (1979). The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe and Japan. *Journal of Banking and Finance* , 3 (3), 209-219.

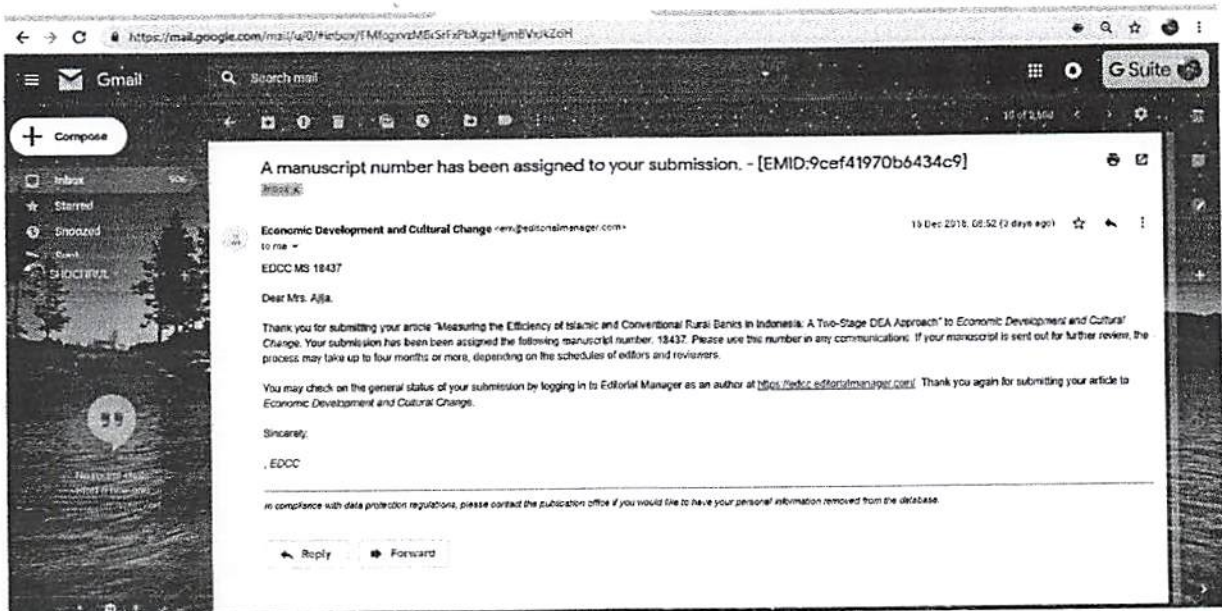


- Smirlock, M. (1985). Evidence on the (Non) Relationship Between Concentration and Profitability in Banking. *Journal of Money, Credit, and Banking* , 17, 69-83.
- Syamni, G., & Majid, M. S. (2016). Efficiency of Saving and Credit Cooperative Units in North Aceh, Indonesia. *Signifikan* , 5 (2), 99-118.
- Tesfamariam, K., Tesfay, H., & Tesfay, A. (2013). Relative Efficiency of Rural Saving and Credit Cooperatives: An Application of Data Envelopment Analysis. *International Journal of Cooperative Studies* , 2 (1), 16-25.
- USAID. (2006). *Evaluating MFI's Social Performance: A Measurement Tool*. The United States Agency for International Development.
- Vujcic, B., & Jemric, I. (2001). *Efficiency of Banks in Transition: A DEA Approach*. Dubrovnik: Croatian National Bank.
- Wasiaturrahma, & Ajija, S. R. (2016). Evaluating Financial Sustainability of Public Woman Cooperatives in East Java. *Asia International Conference*. Kuala Lumpur: Asia International Conference.

## Lampiran 1

## SUBMISSION ARTIKEL KE JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

Bukti *submit* manuskrip penelitian ini pada *Economic Development and Cultural Change* adalah sebagai berikut:



## Bukti Pengunggahan Manuskrip di Jurnal Internasional Bereputasi

**Economic Development and Cultural Change**  
**Measuring the Efficiency of Islamic and Conventional Rural Banks in Indonesia: A Two-Stage DEA Approach**  
**–Manuscript Draft–**

Manuscript Number:	
Full Title:	Measuring the Efficiency of Islamic and Conventional Rural Banks in Indonesia: A Two-Stage DEA Approach
Article Type:	Article
Keywords:	
Corresponding Author:	Shochrul Rohmatul Affa, M.Ec Universitas Airlangga Surabaya, East Java INDONESIA
Corresponding Author Secondary Information:	
Corresponding Author's Institution:	Universitas Airlangga
Corresponding Author's Secondary Institution:	
First Author:	Wasiaturahma Wasiaturahma, Doctor
First Author Secondary Information:	
Order of Authors:	Wasiaturahma Wasiaturahma, Doctor Shochrul Rohmatul Affa, M.Ec
Order of Authors Secondary Information:	
Manuscript Region of Origin:	INDONESIA
Abstract:	This study aims to analyse the efficiency of Islamic and conventional rural banks in Indonesia. Using a two-stage DEA approach the results reveal overall, with the intermediation approach, the number of BPRS with an efficiency level equal to 1 (one) is less than the production approach. In addition, the efficiency conditions in BPR using the production approach are better than the intermediation approach.

## **Measuring the Efficiency of Islamic and Conventional Rural Banks in Indonesia: A Two-Stage DEA Approach**

### **ABSTRACT**

This study aims to analyse the efficiency of Islamic and conventional rural banks in Indonesia. Using a two-stage DEA approach the results reveal overall, with the intermediation approach, the number of BPRS with an efficiency level equal to 1 (one) is less than the production approach. In addition, the efficiency conditions in BPR using the production approach are better than the intermediation approach.

**Keywords:** Efficiency, Rural Bank, Indonesia, DEA

### **1. Introduction**

Rural Bank, so called as *Bank Perkreditan Rakyat* (BPR) is one type of Macro Finance Institutions (MFIs) that develop in Indonesia. With the issuance of Law No. 7 of 1992 as amended to Act No. 10 of 1998 concerning Banking, the BPR officially operates in Indonesia. In the Act, it is explained that BPRs are banks that carry out business activities in a conventional manner and are based on sharia principles (so called as *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/ BPRS*) that do not provide services in payment traffic in their activities. Thus, the rural banks have several differences with Commercial Banks. First, they have capital requirements that are much smaller than Commercial Banks. Second, their target is to serve the credit needs of farmers, farmers, fishermen, small traders, employees, retirees, and other layers of society that have not been reached by commercial banks so that they are not trapped by moneylenders (Iswandari & Anan, 2015). The total MSME loans disbursed by BPRs and BPRS continues to increase, that is from 30.65 Trillion Rupiah in 2013 to 46.68 Trillion Rupiah in 2017. In addition, they also have specific business activities that serve MSMEs and aim to help build the local economy (Wahyuni, Sukarsa, & Yuliarmi, 2014). Therefore, the services provided by the rural banks are not as complete as those offered by commercial banks services such as insurance, credit cards, demand deposits and foreign exchange.

According to Indonesia Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan/OJK*), there were 167 Sharia Rural Banks and 1,619 Rural Banks throughout Indonesia in 2017. Distribution of Sharia and Conventional Rural Banks in Indonesia is still dominated in western Indonesia. Ten provinces with the highest number of BPR are in East Java, West Java, Central Java, Bali, West Sumatra, Banten, North Sumatra, D.I Yogyakarta, Kep. Riau, and Riau. While for the ten provinces with the lowest number of BPR are in Central Sulawesi, Bengkulu, Central Kalimantan, Nangroe Aceh Darussalam, West Papua, Gorontalo, Bangka Belitung, North Maluku, Maluku, and West Sulawesi.

Looking at the number of rural banks in Indonesia that are thousands compared to Sharia rural banks that are still hundreds, the two financial institutions are actually too early to compare. However, if seen from the distribution of the number of institutions, BPRs and BPRS have similarities. The pattern formed is that BPR and Sharia BPR are mostly located in Java and western Indonesia, while in parts of central and eastern Indonesia are very few. Most of

BPRS are in East Java, West Java, Central Java, Special Region of Yogyakarta, Lampung, Aceh, Banten, North Sumatera, South Sulawesi, and West Sumatera respectively.

Even though the rural banks as kind of MFIs main task should be to help MSMEs, however, they may face a tradeoff between their objectives. Kar (2010) mentions that MFIs have been constrained by dual operational purposes; those are to serve the poor (social commitment) and to reach sustainability (financial performance). Thus, in order to pursue the success of MFIs, those two goals must be reckoned up while evaluating their performance. This is because the ramifications of these two aims are mutually exclusive and causing a mission drift – that is, escalated profit motivation supports in procuring financial sustainability but at the cost of the exclusion of the poor (Cull et al, 2007).

Researches on the performance of MFI already has been prolific conducted by many scholars such as Schreiner (1996), Morduch (2002), IFAD (2006), Joeveer et al (2006), Shrader et al (2006), Cull et al (2007), Jr and Morduch (2007), Dokulilova et al (2009), Roodman and Jonathan Morduch (2009), and Kar (2010). Most of those studies however are concerned on interest-based MFIs in such countries, i.e. Bangladesh, Bolivia and Indonesia. Investigations regarded interest-free-based MFIs have not much effusively been explored (see for example Parveen, 2009) whereby many Muslim countries have been introducing Islamic-MFI (i-MFI) such as Jordan in 1978, Indonesia in 1984, Malaysia in 1993 and Yemen in 1997 (Cokro and Abdul Ghafar, 2006).

This research, therefore, aims to evaluate the efficiency of both conventional and Islamic rural banks in Indonesia since last five years especially after OJK especially after the OJK officially operates, i.e. 2013 to 2017. In the second part, this paper presents some literature reviews about efficiency analysis on financial institutions. Section 3 describes research data and methods for evaluating the rural banks' efficiency. Section 4 provides the findings and discussion, then last section summaries the findings and their implications.

## Literature Review

### The Concept of Microfinance

There is actually no single definition of microfinance (European Banking Federation, 2010). It accords heterogeneous typical and has distinct aims that differ according to the divergent contexts in which it has been applied. European Banking Federation accordingly states that 'microfinance within the European banking industry refers to small loans (*microcredit* or *micro-loans*) and to small commercial customers (*micro-entities*)'. Ledgerwood (1999) explains briefly that microfinance refers to 'the provision of financial services to low income clients, including self-employed, low income entrepreneurs in both urban and rural areas'.

Meanwhile, Karlan and Nathanael Goldberg (2007) differentiate the term microfinance with microcredit while people usually claim the similarities between the two. Microfinance by its name clearly is about more than just credit, otherwise it should be called as microcredit. Microfinance actually should has at least nine traditional features: 1) small transactions and minimum balances (whether loans, savings or insurance); 2) loans for entrepreneurial activity; 3) collateral-free loans; 4) group lending; 5) target poor clients; 6) target female clients; 7) simple application processes; 8) provision of services in underserved communities; and 9) market-level interest rates.

In line with Karlan and Nathanael Goldberg (2007), Ledgerwood (1999) has emphasized that microfinance is not simply banking as well but a development tool. Consequently, microfinance activities mostly embrace some particular characteristics: 1) small

loans which are typically for working capital; 2) informal appraisal of borrowers and investments; 3) collateral substitutes, such as group guarantees or compulsory savings; 4) access to repeat and larger loans based on repayment performance; 5) streamlined loan disbursement and monitoring; and 6) secure savings products.

Furthermore, Ledgerwood (1999) also explains that the goal of MFIs as development organizations is 'to service the financial needs of un-served or underserved markets as a means of meeting development objectives'. The development objectives typically incorporate with one or more of the following: 1) to reduce poverty; 2) to empower women or other disadvantaged population group; 3) to create employment; 4) to help existing business grow or diversify their activities; and 5) to encourage the development of new business.

Ledgerwood (1999) as well as Cull *et al.*, (2007) therefore state that microfinance has two long-term goals, namely *outreach* and *sustainability*. Outreach means serving those who have been consistently underserved by financial institutions such as women, the poor, and indigenous and rural populations, whereas *sustainability* is generating adequate revenue to cover the costs of providing financial services. Hinging on which target market has been selected, there are subsequent to MFI's financial position, because costs will be contrived. MFIs consequently face trade-offs involved in the decisions about reaching those objectives simultaneously.

### **The Evolution of Microfinance**

Ledgerwood (1999:2-3) has voiced that microfinance had come to light in the 1980s as a reaction to skepticisms and research verdicts about state distribution of subsidized credit to poor farmers. In order to provide subsidized agricultural credit, therefore governments and international donors set up credit unions encouraged by the Raiffeisen model flourished in Germany in 1864 which was mostly focused on savings mobilizations in rural areas in an attempt to "teach poor farmers how to save".

In the beginning of the mid-1980s, however, the subsidized credit model backed up by many donors got many censures because most programs accumulated large loan defaults and entailed regular recapitalization to persevere operating. At the same time, therefore, local non-governmental organizations (NGOs) and banks initiated to find a more long-term method than the unsustainable income generation approaches to society development such as Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa in Indonesia; the way with a pilot group lending scheme for landless people in Asia pioneered by Dr. Mohammed Yunus and generated to be Garmen Bank today; the development of solidarity group lending to urban vendors in Latin America supported by ACCION International; and a prosperous credit and training system for individual micro-entrepreneurs developed by Fundacion Carvajal.

The field of microfinance accordingly has widened substantially since 1980s. This is because the donors tirelessly support and invigorate microfinance activities concentrating on MFIs that are passionate to obtain substantial outreach and financial sustainability. Consequently, the MFIs today have been focused on providing financial services only whereas the 1970s and much of the 1980s were distinguished by an integrated package of credit and training. Most currently, United Nations Development Programme (UNDP) (1999) as well as Cokro and Abdul Ghafar (2006) also affirms that microfinance NGOs including Fundacion para la Promocion y Desarrollo de la Microempresa (PRODEM) in Banco Solidario (BancoSol) Bolivia, Kenyan Rural Enterprise Programme (K-Rep) in Kenya; and ADEMI/BancoADEMI in the Dominican Republic have been transformed into formal financial institutions which issue saving services to their clients and to access market funding sources rather than trust in donor funds.

## Life Cycle Theory of Microfinance

Bogan (2009) referring to de Sousa-Shields (2004) has claimed that by focusing on the funding sources, the life cycle theory can be applied in order to analyze the MFI development. This is because according to this framework, most of MFIs start out as NGOs with a social vision, funding operations with grants and concessional loans from donors and international financial institutions that effectively serve as the primary source of risk capital for the microfinance sector. Therefore, most literature on microfinance tends to devote the process of “NGO transformation” as a life cycle model outlining the evolution of a MFI. In the formative stage of MFI, donor grants and “soft loans” take a major proportion of the funding. As the MFI matures, private debt capital becomes available but the debt structures have restrictive covenants and/or guarantees. In the last stage of MFI evolution, traditional equity financing becomes available.

## The System Framework and Model of Microfinance

Since microfinance entails a mix of “business” and “development”, Ledgerwood (1999) has categorized the system framework of microfinance into four broad classifications of services. Those are *financial intermediation* (providing the financial products and services), *social intermediation* (erecting the human and social capital involved by sustainable financial intermediation for the poor), *enterprise development services* (expediting micro-entrepreneurs through nonfinancial services), and *social services* (escalating the well-being of micro-entrepreneurs through nonfinancial services).

The intensity to which an MFI provides each of those services relies on whether it obtains a “minimalist” or “integrated” approach. The MFI would be *minimalist* when it is putting forward in solitary financial intermediation or *integrated* while it is offering both financial intermediation and other services. The MFIs which select the minimalist proposition however may occasionally propose restricted social intermediation services. On the other hand, the MFI which choose the integrated approach tackles a more holistic sight of the client. Consequently, those MFIs which take the integrated method should concern in such particular issues. First, providing financial and nonfinancial services are two contrasting actions which usually encourage the institution to engage in conflicting purposes. Second, the clients are usually confused because they cannot differentiate “social service” which is usually free and “financial service” which must be paid for especially while they accept both services from the same organization. Third, MFIs generally offer many services which create the difficulties identifying and controlling the costs per services; and fourth, nonfinancial services usually are not financially sustainable.

## Data and Research Methods

### Data

The data used in this study are secondary data obtained from the financial statements of each BPR and BPRS throughout Indonesia for the last five years starting from 2013 to 2017 which have been available on the pages of the Financial Services Authority. Rural Banks and Sharia Rural Banks that do not have complete financial statements for the last five years are not used as research samples. Based on data compiled by OJK, up to 2017 there were 167 SRBs and 1,619 rural banks spread across Indonesia. After being categorized according to the sample conditions, 1,308 BPRs and 114 BPRS were used as research samples.

Sidoarjo Regency and Badung Regency are the districts with the highest number of BPR samples. The total number of BPRs in Sidoarjo Regency is 55 units, but only 50 units have complete financial reports from 2013 to 2017. In Badung Regency, Bali the total number of BPRs was 51 units but only 49 met the sample criteria. If in the districts and cities in Java Island have many rural banks that meet the sample criteria, this is inversely proportional to rural banks outside Java, especially in Kalimantan, Maluku and other central and eastern parts of Indonesia. Many only have one to two BPRs that have stood for more than five years.

Most BPR samples come from Java. This is due to the large number of people who are mostly in Java and the economy is growing rapidly. The condition of the number of BPRS samples is different from BPR. The largest number of each district or city is a maximum of 5 that meet the sample criteria. However, the largest number of samples still exists around Java. In Bandung and Sleman Regencies up to 2017 there are 5 (five) BPRS that all of them are at least five years old and the financial statements are complete so that all are declared eligible to be used as research samples.

Of the 167 BPRS that were used as research samples, the majority came from districts or cities that had each of the appropriate BPRS. Only a few regencies and cities have BPRS that match above two. The size of the area does not affect the number of samples BPRS. This is evidenced by the fact that the City of Surabaya has only one BPRS that is considered to be in accordance with the research objectives.

## Research Methods

Measurement of Conventional and Sharia rural bank efficiency is carried out using a non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA). According to Carbone (2000), study on piecewise-linear convex hull approach to frontier estimation had been proposed firstly by Farrell (1957). However, this method had not been receiving wide attention from many authors until a paper by Charnes, Cooper and Rhodes (1978) which coined the term *data envelopment analysis* (DEA) using constant return to scale (CRS) was promoted. The next researchers who develop DEA are Banker, Charnes and Cooper in 1994 using variable return to scale (VRS). Furthermore, these two studies are well known as CCR and BCC alternately.

Charnes, Cooper, and Rhodes (CCR) (1978) proposed DEA and defined it as a “mathematical programming model applied to observational data (that) provides a new way of obtaining empirical estimates of relations – such as the production functions and/or efficient production possibility surfaces – that are cornerstones of modern economics” (Cooper, *et.al.*, 1990). For further explanation, Cooper, *et.al.*, (1990) justified DEA as a “relatively new data oriented approach for evaluating the performance of a set of peer entities called Decision Making Units (DMUs) which convert multiple inputs into multiple outputs”. The DMUs include various forms such as hospitals, universities, cities, courts, business firms and others.

Cooper, *et.al.*, (1990) stated that the concept of CCR work i.e. DEA can be understood by assuming  $n$  DMUs that can be evaluated. Each DMU consumes varying amounts of  $m$  different inputs to produce  $s$  different outputs. Specifically,  $DMU_j$  consumes amount  $x_{ij}$  of input and  $i$  produces amount  $y_{rj}$  of output  $r$ ; whereas  $x_{ij} \geq 0$  and  $y_{rj} \geq 0$ . Besides, each DMU has at least one positive input and one positive output value.



Basically, CCR construction could be interpreted as “the reduction of the multiple-output/multiple-input situation (for each DMU) to that of a single ‘virtual’ output and ‘virtual’ input (Cooper, *et.al*, 1990). Mathematically, it can be symbolized as following equation.

$$\max h_0(u, v) = \frac{\sum_r u_r y_{r0}}{\sum_i v_i x_{i0}} \tag{1}$$

Subject to

$$\frac{\sum_r u_r y_{rj}}{\sum_i v_i x_{ij}} \leq 1 \text{ for } j = 1, \dots, n, \quad u_r, v_i \geq 0 \text{ for all } i \text{ and } r.$$

where  $u_r$  and  $v_i$  are the variables;  $y_{r0}$  and  $x_{i0}$  are the observed output and input values of  $DMU_0$ . According to Kabnurkar (2001), this model is “an extension of the ratio technique used in traditional efficiency measurement approaches. The measure of efficiency of any DMU is obtained as the maximum of a ratio of weighted output to weighted input subject to the condition that similar ratios for every DMU be less than or equal to unity”. The DMU said to be efficient if the efficiency ratio is close to 1, vice versa.

Model (3) is a fractional programming problem (Kabnurkar, 2001). It is computationally intractable when the number of DMUs ( $n$ ) is large and the number of inputs ( $m$ ) and outputs ( $s$ ) is small. Following the Charnes-Cooper transformation (1962), one can select a representative solution  $(u, v)$  for which

$$\sum_{i=1}^m v_i x_{i0} = 1 \tag{2}$$

to obtain a linear programming problem that is equivalent to the linear fractional programming problem. Thus, by referring to Charnes *et.al*, (1978), Jemric and Vujcic (2002) derived the Equation (1) into a linear programming form as follows:

$$\begin{aligned} \max_u z_0 &= \sum_{r=1}^s u_r y_{r0} \\ \text{Subject to: } &\sum_{r=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \leq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ &\sum_{i=1}^m v_i x_{i0} = 1 \\ &u_r \geq 0, \quad r = 1, 2, \dots, s \\ &v_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned} \tag{3}$$

For above linear programming problem, the dual of equation (1) is:

$$\begin{aligned} \min_{\lambda} z_0 &= \Theta_0 \\ \text{Subject to: } &\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0} \quad ; r = 1, 2, \dots, s, \\ &\Theta_0 x_{i0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \geq 0 \quad ; i = 1, 2, \dots, m \\ &\lambda_j \geq 0 \quad ; j = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \tag{4}$$

According to Jemric and Vujcic (2002), both above linear problems yield the optimal solution  $\Theta^*$ , which is the efficiency score (so-called technical efficiency or CCR efficiency) for the particular  $DMU_0$ . The value of  $\Theta$  is always less than or equal to unity. DMU for which  $\Theta^* < 1$  are relatively inefficient and those for which  $\Theta^* = 1$  are relative efficient.

However, CCR model has some drawbacks. First, “it compares DMU’s only based on overall efficiency assuming constant return to scale (CRS). It ignores the fact that different DMU’s could be operating at different scales” (Kabnurkar, 2001). To encounter this weakness, Banker, Charnes and Cooper (1984) developed BCC model which considers variable returns to scale and compares DMUs purely on the basis of technical efficiency.

Jemric and Vujcic (2002) explained that the absence of constraints for the weights  $\lambda_j$  other than the positivity conditions in the problem (4) implies CRS. For allowing variable return to scale (VRS), Equation (4) must be added with the weights  $\lambda_j$ .

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \quad (5)$$

The resulting DEA model that exhibits VRS is called BCC-model. Therefore, the BCC model of DEA as introduced in Banker, *et.al.*, (1984) is:

$$\begin{aligned} \min_{\lambda} z_0 &= \Theta_0 \\ \text{subject to} \quad & \sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0}, \quad r = 1, 2, \dots, s \\ & \Theta_0 x_{i0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \\ & \lambda_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (6)$$

The BCC-efficiency scores are also called “pure technical efficiency scores” since they are obtained from the model that allows VRS and eliminates the “scale part” of the efficiency from the analysis. Generally, the CCR efficiency score for each DMU will not exceed the BCC efficiency score. It is because the BCC model analyzes each DMU “locally” rather than “globally”.

## Findings and Discussions

This study analyzes the level of efficiency in each BPR and BPRS throughout Indonesia using Data Envelopment Analysis (DEA) with a five-year period starting from 2013 to 2017. Overall, the efficiency level of BPRS is much lower than BPR, some even reach 1% (one percent).

### Intermediation Approach

The intermediation approach in research uses loan output channeled, while input variables consist of capital, obligations that can be paid immediately, savings, deposits, bank loans, and total assets.

#### *BPRS*

A total of 114 BPRS which were used as research samples after being selected in accordance with the sample criteria used. Overall, with the intermediation approach, the number of BPRS with an efficiency level equals 1 (one) less than the production approach. The trend in the number of efficient BPRS that emerged in 2013 to 2017 has continued to decline.

In 2013, there were 19 BPRS that had an efficiency level equal to 1 or 100%, namely BPRS Ikhsanul Amal Kab. Kebumen, BPRS Asad Alif Kab. Kendal, BPRS Mitra Agro Usaha Kota Bandar Lampung, BPRS Rahma Syariah District. Kediri, BPRS Bhakti Haji Kab. Malang, BPRS Unawi Barokah Kab Sidoarjo, BPRS Cahaya Hidup Kab. Sleman, BPRS Dana Agung Syariah Kab. Sleman, BPRS Mitra Cahaya Indonesia Kab. Sleman, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, BPRS Harta Insan Karimah City of Makassar, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Daarut Tauhiid Cimahi City, BPRS Bina Amwalul Hasanah City of Depok, BPRS Attaqwa Kab. Serang, BPRS Mulia Eternal Blessing Kab. Serang, and BPRS Musawarah Ummat Indonesia Tangerang City.

In 2014, the number of BPRS operating efficiently was 16 BPRS. Less than in 2013. The sixteen BPRS are BPRS Asad Alif Kab. Kendal, SRB Rajasa Kab. Lampung Tengah, BPRS Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Attaqwa Kab. Serang, BPRS Muamalah Cilegon District. Serang, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Ibadurrahman Kab. Penajam Paset Utara, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, BPRS Daarut Tauhid Cimahi City, BPRS Al Hijrah Amanah City of Depok, SRB Bina Amwalul Hasanah City of Depok, BPRS Investama Mega Baki City of Makassar, BPRS Unawi Barokah District. Sidoarjo, BPRS Situbondo Kab Situbondo, and BPRS Musyarakah Ummat Indonesia City of Tangerang.

In 2015 the number of BPRS declined from previous years. If in 2013 there were 19, in 2014 there were 16, so in 2015 it dropped to only 10 BPRS operating efficiently. The rest is only efficient enough to be very inefficient. The ten BPRS are BPRS Asad Alif Kab. Kendal, BPR Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Ibadurrahman Kab. Penajam Paser Utara, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, SRB Assets of Karimah Bekasi People, Bekasi City, SRB Daarut Tauhid, Cimahi City, SRB Bina Amwalul Hasanah, Depok City, and BPRS Musyarakah Indonesian Community, Tangerang City.

The following year the number of BPRS was efficiently increased from the previous year. In 2016 there were 13 efficient BPRS. The SRB-BPRS is BPRS Adas Alif Kab. Kendal, SRB Al Ihsan District. Bandung, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kab. Bantul, BPRS Gowata Kab. Gowa, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, SRB Daarut Tauhiid Cimahi City, SRB Bina Amwalul Hasanah City of Depok, SRB Assets of Karimah City, Makassar City, BPRS Investama Mega Bhakti City of Makassar, BPRS Unawi Barokah District. Sidoarjo, BPRS Situbondo Kab. Situbondo, and BPRS Musyarakah Ummat Indonesia Tangerang City.

In 2017 the number of efficient BPRS remained the same as the previous year, which was 13. The BPRS was BPRS Mentari Pasaman Saiyo Kab. Pasaman Barat, BPRS Al Ihsan Kab. Bandung, BPRS Artha Fisabilillah Kab. Cianjur, BPRS Gowata Kab. Gowa, Sharia BPRS Magetan Kab. Magetan, BPRS Bhakti Haji Kab. Malang, BPRS Surya Sejati Kab. Takalar, BPRS Daarut Tauhiid Cimahi City, BPRS Al Barokah Kota Depok, BPRS Investama Mega Bakti Kota Makassar, BPRS Unawi Barokah Kab. Sidoarjo, BPRS Situbondo Kab. Situbondo, and BPRS Musyarakah Ummat Indonesia City of Tangerang.

For five years, 2013 - 2017, there were six BPRS that were always operating efficiently. Five consecutive years performing very efficiently, meaning that loans or financing channeled are comparable to capital, liabilities, savings, deposits, bank loans, and total assets obtained.

These BPRS are BPRS Al Ihsan, BPRS Artha Fisabilillah, BPRS Gowata, BPRS Surya Sejati, BPRS Daarut Tauhiid, and BPRS Musyarakah Ummah Indonesia.

Other conditions are BPRS that operate efficiently enough to be very inefficient. Datasegorika for BPRS with technical efficiency is less than 0.5 or 50%, it is stated to be very inefficient, while for the efficiency level of more than equal to 0.5 to less than 1, it is stated to be quite efficient.

So far, the number of BPRS that have an efficiency score of less than 0.5 or 50% is the highest in 2015. During 2013 to 2015 the number of efficient BPRS decreased in line with the increasing number of inefficient BPRS. There is an SRB that has an efficiency level not greater than 10% or 0.01. Although the BPRS has been operating for at least five years, in fact during the five years the level of efficiency was not more than 10%. The BPRS is BPRS Arta Leksana in Kab. Banyumas. For the fifth consecutive year, the efficiency level based on the intermediation approach was only 0.009 or only 9%.

The average BPRS in Indonesia operates inefficiently. This is indicated by the average efficiency score from the calculation results showing the number of 55% -58% for five years. Of all sample BPRS, it was found that a maximum of 59 BPRS had efficiency scores that were below the average efficiency in that year.

In 2013 the average efficiency score was 58.48% or 0.5848. From all samples of BPRS used there are 57 BPRS with efficiency scores smaller than average. In 2014 the average efficiency score was 57% or 0.5700, experiencing an average decline compared to 2013. This year there were 55 BPRS below the average efficiency of national BPRS. In 2015 the average value of efficiency decreased to 0.5516 or 55.16%. From this average, there are 55 BPRS that are below average efficient. In 2016 the average efficiency increased compared to 2015 and the number of BPRS that were below the average also increased. A total of 56 BPRS do not have efficiency values that are greater than the average efficiency value. 2017 is the year with the least number of BPRS below the average. Although the average value increases to 0.5691 or 56.91%, the number of BPRS that is below the average decreases. This shows that more and more BPRS have efficiency values that are greater than average.

## BPR

The number of rural banks that were sampled in this study was 1,308 out of 1,619 rural banks throughout Indonesia or 80.8% of the total population. After an efficiency test on 1,308 BPRs over a five-year period using the intermediation approach, it was produced that the number of efficient BPRs did not reach 4% of the total number of BPRs. The most generated in 2014, where there were 35 efficient BPRs from 1,308 BPRs. Based on these findings, it is necessary to provide guidance to the BPR in order to run efficiently.

Seeing the small number of BPRs that have efficiency values equal to 1 or those that actually operate efficiently, the calculation of the number of BPRs that have efficiency values greater than 0.5 or 50% are carried out. From the following table, it is explained that during the five years of the study period, the number of BPRs that have efficiency is greater than 50%, only around 48% and not more than 49%.

The number of BPRs with an efficiency value of less than 50% in 2013 was 632 or as much as 48.32% of all samples. In 2014 it dropped to 627 or to 47.94% of the total sample. In

2015 experienced a slight increase to 630 or 48.17% and lasted until the end of 2016. In 2017, three BPRs increased to 633 or 48.39%.

After calculating the number of BPRs that have efficiency values below 0.5, then calculating the number of BPRs that have efficiency values below the average for the year. The average value of BPR efficiency every year has almost the same number, ranging from 0.51. In 2013 the average efficiency score was 0.5127, in 2014 it was 0.5157, in 2015 it was 0.5136, in 2016 it was 0.5151, and in 2017 it was 0.5136. Although the average value of efficiency is almost the same, the number of BPRs with efficiency values below average continues to change even though the difference is not too large. 2013 was the year with the number of BPRs with efficiency values below the average of at least compared to the other four years. A total of 648 BPRs from 1,308 have an efficiency value no greater than the average. The following year, 2014, it increased by one BPR to 648. In 2015, another BPR grew to 650, and its peak in 2016 was 652 BPRs. In 2017 there was a decrease in the number of three BPRs to 649.

### Production Approach

In the production approach, the output variable used is the receipt of interest / margin / profit sharing from loans disbursed, and other revenues. While the input variables used are interest / margin / profit sharing of TPF, allowance for possible losses on earning assets, administrative and general expenses, other expenses, and non-operating expenses.

Overall, the efficiency of BPRS using a production approach is better than using the intermediation approach. This is indicated by the value of efficiency in each financial institution, both BPR and BPRS. If using an intermediation approach is often found BPR or BPRS with efficiency values below 0.1 or 10%, but in the production approach there is not even a single BPR or BPR with an efficiency value of less than 10% even though there are still some that are in the number 20%. In addition, the average efficiency is much greater than using intermediation approach. If the intermediation approach, the average efficiency is only around 0.5 but in the production approach, the figure is 0.8 - 0.9. This shows that using the production approach the condition of microfinance institutions is better.

### *BPRS*

The efficiency conditions of BPRS during 2013 - 2017 experienced ups and downs. At the beginning of the 2013 period, of the 114 BPRs declared efficient by using a production approach of 42 BPRS. In the following year, in 2014, the number decreased to 38, in 2015 it rose again to 41, in 2016 it dropped to 39, and again rose as the original position became 42 in 2017.

In 2013, BPRS was efficient enough with the performance of a good BPRS. As many as 36.84% of all BPRS are declared efficient. While there are 14 BPRS with efficiency below 0.5, such as BPRS Carana Kiat Andalas Kab. Agam with an efficiency of 0.395, BPRS Arta Leksana Kab Banyumas and BPRS Suriyah Kab. Cilacap with an efficiency of 0.2, and BPRS Bina Amanah Satria with an efficiency of 0.4. The remaining 58 BPRS have efficiencies between 0.5 - 0.99. The average efficiency in 2013 was 0.8019. Of the 114 BPRS there are 52 BPRS with less than average efficiency, such as BPRS Barokah Yogyakarta Prosperous Fund with an efficiency of 0.696, BPRS Gowata Kab. Gowa with an efficiency of 0.739, and BPRS Bhakti Makmur Indah Kab. Sidoarjo with an efficiency of 0.6.

If in 2013 many BPRS were found with efficiency of less than 0.5, in 2014 there were not one BPRS with an efficiency of less than 0.5. The number of efficient BPRS decreased to 4 BPRS to 38. The average efficiency in 2014 was 0.8710 and there were 45 BPRS with below average efficiency, such as BPRS Mentari Pasaman Saiyo Kab. Pasaman Barat with an efficiency of 0.644, BPRS Carana Kiat Andalas Kab. Agam with an efficiency of 0.395, and BPRS is Obedient to Obey the City of Mataram with an efficiency of 0.51.

In 2015, the number of efficient BPRS increased to 41. There was a slight increase from the previous year, in 2014. The increase in the number of BPRS was efficiently followed by the absence of BPRS that had efficiencies below 0.5. In addition, the average efficiency also increased to 0.9088. Of the average efficiency, there are 48 BPRS that have below average efficiency, such as BPRS Bakti Sumekar Kab. Sumenep with efficiency 0.879, BPRS Jabal Tsur Kab. Pasuruan with an efficiency of 0.891, and BPRS Tulen Amanah Kab. East Lombok with an efficiency of 0.833.

After having experienced a decline and increase in the number of BPRS efficiently in previous years, in 2016 there was a decline of 2 BPRS. If in 2015 there were 41, in 2016 there were 39 BPRS. The average efficiency this year rose from the previous year to 0.9276 and based on the average there were 43 BPRS with below average efficiency, such as BPRS Al Falah from Kab. Banyuasin with an efficiency of 0.859, BPRS Rahma Syariah from Kab. Kediri with an efficiency of 0.881, and BPRS Tanggamus from Kab. Tanggamus with an efficiency of 0.847.

In 2017 efficient BPRS increased again to 42. This was followed by an increase in average efficiency, but also accompanied by an increasing number of BPRS with below average efficiency. The average efficiency is 0.9474 and there are 45 BPRS with efficiency below average, such as BPRS Sarana Prima Mandiri from Pamekasan with an efficiency of 0.904, BPRS Way Right from Kab. Way Kanan with efficiency of 0.86, and BPRS Tulen Amanah from Kab. East Lombok with an efficiency of 0.877. For five years, there are several BPRS that have perfect efficient performance. This means that in five years it operates efficiently continuously, namely BPRS Mulia Berkah Abadi, BPRS Cilegon Mandiri, BPRS Harta Insan Karimah, and BPRS Musyarakah Ummat Indonesia.

### *BPR*

Broadly speaking, the condition of efficiency in BPR using a production approach is better than the intermediation approach. This is evidenced by greater average efficiency and tends to have a greater range of efficiency values than intermediation.

When viewed from an efficient BPR, it can be said that the emerging trend is continuing to decline. In 2013, despite the lowest average efficiency, the number of efficient BPRs was the highest compared to other years. In 2013 there were 314 efficient BPRs. Meanwhile in 2014 it dropped to 309, and continued to fall in 2015 to 291. The next year, 2016, there was a slight increase to 295 and returned in 2017 to 290.

Furthermore, analyzing the average efficiency for each year. In 2013, the average efficiency was 0.7377. This year, there are still BPRs that have an efficiency of less than 0.5, namely 244 or 18.65% of all BPRs having an efficiency of less than 0.5. While in the following years there was no efficiency of less than 0.5. Meanwhile, the number of BPRs with efficiency is less than the average of 544 BPRs, as happened to BPR Adhierresa in Kab. West Bandung

with 0.437 efficiency, Multi-purpose BPR Fund in Bekasi with efficiency of 0.8, and BPR Prima Nusantara in Bekasi with an efficiency of 0.4.

Furthermore in 2014 there was an increase in several categories. The average efficiency increased to 0.8327, followed by an increase in the number of BPRs with efficiency less than the average of 644 BPRs. Some examples of BPRs with less than average efficiency are BPR Wedariyaksa in Kab. Pati with efficiency of 0.606, BPR BKK Tegal in Kab. Tegal with efficiency of 0.61, and BPR Gisawa in Kab. Badung with an efficiency of 0.8.

In 2015 again there was an increase in both the average to the number of BPRs with less than average efficiency. In 2015 the average efficiency increased to 0.8782 and there were 651 BPRs with efficiency below average. Some examples of these BPRs were BPR Dinar Jagad in Kab. Badung with an efficiency of 0.747, BPR Panji Aronta in Kab. Jombang with efficiency of 0.794, and BPR Babat Lestari in Kab. Lamongan with an efficiency of 0.808.

Conditions in 2016 showed a slight decline in certain categories. The average efficiency increased from the previous 0.8782 to 0.9048 which caused a decrease in the number of BPRs with efficiency less than the average to 633. Examples of BPRs with below average efficiency are BPR Majatama in Kab. Mojokerto with an efficiency of 0.875, BPR Tridanasakti in Kab. Malang with efficiency of 0.868, and BPR Arthamas in Kab. Demak with an efficiency of 0.86.

A similar thing happened in 2017. The average efficiency increased to 0.9237 and the number of BPRs below the average efficiently decreased to 624. This means that the condition of BPRs improved with the increasing number of efficient BPRs. An example of a number of BPRs with below average efficiency is BPR Tulus Puji Rejeki in Kab. Kediri with efficiency 0.901, BPR Gunung Mas in Kab. Klaten with an efficiency of 0.884, and BPR Vita Jasaguna in Kab. Sidoarjo with an efficiency of 0.914.

## Conclusion

This study concludes that most rural banks have a better level of efficiency in terms of production compared to the intermediation side. As many as 114 SRBs were used as research samples after being selected according to the criteria of the sample used. Overall, with the intermedia approach the number of BPRS with an efficiency level equal to 1 (one) is less than the production approach. Broadly speaking, the efficiency conditions in BPR using the production approach are better than the intermediation approach. This is evidenced by a greater average efficiency and tends to have a greater range of efficiency values than intermediation.

## References

- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of Baitul Maal. *Humanomics*, 31 (2), 160-182.
- Akbar, R. A. (2010). Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA): Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah pada Tahun 2009). *Skripsi tidak diterbitkan*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Akram, W., Shan, S., Shaikh, S., & Yashkun, U. U. (2016). Determinants of Microfinance Institutions' Efficiency in South Asia during Financial Crisis: A Two-Stage Analysis. *Pakistan Journal of Social Science* , 36 (2), 1089-1099.
- Ameer. (2016). Measuring the Outreach Performance of Interest-Free Microfinance: A Theoretical Framework. *Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management and Technology* , 5 (4), 45-51.
- Awaworyi, S. K., & Marr, A. (2014). Sustainability and Outreach: A Comparative Study of MFIs in South Asia and Latin America and the Caribbean. *Monash University Business and Economics Discussion Paper* .
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi, 2006-2015*. Dipetik Juni 12, 2017, dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1314>
- Bank Indonesia. (2016). Dipetik Juni 12, 2017, dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Konvensional: <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-konvensional/Default.aspx>
- Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. *Management Science* , 1078 - 1092 .
- Beck, T., & Hesse, H. (2006). Foreign Bank Entry, Market Structure and Bank Efficiency in Uganda. *World Bank Policy Research Working Paper* .
- Berger, A. H. (1997). Efficiency of Financial Institutions; International Survey and Directions for Future Research. *European Journal of Operational Research* , 98 (2), 175 - 212.
- Bikker, J. A., & Hu, H. (2002). Cyclical Patterns in Profits, Provisioning, and Lending of Banks Pro-cyclicality of the New Basel Capital Requirements. *BNL Quarterly Review* , 221, 143-175.
- Bourke, P. (1989). Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia. *Journal of Banking and Finance* , 13, 65-79.
- Chirwa, E., & Mlachila, M. (2004). Financial Reforms and Interest Rate Spreads in the Commercial Banking System in Malawi. *IMF Staff Papers* , 51 (1), 96-122.
- Eko, Y. (2011). Pengukuran Tingkat Efisiensi Bank-Bank Umum di Indonesia (2000- 2007): Aplikasi Data Envelopment Analysis (DEA) dan Tobit Analysis. *Jurnal Riset Ekonomi*, 3 (1), 1-19.
- Ferdousi, F. (2013). Performance of Microfinance Institutions in Asia: DEA Based Efficiency Analysis. *International Conference on the Modern Development of Humanities and Social Science* (hal. 91-94). Atlantis Press.
- Flamini, V., McDonald, C., & Schumacher, L. (2009). Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa. *IMF Working Paper* .
- Georgievskaa, L., Kabashi, R., Trajkovska, N. M., Mitreska, A., & Vaskov, M. (2011). Determinants of Lending Interest Rates and Interest Rate Spreads. *SEE Workshop - Bank of Greece* (hal. 5-45). Athens: Bank of Greece Printing Works.
- Guillen, J., Erick, W. R., & Emre, O. (2014). Relative Power and Efficiency as a Main Determinant of Banks' Profitability in Latin America. *Borsa Istanbul Review* , 14, 1-7.
- Hajkova, D., & Hurnik, J. (2007). Cobb-Douglas Production Function: The Case of a Converging Economy. *Czech Journal of Economics and Finance* , 57, 465-476.

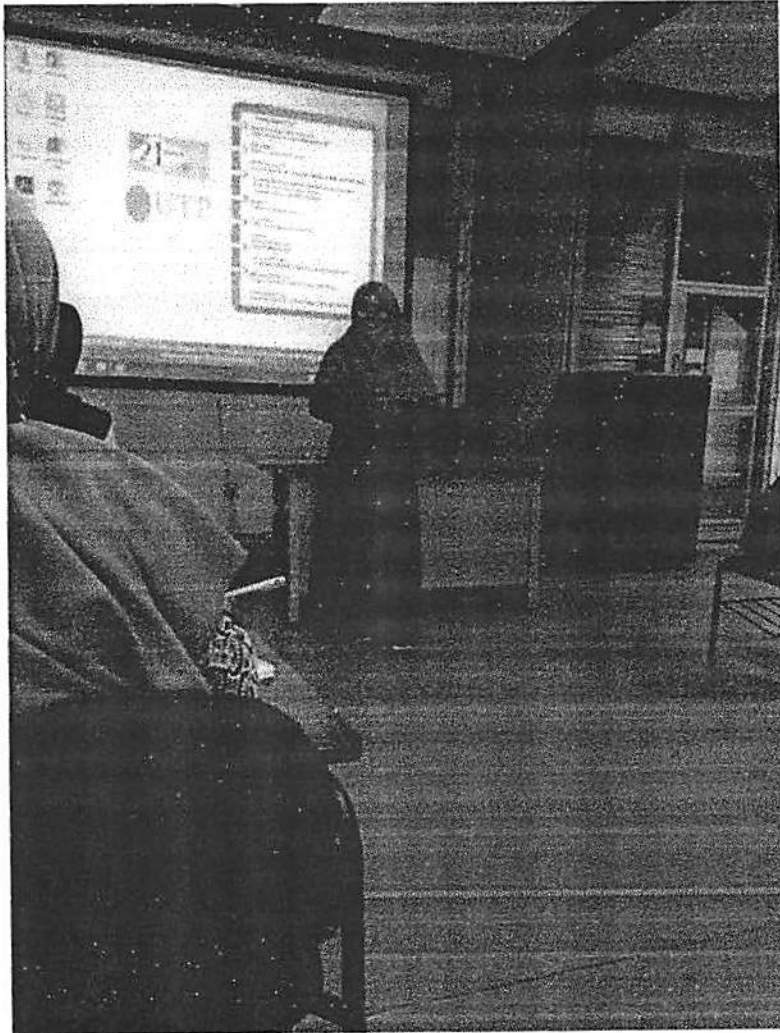


- Hendrojogi. (2015). *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. Jakarta: Pusat Kebijakan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementrian Perdagangan.
- Kurnia, A. S. (2004). Mengukur Efisiensi Intermediasi Sebelas Bank Terbesar Indonesia Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Bisnis Strategi* , 13, 126-140.
- Liu, H., & Wilson, J. O. (2010). The Profitability of Banks in Japan. *Applied Financial Economics* , 20 (24), 1851-1866.
- Masngudi. (1990). *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi.
- Matyas, L., & Sevestre, P. (2008). *The Econometrics of Panel Data*. Verlag Berlin Heidelberg: Springer.
- Moulyneux, P., & Thornton, J. (1992). Determinants of European Bank Profitability: A Note. *Journal of Banking and Finance* , 16, 1173-1178.
- Nouaili, M., Abaoub, E., & Ochi, A. (2015). The Determinants of Banking Performance in Front of Financial Changes: Case of Trade Banks in Tunisia. *International Journal of Economics and Financial* , 5 (2), 410-417.
- Ochola, P. (2016). Two-Stage Study of Efficiency of Savings and Credit Cooperatives. *International Journal of Economics, Commerce and Management* , 4 (4), 1106-1123.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Dipetik Juni 12, 2017, dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>
- Pasiouras, F., Kosmidou, K., & Tsaklanganos, A. (2007). Domestic and Multinational Determinants of Foreign Bank Profits: The Case of Greek Banks Operating Abroad. *Journal of Multinational Financial Management* , 7, 1-15.
- Pasouras, F., & Kosmidou, K. (2007). Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union. *Research in International Business and Finance* , 21 (2), 222-237.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Short, B. (1979). The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe and Japan. *Journal of Banking and Finance* , 3 (3), 209-219.
- Smirlock, M. (1985). Evidence on the (Non) Relationship Between Concentration and Profitability in Banking. *Journal of Money, Credit, and Banking* , 17, 69-83.
- Syamni, G., & Majid, M. S. (2016). Efficiency of Saving and Credit Cooperative Units in North Aceh, Indonesia. *Signifikan* , 5 (2), 99-118.
- Tesfamariam, K., Tesfay, H., & Tesfay, A. (2013). Relative Efficiency of Rural Saving and Credit Cooperatives: An Application of Data Envelopment Analysis. *International Journal of Cooperative Studies* , 2 (1), 16-25.
- USAID. (2006). *Evaluating MFI's Social Performance: A Measurement Tool*. The United States Agency for International Development.

- Vujcic, B., & Jemric, I. (2001). *Efficiency of Banks in Transition: A DEA Approach*. Dubrovnik: Croatian National Bank.
- Wasiaturrahma, & Ajija, S. R. (2016). Evaluating Financial Sustainability of Public Woman Cooperatives in East Java. *Asia International Conference*. Kuala Lumpur: Asia International Conference.

**Lampiran 2**

***GUEST LECTURER DI UNIVERSITY TECHNOLOGY PETRONAS, MALAYSIA***



Lampiran 3

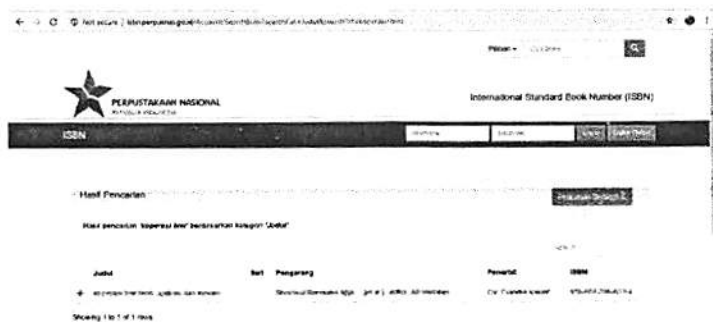
**BUKU KOPERASI BMT: TEORI, APLIKASI DAN INOVASI**

Buku yang berjudul Koperasi Bmt: Teori, Aplikasi dan Inovasi sudah dipublikasikan oleh CV. Diandra Kreatif dengan nomer ISBN 978-602-336-622-4.



**Cover Buku Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi**

Buku ini telah tercatat dalam list perpustakaan nasional sebagaimana gambar berikut:



**Judul Buku di List Perpustakaan Nasional**

Beberapa *chapter* dari buku tersebut juga telah dibahas dalam kegiatan *staff outbound* di UTP Malaysia oleh Dr. Muhammad Pisol Bin Mohd Mat Isa. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan oleh gambar berikut:



**Serah Terima Buku dengan Dosen University Technology Petronas**